



Desain mekanisme pembagian manfaat REDD+ Dari kebijakan ke praktik

Grace Wong
Pham Thu Thuy
Isabela Valencia
Cecilia Luttrell
Anne Larson
Annie Yang
Adinda Hassan
Michelle Kovacevic
Maira Moeliono
Bimo Dwisatrio
Juan Pablo Sarmiento Barletti

Desain mekanisme pembagian manfaat REDD+ Dari kebijakan ke praktik

Grace Wong

Research Institute for Humanity and Nature
Stockholm Resilience Centre and Stockholm University

Pham Thu Thuy

CIFOR-ICRAF

Isabela Valencia

Wellesley College

Cecilia Luttrell

CIFOR-ICRAF

Anne Larson

CIFOR-ICRAF

Annie Yang

School of Social and Political Science, University of Edinburgh

Adinda Hassan

CIFOR-ICRAF

Michelle Kovacevic

Konsultan independen CIFOR

Moira Moeliono

CIFOR-ICRAF

Bimo Dwisatrio

CIFOR-ICRAF

Juan Pablo Sarmiento Barletti

CIFOR-ICRAF

© 2022 Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)



Konten dalam publikasi ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISBN 978-602-387-185-8

DOI: 10.17528/cifor-icraf/008788

Wong G, Pham TT, Valencia I, Luttrell C, Larson A, Yang A, Hassan A, Kovacevic M, Moeliono M, Dwisatrio B, dan Sarmiento Barletti J. 2022. *Desain mekanisme pembagian manfaat REDD+: Dari kebijakan ke praktik*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Terjemahan dari: Wong G, Pham TT, Valencia I, Luttrell C, Larson A, Yang A, Hassan A, Kovacevic M, Moeliono M, Dwisatrio B, and Sarmiento Barletti J. 2022. *Designing REDD+ benefit-sharing mechanisms: From policy to practice*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622

F +62 (251) 8622-100

E cifor@cgiar.org

cifor.org

Kami ingin berterima kasih kepada seluruh donor yang mendukung penelitian ini lewat kontribusi mereka kepada dana CGIAR. Untuk daftar lengkap para donor dapat dilihat disini: <http://www.cgiar.org/about-us/our-funders/>

Seluruh pandangan yang diekspresikan dalam publikasi ini adalah milik penulis. Mereka tidak serta merta merepresentasikan pandangan CIFOR, editor, institusi para penulis, sponsor yang mendanai atau para peninjau.

Daftar isi

1	Pendahuluan	1
2	Memahami faktor kontekstual	3
2.1	Pengaturan hak dan tenurial	4
2.1.1	Bentuk tenurial hutan: negara, umum, swasta, tradisional	4
2.1.2	Reformasi hak dan tenurial: apa masalah hukum yang perlu diselesaikan?	5
2.2	Karakteristik budaya, sosial, dan mata pencaharian: identifikasi prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan	6
2.3	Tata Kelola dan Kebijakan	8
2.3.1	Kewenangan institusi tata kelola	8
2.3.2	Kapasitas Lembaga tata kelola: Keterampilan dan kapasitas dalam kesiapan REDD+	10
2.3.3	Masalah tata kelola berjenjang	17
2.3.4	Derajat desentralisasi (fiskal dan lainnya): Desentralisasi fiskal	20
2.3.5	Penegakkan hukum	25
2.3.6	Instrumen pendukung kebijakan	28
2.3.7	Hubungan dengan kebijakan sektor lain	30
3	Merancang mekanisme pembagian manfaat	35
3.1	Deskripsi/tipologi dasar	35
3.1.1	Tujuan mekanisme	35
3.1.2	Jenis manfaat	36
3.1.3	Jenis keuangan	39
3.2	Bentuk rancangan	41
3.2.1	Jenis kegiatan	41
3.2.2	Persyaratan pembayaran	42
3.2.3	Jadwal pembayaran: kapan manfaat didistribusikan?	43
3.2.4	Siapa saja penerima manfaat dan bagaimana mengidentifikasinya?	44
3.2.5	Apa saja jenis biaya, untuk siapa dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan? Berapa biaya dan bebannya?	49
3.2.6	Struktur pembiayaan kelembagaan	52
3.2.7	Proses pengambilan keputusan dalam desain dan implementasi	55
3.2.8	Kerangka pengaman dan pemantauan	57
4	Kriteria penilaian hasil	63
4.1	Efektivitas	63
4.2	Efisiensi (Efektivitas Biaya)	66
4.3	Kesetaraan	69
4.4	Legitimasi	73
	Referensi	82

1 Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan mekanisme pembagian manfaat menjadi prioritas kunci bagi banyak negara REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, and enhancement of forest carbon stocks* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi Hutan, dan pengayaan cadangan karbon), sejalan dengan berbagai kebijakan dan proyek REDD+ yang memberi insentif kepada pemilik hutan untuk mengubah praktik manajemen hutan tempat mereka bergantung, sekaligus menjaga lingkungan dan keadilan sosial. Diskusi mengenai pembagian manfaat sering diawali dengan berapa jumlah atau seperti apa persentase dari total pembayaran untuk disalurkan pada penerima manfaat. Namun, tidak sesederhana kedengarannya, pemilik hutan tidak memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan hanya untuk alasan perolehan ekonomi.

Pengambil kebijakan dapat menyusun beragam opsi pembagian manfaat, namun perlu menentukan siapa yang dijangkau dalam sebuah program; menetapkan pencapaian; dan menimbang berbagai faktor yang mempengaruhi praktik hutan di masyarakat lokal, pengelola hutan dan badan pemerintah di tingkat lokal dan nasional. Hal ini telah terbukti, meski dalam konteks program seperti REDD+, yang terekspos beragam agenda, tujuan spesifik dari inisiatif tertentu perlu dinyatakan secara eksplisit.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendukung desain dan implementasi mekanisme distribusi pembayaran REDD+. Kami bertujuan untuk membantu dan menginformasikan penyusunan panduan dengan memberikan telaah dari pembelajaran di tingkat tapak. Dokumen ini adalah sebuah versi teks dari versi daring “*Knowledge tree on REDD+ benefit-sharing*” (<https://www.cifor-icraf.org/gcs/knowledge-tree/>). *Knowledge tree* ini diinisiasi pendanaannya oleh Uni Eropa dan disusun oleh para ahli yang tergabung dalam proyek ‘Opportunities and Challenges in Implementing REDD+ Benefit Sharing in Developing Countries (2012–2016)’ termasuk di dalamnya adalah Grace Wong, Cecilia Luttrell, Anne Larson, Annie Yang, Adinda Hassan, dan Michelle Kovacevic. Sejak itu, kebijakan dan proyek mengenai mekanisme pembagian manfaat di REDD+ baik secara global maupun nasional telah mengalami perubahan yang signifikan, dengan adanya aturan baru dan diskursus mengenai bagaimana seharusnya manfaat seharusnya didistribusikan. Kemunculan proyek percontohan REDD+ dalam jumlah yang besar sejak 2016 telah menawarkan banyak pembelajaran mengenai apa yang harus dan bisa dilakukan untuk mencapai mekanisme pembagian manfaat yang efektif, efisien dan berkesetaraan. Dokumen ini memberikan studi kasus yang termutakhir dan pembelajaran dari mekanisme pembagian manfaat sejak 2018 hingga saat ini, dengan dukungan finansial dari the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) melalui proyek CIFOR bertajuk *Global Comparative Study on REDD+ (GCS REDD+) Phase 4: Knowledge for action to protect tropical forests and enhance rights (2021–2023)*. *Knowledge tree* tentang pembagian manfaat versi ini dimutakhirkan oleh Pham Thu Thuy, Isabela Valencia dan Grace Wong, dan berbasis pada tinjauan literatur terkini mengenai mekanisme pembagian manfaat di Brazil, Indonesia, DRC, Peru dan Vietnam – negara-negara yang menjadi fokus studi di fase keempat GCS-REDD+.

Kami mengadopsi kriteria berikut ini untuk pemutakhiran studi kasus:

- Studi kasus yang tersedia publikasinya sejak 2015 hingga 2022.
- Studi kasus dari Indonesia, Vietnam, DRC, Brazil dan Peru menjadi prioritas karena CIFOR memfokuskan kegiatannya di lokasi-lokasi tersebut di fase keempat GCS-REDD+.

Untuk setiap bagiannya, kami telah mencoba untuk mencari studi kasus yang memperlihatkan kesuksesan sebuah program dan contoh-contoh tantangan dan kegagalan dari sebuah program. Dengan menampilkan kedua keluaran, kami dapat mengidentifikasi factor pendukung atau penghambat yang dapat membentuk keluaran pembagian manfaat dari sebuah program REDD+.

Kelompok sasaran

Target pengguna kami adalah para pengambil kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam desain dan implementasi mekanisme distribusi pembayaran REDD+ sebagai donor, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi internasional pendukung implementasi REDD+.

Dokumen ini terbagi dalam tiga bagian:

- Bagian 1 perkenalan konsep dan kerangka analitis yang mendasari pengembangan skema distribusi pembayaran, dan menyediakan sumber daya bermakna bagi mereka yang mencari tinjauan. Disediakan pula pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dan dijawab sebelum menyusun mekanisme distribusi pembayaran.
- Bagian 2 memberikan nasihat lebih detail untuk desain dan implementasi mekanisme distribusi pembayaran REDD+ mengenai apa yang perlu dipertimbangkan pada setiap tahapan desain dan proses implementasi.
- Bagian 3 memperkenalkan kerangka asesmen untuk menilai berbagai opsi mekanisme pembagian manfaat.

Dokumen ini juga memberikan contoh ilustratif bagaimana berbagai negara, proyek dan program mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

2 Memahami faktor kontekstual

Supaya efektif, mekanisme pembagian manfaat (BSM) juga harus mempertimbangkan konteks. Sebagai kebijakan yang relatif baru, REDD+ telah terwarnai oleh berbagai kebijakan lain yang sudah ada. Pada beberapa kasus, alih-alih perubahan praktik atau perubahan sistem, kebijakan tersebut justru memperkuat *status quo*.

Ekonomi hutan/nilai lahan di kawasan REDD+

Nilai yang disematkan pada hutan dan lahan tidak sama di seluruh negara karena variasi karakteristik seperti fitur geofisika (tanah, keanekaragaman hayati/biodiversitas, keterpencilan) dan pasar (permintaan spesies kayu spesifik, persaingan untuk mengonversinya menjadi areal penggunaan lain).

Konversi ekosistem kaya karbon menjadi perkebunan di Kalimantan, Indonesia [Studi Kasus]

Liu et al. (2020) melakukan penelitian yang membandingkan sekuestrasi karbon di perkebunan karet dan kelapa sawit di Kalimantan, Indonesia. Para penulis menemukan bahwa penyerapan karbon di perkebunan memengaruhi biaya peluang yang lebih kecil daripada tingkat diskonto sosial karena lama waktu yang dibutuhkan perkebunan untuk mengimbangi karbon yang dilepaskan dari konversi hutan alam menjadi perkebunan.

Para peneliti menemukan bahwa biaya peluang di Kalimantan, Indonesia, berkisar antara 3.5 t CO₂-1 hingga 19.6 t CO₂-1, bergantung pada tingkat diskonto sosial dengan nilai rata-rata sebesar USD 8.56 t CO₂-1. Dalam menambah atau mengurangi luas perkebunan sekitar 10% atau 20%, mereka menemukan bahwa tanpa mempertimbangkan karbon di perkebunan, perubahan biaya peluang tambahan hanya sekitar 6% ketika luas perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 10%. Ketika luas perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 20%, biaya peluang meningkat dari 13,3% menjadi 51,6%. Perkebunan karet menunjukkan kecenderungan yang sama: biaya peluang meningkat dari 3% hingga 13,3% untuk kasus 10% dan dari 7,5% hingga 25,5% pada kasus 20%. Ketika membandingkan skenario pertama, biaya peluang menurun sebesar 2,3% ketika luas perkebunan kelapa sawit meningkat 20%. Nilai untuk perkebunan kelapa sawit selalu lebih besar daripada perkebunan karet. Para peneliti menyimpulkan bahwa biaya peluang meningkat lebih cepat di perkebunan kelapa sawit daripada di perkebunan karet.

Karena konversi ekosistem tinggi karbon menjadi perkebunan menyebabkan hilangnya ekosistem kaya-karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim, pembayaran REDD+ harus cukup menutupi biaya peluang yang dihadapi pemilik tanah karena tidak mengembangkan lahan. Mengevaluasi dampak penyerapan karbon perkebunan dapat membantu pembuat kebijakan lokal merancang program penyerapan karbon REDD+ yang menarik secara finansial dan efektif di hutan tropis lainnya¹.

1 Liu, G.; Liu, Q.; Song, M.; Chen, J.; Zhang, C.; Meng, X.; Zhao, J.; Lu, H. Costs and Carbon Sequestration Assessment for REDD+ in Indonesia. *Forests* 2020, 11, 770. <https://doi.org/10.3390/f11070770>

2.1 Pengaturan hak dan tenurial

2.1.1 Bentuk tenurial hutan: negara, umum, swasta, tradisional

Bagaimana persepsi kepemilikan tanah?

Dalam banyak kasus, persepsi kepemilikan berbeda antar orang tergantung dengan siapa anda berbicara.

Peran penting masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Indonesia [Studi Kasus]

Pada tahun 1984, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kalimantan, Indonesia menjalani penandaan batas baru. Ada berbagai cerita mengenai bagaimana konsultasi dengan desa-desa setempat dilakukan, tetapi kemungkinan skenario besar bahwa ada pertemuan dilakukan pada tahun 1985 di ibu kota Kabupaten Nanga Pinoh. Kepala desa diundang di pertemuan itu dan diberi tahu bahwa cagar alam akan melindungi hutan dari konsesi penebangan dan pembalakan liar yang berkembang pesat pada saat itu. Pemerintah memiliki dokumentasi yang menunjukkan tanda tangan kepala desa, tetapi responden dari desa melaporkan bahwa mereka tidak diinformasikan dengan tepat tentang keberadaan taman dan tidak memberikan persetujuan.

Saat ini, penduduk desa percaya bahwa batas Taman Nasional yang dipaksakan telah mencaplok lahan perkebunan karet mereka dan menghambat akses ke sumber daya alam. Untuk menanggapi keluhan penduduk desa tentang taman nasional, pemerintah telah menawarkan kompensasi untuk hilangnya peluang ekonomi. Namun, sebagian besar penduduk desa menolak menerimanya karena percaya bahwa menerima keuntungan moneter seperti itu akan melegitimasi keberadaan taman yang mereka tolak sejak awal. Sebaliknya, mereka menginginkan pengakuan atas klaim tanah adat mereka.

Proses desentralisasi di Indonesia telah meninggalkan pengelolaan taman nasional berada pada kewenangan pusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya, pemerintah kabupaten dan kecamatan, yang lebih bertanggung jawab langsung kepada penduduk lokal yang memilih mereka, tidak cukup diberdayakan untuk mengajukan klaim adat lokal tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi. Dengan absennya perwakilan resmi pemerintah atas klaim-klaim ini, termasuk penolakan terhadap pengaturan pembagian manfaat yang diusulkan, penduduk desa beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak-hak masyarakat adat untuk memajukan klaim mereka dan mencapai hasil yang mereka inginkan².

Ketidakjelasan hukum tentang perhutanan sosial dan kepemilikan hutan desa di Indonesia [Studi Kasus]

Di Indonesia, undang-undang baru tentang pemerintahan desa (UU No. 6/2014) memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola aset mereka, termasuk hutan milik desa. Namun, undang-undang Kehutanan menetapkan kewenangan negara atas semua hutan di tingkat nasional dan tidak jelas sampai sejauh mana hutan negara dalam kawasan desa merupakan aset desa. Dalam praktiknya, hak-hak desa untuk pemanfaatan hasil hutan utama secara eksklusif dari hutan di sekitarnya biasanya telah diakui secara *de facto*. Banyak dan kompleksnya undang-undang serta peraturan yang saling bertentangan terkait dengan penggunaan lahan lokal menjadi masalah yang sulit dalam mengikuti prosesnya. Hal itu mengurangi motivasi pengelola hutan untuk memperbaiki tata kelola hutan dan memberdayakan masyarakat lokal³.

2 Myers R and Muhajir M. 2015. Searching for Justice: Rights vs “Benefits” in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia. *Conservation & Society* 13(4):370-381

3 Moeliono, M., Pham, T.T., Bong, I.W., Wong, G.Y., Brockhaus, M., 2017. Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *FS* 1, 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>

2.1.2 Reformasi hak dan tenurial: apa masalah hukum yang perlu diselesaikan?

Masalah hukum seputar hak dan penguasaan hutan sangat banyak, beragam, dan kompleks.

Membangun pondasi tenurial yang jelas dan aman sangat penting untuk memenuhi tujuan mitigasi perubahan iklim dari REDD+ dan untuk melindungi mata pencarian dan hak para pemangku kepentingannya. Meskipun pondasi sudah terbangun, masih banyak yang harus dilakukan. Kesepakatan perubahan iklim global melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) akan memberikan motivasi yang kuat untuk mendorong tenurial lahan. Sudah ada langkah ke arah yang benar: deklarasi para pemimpin tentang hutan dan penggunaan lahan, yang secara publik mengakui masyarakat pribumi dan komunitas lokal atau *Indigenous Peoples and Local Communities* (IPLC) sebagai aktor terbaik untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati, melibatkan komitmen USD 19,2 miliar yang ditujukan untuk melindungi dan merestorasi hutan, yang di antaranya sebanyak USD 1.7 milyar digunakan untuk mendukung IPLC. Mengingat waktu yang panjang dalam menyelesaikan masalah penguasaan hutan, sangat penting bagi negara-negara untuk terus bergerak maju. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup hal-hal berikut:

- Reformasi tenurial hutan;
- Hubungan antara tenurial hutan dan mekanisme penanganan keluhan;
- Partisipasi pemetaan oleh lembaga dalam pengambilan keputusan tata guna lahan nasional;
- Resolusi kontestasi yang lama antara klaim lahan hutan adat dan hukum;
- Tinjauan mengenai konsesi lahan hutan industri yang ada dan yang sedang direncanakan dengan mempertimbangkan rencana konversi hutan, aforestasi, reboisasi, dan REDD+ yang berjalan bersamaan;
- Klarifikasi atas hak karbon hutan.

Kebutuhan reformasi tenurial hutan di Taman Nasional Cat Tien, Vietnam [Studi Kasus]

Meskipun Program Pembayaran Jasa Hutan dan Lingkungan (PFES) di Vietnam memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat miskin dan etnis minoritas, beberapa orang dari etnis Kinh menganggap program PFES saat ini tidak adil dan diskriminatif karena pedoman yang ada menghambat partisipasi mereka. Di bawah kebijakan saat ini, pemerintah Vietnam memprioritaskan alokasi lahan hutan dan manfaat terkait dengan hutan kepada masyarakat pribumi. Menurut wawancara dengan pemangku kepentingan, hal ini mempersulit etnis Kinh untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari PFES. Masyarakat Kinh mengungkapkan bahwa meskipun tidak mendapat manfaat dari kebijakan saat ini, mereka tetap dimobilisasi untuk melindungi hutan desa ketika dibakar atau dirambah oleh orang luar. Peserta dalam diskusi kelompok terarah mengindikasikan bahwa mereka tidak merasa memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan hutan karena mereka tidak memiliki kepemilikan tanah secara formal. Banyak dari mereka yang mengakui hanya berpatroli di hutan pada hari-hari ketika dibayar dan mengklaim bahwa pihak berwenanglah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan berpatroli pada hari-hari tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa saat program PFES di Vietnam membawa dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi banyak peserta, fokus program yang hanya pada satu kelompok rentan telah melemahkan dan mengurangi insentif bagi kelompok sosial lain untuk bergabung. Reformasi penguasaan hutan yang memperluas lahan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi hutan dapat memobilisasi sumber daya yang lebih besar dan dukungan terhadap perlindungan hutan⁴.

4 Pham TT, Nguyen TD, Dao CTL, Hoang LT, Pham LH, Nguyen LT and Tran BK. 2021. Impacts of Payment for Forest Environmental Services in Cat Tien National Park. *Forests* 12(7):921. <https://doi.org/10.3390/f12070921>

Penegakkan Hak Eksklusi [Studi Kasus]

Hutan yang ingin dilindungi oleh REDD+, tidak hanya terancam dari pemangku kepentingan lokal, tetapi dalam banyak kasus dari para pengklaim eksternal atas hutan lokal. Pihak luar ini dapat berupa penduduk desa tetangga, migran musiman, pendatang, peternak, dan berbagai jenis perusahaan industri (misalnya, kedelai di Brasil dan kelapa sawit di Indonesia).

Studi Komparatif Global tentang REDD+ oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (GCS REDD+) mengamati 71 desa di lima negara. Studinya menemukan bahwa di hampir dua pertiga desa terdapat pemanfaatan hutan oleh pihak luar dengan hampir seperlima desa tidak berhasil untuk menyingkirkan orang luar.

Hak eksklusi sangat penting untuk ditegakkan karena seluruh gagasan REDD+ tidak hanya bertumpu pada insentif, tetapi juga sarana hukum untuk melindungi hutan dari pihak luar. Hak eksklusi ini juga penting untuk melindungi mata pencarian lokal. Hak eksklusi dapat ditentukan melalui instrumen seperti hak legal untuk petani kecil dan melalui kategori kekuasaan, seperti hutan desa dan Koneksi Restorasi Ekosistem atau *Ecosystem Restoration Concessions* (ERC) di Indonesia dan dapat digunakan untuk menangkis klaim industri⁵.

Peningkatan hukum perhutanan sosial di Vietnam [Studi Kasus]

Undang-Undang Perlindungan dan Pembangunan Hutan Vietnam 2004 digantikan oleh Undang-Undang Kehutanan tahun 2017 yang baru, yang meningkatkan peran, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah Vietnam untuk pengelolaan hutan. Di bawah undang-undang baru, ada penekanan yang lebih kuat pada kebutuhan perlindungan hutan alami dan, untuk pertama kalinya, pengakuan atas hutan keramat dan adat dan kebutuhan untuk menghormatinya. UU 2017 juga mempromosikan prioritas partisipasi masyarakat lokal dan kelompok etnis minoritas, rumah tangga, individu, dan komunitas masyarakat dengan adat, tradisi, budaya, kepercayaan, dan tradisi yang melekat pada hutan. Undang-undang baru ini merupakan sebuah langkah menuju pembentukan landasan tenurial yang jelas dan aman dengan memberikan klarifikasi yang lebih baik tentang kepemilikan hutan⁶.

2.2 Karakteristik budaya, sosial, dan mata pencaharian: identifikasi prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan

Program-program REDD+ akan berhasil jika disesuaikan untuk memaksimalkan penerimaan dan dukungan masyarakat.

Pendukung proyek REDD+ harus mempertimbangkan budaya, karakteristik sosial, dan mata pencarian serta prioritas masyarakat yang terlibat, serta menyesuaikan pendekatan mereka untuk mempromosikan manfaat REDD+. Penerima manfaat dan pendukung diharuskan menemukan keseimbangan antara tuntutan sosial-ekonomi dan lingkungan, karena itu, mereka perlu mengidentifikasi manfaat utama untuk diprioritaskan sesuai karakteristik masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pemahaman akan program dan motivasi untuk berpartisipasi dalam skema, dan dengan demikian mendukung keberhasilan program.

5 Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle AE, Resosudarmo IA, Huynh TB, Awono A and Dokken T. 2014. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development* 55:37-52. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01>.

6 Pham, T.T., Hoang, T.L., Nguyen, D.T., Dao, T.L.C., Ngo, H.C., Pham, V.H., 2019. The context of REDD+ in Vietnam: Drivers, agents and institutions [2nd edition]. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007402>

Hubungan sosial dan politik yang berperan dalam persepsi penduduk desa Vietnam tentang program PFES [Studi Kasus]

Studi mengenai program PFES Vietnam di tingkat masyarakat mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan pada pihak berwenang dan interpretasi lokal tentang kesetaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi bagaimana manfaat PFES harus didistribusikan. Jika tingkat kepercayaan rendah, penduduk desa menganggap pembayaran tunai langsung yang dibagi rata di antara semua partisipan sebagai yang paling adil meskipun pembayarannya kemungkinan kecil. Sebaliknya, di mana ada kepercayaan, penduduk desa lebih cenderung mengekspresikan preferensi untuk manfaat tambahan seperti infrastruktur lokal dan layanan sosial⁷. Konteks masyarakat yang berbeda dapat membentuk preferensi yang berbeda di antara penduduk desa sehingga proyek REDD+ harus disesuaikan untuk memaksimalkan penerimaan program.

Masyarakat di daerah lebih miskin di Nepal membutuhkan dukungan tambahan untuk melawan pertukaran ekonomi dan mata pencaharian yang tinggi daripada keterlibatan dalam perlindungan hutan [Studi Kasus]

Sebuah studi di Nepal menyoroti pentingnya mengenali dan mengidentifikasi masyarakat yang akan membutuhkan lebih banyak dukungan daripada yang lainnya agar program berhasil. Di Nepal, menempatkan hutan di bawah kendali masyarakat telah mengurangi deforestasi dan kemiskinan sekaligus berkontribusi pada hasil lingkungan dan sosial-ekonomi yang positif⁸.

Ketika sistem kehutanan masyarakat telah menghasilkan dampak positif, seperti penguasaan yang lebih besar atas sumber daya hutan mereka, peningkatan mata pencaharian dan ketahanan iklim, dampaknya lebih lemah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Untuk masyarakat yang lebih miskin kebutuhan ekonomi dan mata pencaharian lebih mendesak sehingga mereka tidak mampu memperhatikan lingkungan dan pencegahan degradasi hutan dan deforestasi. Masyarakat ini mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk meminimalkan biaya peluang yang mereka hadapi dalam mendukung perlindungan hutan⁹.

Peran budaya: Menyesuaikan pendekatan untuk mempromosikan manfaat REDD+ yang dirasakan berdasarkan rezim pengelolaan hutan dan prioritas masyarakat di Kalimantan, Indonesia [Studi Kasus]

Sebuah studi yang membandingkan rezim pengelolaan hutan berbasis swasta, negara dan masyarakat di Kalimantan, Indonesia menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mempromosikan REDD+, tergantung pada rezim hutan. Studi ini membandingkan mereka yang tinggal di rezim pengelolaan hutan yang berbeda dan menemukan perbedaan dalam persepsi manfaat REDD+. Responden di rezim swasta dan pemerintah merasakan manfaat ekonomi yang lebih tinggi sedangkan responden di rezim penguasaan oleh masyarakat, manfaat lingkungan dirasakan yang lebih tinggi daripada rezim lainnya. Karena masyarakat berbeda akan berbeda dalam jenis manfaat yang mereka prioritaskan dan cari, proyek REDD+ harus disesuaikan dengan mempertimbangkan secara hati-hati rezim hutan yang ada¹⁰. Memastikan bahwa program selaras dengan prioritas masyarakat meningkatkan kemungkinan bahwa kompensasi dianggap sebagai hal yang adil dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program.

- 7 Pham TT, Moeliono M, Brockhaus M, Le DN, Wong G and Le TM. 2014. Local preferences and strategies for effective, efficient, and equitable distribution of PES revenues in Vietnam: Lessons for REDD+. *Human Ecology* 42(6): 885–899.
- 8 Oldekop, J.A., Sims, K.R.E., Karna, B.K., Whittingham, M.J., Agrawal, A., 2019. Reductions in deforestation and poverty from decentralized forest management in Nepal. *Nat Sustain* 2, 421–428. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3>
- 9 NYDF Assessment Partners. 2021. *Taking stock of national climate action for forests*. Amsterdam: Climate Focus. Accessed 11 Jun 2023. <https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/>
- 10 Rakatama, A., Iftekhhar, M.S., Pandit, R., 2020. Perceived benefits and costs of REDD+ projects under different forest management regimes in Indonesia. *Climate and Development* 12, 481–493. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1642178>

2.3 Tata Kelola dan Kebijakan

2.3.1 Kewenangan institusi tata kelola

Penting untuk mempertimbangkan dan mengkoordinasikan kewenangan antar institusi.

Memperjelas peran, tanggung jawab, dan mandat pengambilan keputusan antar berbagai bentuk tata kelola hutan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi dari inisiatif REDD+.

Pemerintah pusat dan daerah sama-sama memainkan peran penting, tetapi kapasitas dan kepentingan mereka tidak selalu seimbang

Pemerintah daerah mungkin akan kesulitan untuk mengimplementasikan program REDD+ jika tidak ada sinergi dengan pemerintah pusat. Berbagai tingkat pemerintahan perlu berkoordinasi, memastikan bahwa kebijakan diselaraskan dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dengan benar sehingga pemicu deforestasi dapat diatasi.

Pemerintah daerah: sedikit kekuasaan dengan lebih banyak tanggung jawab?

Pemerintah daerah di negara yang memiliki hutan bervariasi dalam tingkat pengaruh yang mereka miliki untuk mengelola dan mengatur lahan. Dalam beberapa kasus, pemberian hak milik dan penerbitan izin sebagian besar masih berada dalam lingkup badan-badan nasional. Di negara lain, tanggung jawab ini bervariasi antarlevel, bergantung pada sektornya.

Siapa yang memiliki kekuasaan penggunaan lahan di Vietnam?

Pada tahun 1986, Vietnam mulai meluncurkan reformasi kebijakan yang dikenal sebagai “*Doi Moi*”, antara lain dengan desentralisasi pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari reformasi kebijakan, sistem hukum telah direvisi secara bertahap dengan kewenangan untuk mengelola lahan dan hutan dialihkan ke berbagai tingkat pemerintahan yang “lebih rendah”. Hal ini menghasilkan klasifikasi kekuasaan dan mandat yang lebih jelas, dan memberi pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan atas pengelolaan lahan dan hutan. Namun, meskipun di Vietnam desentralisasi pengelolaan lahan dan hutan cukup maju, dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah diberi tanggung jawab dan mandat yang lebih besar, proses desentralisasi terhambat oleh kurangnya sumber daya keuangan dan tenaga kerja¹¹. Hal ini terjadi karena meskipun desentralisasi di Vietnam telah memberikan kuasa untuk mengambil keputusan dalam negosiasi penggunaan lahan, kekuasaan sebenarnya masih berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kelompok kecil memiliki kekuasaan diskresi untuk mempromosikan relevansi lokal, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kekuasaan, sumber daya keuangan, dan kemampuan untuk membuat keputusan penting¹². Proses desentralisasi perlu lebih memperhatikan kewenangan pemerintah daerah untuk memutuskan sumber daya yang tepat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Desentralisasi harus memperjelas kekuasaan dan sumber daya yang dibutuhkan para pemimpin dan individu di tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung pelaksanaan program yang efektif di tingkat lokal.

-
- 11 Pham, T.T., Hoang, T.L., Nguyen, D.T., Dao, T.L.C., Ngo, H.C., Pham, V.H., 2019. The context of REDD+ in Vietnam: Drivers, agents and institutions [2nd edition]. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007402>
- 12 Yang A, Tien ND, Phuong VT, Trung LQ, Thuy TP, Larson AM and Ravikumar A. 2016. Analyzing multilevel governance in Vietnam: Lessons for REDD+ from the study of land-use change and benefit sharing in Nghe An and Dien Bien provinces. Working Paper 218. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006392>

Pemerintah Subnasional Acre Brasil sangat selaras dengan program REDD+ nasional [Studi Kasus]

Pemerintah Subnasional Acre Brasil menetapkan tingkat emisi rujukan atau *Forest Reference Emission Level* (FREL) dan sistem informasi kerangka pengaman (*safeguard*) yang selaras dan kompatibel dengan program REDD+ di tingkat nasional¹³. Negara bagian Acre di Brasil mengembangkan program yurisdiksi REDD+ pertama di dunia melalui Undang-Undang Sistem Insentif untuk Jasa Lingkungan 2010 dengan dukungan dari program Penggerak Awal atau *REDD+ Early Movers* (REM) REDD+ pemerintah Jerman dari tahun 2012. Sejak itu, pemerintah subnasional telah menciptakan ruang untuk partisipasi politik, memanfaatkan kebijakan dan program negara untuk memenuhi kebutuhan konstituen dan mendukung penentuan nasib sendiri masyarakat asli¹⁴. Sistem desentralisasi di Brasil memberikan pemerintah subnasional seperti Acre kekuatan hukum dan politik sementara mereka juga lebih dekat dengan masyarakat yang memutuskan penggunaan lahan. Pemerintah daerah yang sangat selaras dengan program REDD+ nasional dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan proyek REDD+ di lapangan dan mempromosikan tujuan REDD+ nasional.

Tantangan pemerintah daerah di Indonesia untuk memenuhi Perjanjian Rio Branco [Studi Kasus]

Sebuah studi yang mengevaluasi kemajuan pemerintah daerah Indonesia dalam mencapai sasaran yang diutarakan dalam deklarasi Rio Branco –sebuah perjanjian yang ditandatangani antara tahun 2014 dan 2018 oleh yurisdiksi, termasuk di antaranya beberapa dari Indonesia, berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020– ternyata tidak menemukan kemajuan nyata. Di Indonesia, hanya satu provinsi (Kalimantan Barat) dari empat yang diteliti memiliki target pengurangan deforestasi yang terukur dan terikat waktu dalam Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi. Proses desentralisasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1990-an mengalihkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah pusat ke unit-unit subnasional. Akan tetapi meskipun provinsi memperoleh kewenangan atas perlindungan dan pengelolaa hutan, tetapi tidak memiliki kekuasaan atas penyebab deforestasi. Lagi pula, proses desentralisasi ini tidak didukung oleh undang-undang yang selaras. Hukum, peraturan, dan prioritas yang bertentangan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal menciptakan inkonsistensi tata kelola REDD+ di tingkat provinsi di Indonesia. Tingkat pemerintahan yang berbeda perlu dikoordinasikan agar tingkat pemerintahan yang tepat memiliki kewenangan yang tepat atas pengelolaan hutan¹⁵.

13 Duchelle, A., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, AM., Moeliono, M., Wong, G.Y., Pham, T.T., Martius, C., n.d. 2019. Forest-based climate mitigation: lessons from REDD+ implementation. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7428/>

14 DiGiano, M., Mendoza, E., Ochoa, M., Ardila, J., Oliveira de Lima, F., Nepstad, D., 2018. The Twenty-Year-Old Partnership Between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil

15 Stickler, C., David, O., Chan, C., Ardila, J.P., Bezerra, T., 2020. The Rio Branco Declaration: Assessing Progress Toward a Near-Term Voluntary Deforestation Reduction Target in Subnational Jurisdictions Across the Tropics. *Front. For. Glob. Change* 3, 50. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050>

Memperluas kebijakan negara bagian menjadi kebijakan federal: Cadastro Ambiental Rural dari Mato Grosso [Studi Kasus]

Cadastro Ambiental Rural (CAR) atau Registrasi Lingkungan Pedesaan Brasil adalah inovasi kebijakan publik yang merupakan terobosan penting Undang-Undang Perlindungan Vegetasi Asli untuk pemantauan lingkungan di Brasil. Di bawah CAR, pemilik lahan harus memberikan georeferensi batas-batas properti mereka dan kawasan yang dilindungi secara hukum. Kebijakan tersebut berasal dari Mato Grosso dan diuji pula di Mato Grosso sebelum diperluas sebagai undang-undang federal. Keberhasilan penerapan CAR dan penggabungannya ke dalam undang-undang dan kebijakan federal adalah hasil dari komitmen negara untuk membangun jaringan alat, program, dan kebijakan yang kuat untuk memantau dan mengendalikan deforestasi selama tiga dekade terakhir¹⁶. Undang-undang kehutanan dapat diuji dalam skala yang lebih kecil di tingkat subnasional, dan jika berhasil, dapat ditingkatkan ke tingkat nasional.

2.3.2 Kapasitas Lembaga tata kelola: Keterampilan dan kapasitas dalam kesiapan REDD+

Rencana pengelolaan hutan dan MRV

Rencana pengelolaan hutan adalah sebuah proses yang membantu mengidentifikasi sumber daya dan peluang yang tersedia di bagian hutan tertentu. Rencana pengelolaan hutan biasanya mencakup tujuan dan sasaran jangka panjang, inventarisasi hutan yang terperinci, daftar rekomendasi pengelolaan dan jadwal kegiatan. Mekanisme berbasis hasil, seperti REDD+, memerlukan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV) yang andal untuk mengukur kinerja. Hal ini melibatkan pengukuran perubahan stok dan/atau aliran karbon hutan, melaporkan perubahan tersebut secara transparan dan tepat waktu serta memverifikasi perkiraan melalui pihak ketiga yang independen. Untuk mencapai tujuan terkait karbon melalui REDD+, diperlukan rencana pengelolaan dan sistem MRV yang tepat. Jika pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan rencana tersebut, dukungan tambahan diperlukan untuk membekali mereka dengan pelatihan dan keterampilan yang tepat.

Memastikan koordinasi dalam inventarisasi kehutanan nasional: perbedaan dalam dua sistem klasifikasi penggunaan lahan di Vietnam [Studi Kasus]

Di Vietnam, dua database negara yang terpisah yaitu klasifikasi dan administrasi lahan dibandingkan dan menunjukkan perbedaan dalam data kehutanan. Database pertama yang dikelola oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan berisi informasi tentang pengelolaan tanah, termasuk luas tanah dan perencanaan penggunaan lahan. Database kedua yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan mendefinisikan kategori hutan dan lahan hutan dan berisi data tentang luas cakupan hutan¹⁷. Keberadaan dua sistem klasifikasi penggunaan lahan memperumit upaya pemantauan dan pelaporan kehutanan nasional karena penilaian didasarkan pada perubahan cakupan hutan dari waktu ke waktu, sedangkan pembagian manfaat REDD+ bergantung pada data pendaftaran penggunaan lahan¹⁸. Untuk mengkoordinasikan

Bersambung ke halaman berikutnya

- 16 Roitman, I., Cardoso Galli Vieira, L., Baiocchi Jacobson, T.K., da Cunha Bustamante, M.M., Silva Marcondes, N.J., Cury, K., Silva Estevam, L., da Costa Ribeiro, R.J., Ribeiro, V., Stabile, M.C.C., de Miranda Filho, R.J., Avila, M.L., 2018. Rural Environmental Registry: An innovative model for land-use and environmental policies. *Land Use Policy* 76, 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.037>
- 17 Pham, T.T., Moelino, M., Nguyen, T.H., Nguyen, H.T., Vu, T.H., 2012. The context of REDD+ in Vietnam: Drivers, agents and institutions. *CIFOR*. <https://doi.org/10.17528/cifor/003737>
- 18 Loft, L., Le, D.N., Pham, T.T., Yang, A.L., Tjajadi, J.S. and Wong, G.Y., 2017. Whose equity matters? National to local equity perceptions in Vietnam's payments for forest ecosystem services scheme. *Ecological Economics*, 135, pp.164-175.

sistem data nasional agar akuntabilitas secara keseluruhan meningkat, dibutuhkan sumber daya tambahan. Konsolidasi dua database Vietnam menjadi satu akan membantu inventarisasi hutan nasional menjadi akurat dan dapat meningkatkan perencanaan pengelolaan hutan negara.

Proyek Bosques Amazonicas [Studi Kasus]

Dalam proyek Bosques Amazonicas, teknisi dari Federasi produsen kacang Brasil menawarkan bantuan dengan berbagai rencana pengelolaan hutan yang diperlukan untuk memanen atau menjual kacang Brasil secara legal.

Bosques Amazonicos (BAM) adalah perusahaan swasta yang telah bermitra dengan Federasi produsen kacang Brasil Madre de Dios (FEPROCAMD) untuk meningkatkan kehidupan produsen kacang Brasil dan memberikan insentif untuk mempertahankan hutan mereka yang saat ini terancam oleh pertanian migran dan penebangan liar. Kacang Brasil hanya diproduksi oleh pohon yang tumbuh di hutan asli dengan kanopi hutan yang utuh sehingga dengan melindungi produk kacang Brasil, Hutan harus dilindungi. Selain pengukuran, pelaporan, sertifikasi, dan penjualan karbon, BAM telah berjanji kepada masyarakat lokal bahwa pabrik pengolahan kacang Brasil, bantuan hukum dan teknis serta sistem respons cepat untuk mengatasi invasi lahan ilegal akan dilaksanakan di seluruh daerah konsesi kacang Brasil. Inisiatif ini memberikan contoh pendekatan inovatif untuk REDD+ yang melibatkan sektor swasta dan produsen hutan di kawasan keanekaragaman hayati yang terancam.

Peluang peningkatan kapasitas MRV selama COVID-19 [Studi Kasus]

Lembaga mitra Global Forest Observations Initiative (GFOI) dengan pendanaan dari the World Bank's Forest Carbon Partnership Facility menyelenggarakan empat lokakarya dan seri webinar dengan tujuan membangun kapasitas di negara-negara untuk menggunakan Data Earth Observation Remote Sensing untuk memantau perubahan cakupan hutan dan mengukur emisi pengurangan pembayaran berbasis hasil REDD+. Empat lokakarya regional –diadakan di beberapa bagian Asia, Amerika Selatan, dan Afrika menggunakan tiga Bahasa untuk melatih 59 peserta dari 43 negara. Webinar dan lokakarya membahas berbagai alat dan metode yang relevan. Peneliti menemukan bahwa webinar dan lokakarya dianggap jelas dan relevan, dengan lokakarya menjadi pilihan peserta yang lebih disukai. Para peneliti menyarankan bahwa hasil terbaik dapat dicapai dengan menerapkan sistem tradisional dan *e-learning* bersama-sama. Pendekatan *hybrid* harus terus dipertimbangkan di masa depan karena efektivitas pengembangan kapasitas secara langsung dan daring dapat memandu pengembangan inisiatif di masa depan –terutama ketika sumber daya keuangan terbatas– dan membantu untuk terus membina hubungan antara pemangku kepentingan yang dikembangkan selama pertemuan tatap muka dan mempromosikan berbagi informasi yang lebih besar yang dapat menginformasikan rencana pengelolaan hutan secara global¹⁹.

19 Carter, S., Herold, M., Jonckheere, I.G.C., Espejo, A.B., Green, C., Wilson, S., 2021. Capacity Development for Use of Remote Sensing for REDD+ MRV Using Online and Offline Activities: Impacts and Lessons Learned. *Remote Sensing* 13, 2172. <https://doi.org/10.3390/rs13112172>

Inisiatif kesetaraan gender yang menjanjikan di Vietnam terhambat oleh kurangnya kapasitas kelembagaan [Studi Kasus]

Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) yang merupakan badan utama REDD+ di Vietnam memiliki strategi gendernya sendiri untuk tahun 2011-2015 yang mencakup langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan gender dan dengan jelas mendefinisikan peran para pemimpin unit dan departemennya. Strategi Kehutanan Nasional Vietnam (2006-2020) menyediakan ruang yang menjanjikan untuk pengarusutamaan gender dengan adanya kebutuhan mengembangkan kapasitas pejabat kehutanan untuk menangani masalah gender, membentuk unit fokus gender untuk melembagakan pengarusutamaan gender, dan mempromosikan penelitian dan pemantauan yang peka gender. Namun, usaha ini terhambat oleh kurangnya kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia dan keuangan, serta prosedur dan praktik kelembagaan yang kontradiktif. Misalnya, pelatihan hanya diberikan kepada beberapa anggota Komite Kemajuan Perempuan dan belum diutamakan ke seluruh MARD²⁰. Akibatnya kesetaraan gender tidak diprioritaskan dalam proyek-proyek REDD+. Rekomendasi untuk rencana kehutanan masa depan mencakup panduan terperinci tentang bagaimana pengutamaan gender harus dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan masyarakat; pemantauan yang jelas terhadap komitmen pemerintah terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan; meningkatkan jumlah target keterwakilan perempuan dalam peran kepemimpinan dan dewan manajemen; kebijakan, langkah-langkah dan struktur insentif di dalam Lembaga untuk mendorong partisipasi sejati perempuan; dan di tingkat desa dan kelompok kecil, program REDD+ dan PES yang meningkatkan akses mereka ke informasi dan sumber daya²¹.

Tidak meratanya kapasitas teknis MRV antara yurisdiksi di Indonesia [Studi Kasus]

Di Indonesia, sistem MRV untuk proyek REDD+ dirancang sebagai sistem *top-down*²². Meskipun ada upaya untuk membangun kapasitas pemerintah daerah atau provinsi untuk terlibat dalam MRV hutan untuk proyek REDD+, kapasitas teknis lintas yurisdiksi bervariasi²³. Contohnya, proyek the Forest Carbon Partnership Facility's Carbon Fund scheme di Kalimantan Timur, cukup maju karena disertai pelatihan dan peningkatan kapasitas, dengan perantara oleh NGO, lembaga pemerintah, lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga hukum lainnya untuk mendukung masyarakat yang tidak memiliki kapasitas teknis untuk menyusun laporan²⁴. Namun, hal ini adalah pengecualian. Secara umum MRV provinsi kurang berkembang²⁵. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk memasukkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan MRV dalam rencana pengelolaan hutan.

-
- 20 Pham, T.T., Mai, Y.H., Moeliono, M., Brockhaus, M., 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *Int. Forest. Rev.* 18, 334–344. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>
- 21 Pham TT and Brockhaus M. 2015. *Gender mainstreaming in REDD+ and PES: Lessons learned from Vietnam*. Gender Brief 5. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/5900/>
- 22 Ochieng, R.M., Visseren-Hamakers, I.J., Arts, B., Brockhaus, M., Herold, M., 2016. Institutional effectiveness of REDD+ MRV: Countries progress in implementing technical guidelines and good governance requirements. *Environmental Science & Policy* 61, 42–52. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.018>
- 23 Ochieng, R.M., Arts, B., Brockhaus, M., Visseren-Hamakers, I.J., 2018. Institutionalization of REDD+ MRV in Indonesia, Peru, and Tanzania: progress and implications. *E&S* 23, art8. <https://doi.org/10.5751/ES-09967-230208>
- 24 The Ministry of Environmental and Forestry and The Provincial Government of East Kalimantan. 2020. *Benefit Sharing Plan East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction, INDONESIA [Draft 1.6]*. Bogor, Indonesia: P3SEKPI. http://simlit.puspjajak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_GoL29042020.pdf
- 25 Bhomia, R.K., Nofyanza, S., Thürer, T., O'Connell, E., Murdiyoso, D., 2021. Global Comparative Study on REDD+ story of change: CIFOR's science on wetlands for Indonesian measurement, reporting and verification and forest reference emission level development. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/008048>

Politisasi pengumpulan, penyajian, dan analisis data di Son La, Vietnam [Studi Kasus]

Satu studi tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (PFES) di Provinsi Son La di Vietnam –skema PFES terlama di negara tersebut– menemukan bahwa pengumpulan data dipolitisasi untuk melayani kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Karena PFES berkaitan dengan status hutan, kasus pelanggaran, pembayaran PFES dan distribusinya, ada tiga lembaga pemerintah berbeda yang mengumpulkan data nasional dan provinsi tentang PFES sejak dimulainya program pada tahun 2009, tetapi tidak termasuk indikator sosio-ekonomi. Akibatnya, kurangnya data tentang cakupan hutan dan pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah PFES mempersulit untuk memastikan adanya nilai tambah program PFES. Tidak adanya data dasar tentang PFES menyebabkan kurang telitinya penilaian dampak. Ketiga lembaga pemerintah tersebut juga mengumpulkan data menggunakan pendekatan dan jadwal pelaporan yang berbeda. Contohnya, Dana Perlindungan Dan Pengembangan Hutan Son La harus menyampaikan laporan tentang hutan pada bulan Desember, Departemen Perlindungan Hutan Sonla pada bulan Februari, dan Departemen Statistik Son La pada bulan Juni. Jadwal pelaporan yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang dampak PFES. Bahkan, ketika data tersedia, pendekatan pengambilan data, proses, dan hasilnya ditentukan oleh politik. Ini menyoroti pentingnya mekanisme yang transparan, inklusif, dan independen, seperti pemantauan dan evaluasi independen, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data²⁶.

Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk REDD+: DRC dan Indonesia [Studi Kasus]

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) adanya perubahan penutupan hutan telah dipromosikan sebagai strategi yang menurunkan biaya upaya MRV dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan REDD+²⁷.

Melibatkan masyarakat lokal dalam pemetaan dan kegiatan penilaian karbon lainnya adalah pendekatan baru yang dapat meng partisipasi masyarakat jangka panjang yang lebih efektif dalam MRV REDD+. Di Republik Demokratik Kongo atau *Democratic Republic Congo* (DRC), pengelolaan oleh masyarakat bukan prioritas dalam strategi nasional REDD+. Namun, ada studi yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara penuh dan aktif dapat terbentuk jika sistem pemantauan berbasis masyarakat lokal bersarang di dalam sistem pemantauan hutan nasional²⁸. Demikian pula, di Kalimantan Barat dan Jawa Tengah, Indonesia, satu studi percontohan pemetaan partisipatif menemukan bahwa masyarakat mampu memberikan informasi pelengkap peta pengindraan jarak jauh dan juga mengidentifikasi pendorong penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan. MRV partisipatif dapat berfungsi sebagai forum diskusi dan dengan demikian memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang REDD+²⁹.

Bersambung ke halaman berikutnya

-
- 26 Pham, T.T., Ngo, H.C., Dao, T.L.C., Hoang, T.L., Micah, R.F., 2020. The politics of numbers and additionality governing the national Payment for Forest Environmental Services scheme in Vietnam: A case study from Son La province. *FS* 379–404. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891>
- 27 Hawthorne, S., Boissière, M., Felker, M.E., Atmadja, S., 2016. Assessing the Claims of Participatory Measurement, Reporting and Verification (PMRV) in Achieving REDD+ Outcomes: A Systematic Review. *PLoS ONE* 11, e0157826. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157826>
- 28 Schmitt, C.B. and Mukungu J., 2019. How to Achieve Effective Participation of Communities in the Monitoring of REDD+ Projects: A Case Study in the Democratic Republic of Congo (DRC). *Forests* 10, 794. <https://doi.org/10.3390/f10090794>
- 29 Beaudoin, G., Rafanoharana, S., Boissière, M., Wijaya, A., Wardhana, W., 2016. Completing the Picture: Importance of Considering Participatory Mapping for REDD+ Measurement, Reporting and Verification (MRV). *PLoS ONE* 11, e0166592. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166592>

Terlepas dari potensi manfaat MRV partisipatif atau *Participatory MRV* (PMRV), penelitian yang ada masih terbatas. Klaim bahwa PMRV mendorong dampak sosial REDD+ secara langsung, seperti peningkatan kesadaran lingkungan dan kesetaraan dalam pembagian manfaat, kurang didukung bukti empiris dibandingkan dengan hasil teknis REDD+. Studi di masa yang akan datang harus mencakup penilaian pengalaman PMRV masa sebelumnya, formalisasi PMRV, dan pengujian skala penuh di lapangan dengan mengintegrasikan studi PMRV masa depan ke dalam implementasi REDD+ lokal³⁰.

Pemantauan teritorial

Di banyak negara REDD+ ada kesenjangan keterampilan yang besar dalam pemantauan karbon hutan antara kebutuhan tingkat nasional dan keadaan saat ini.

Beberapa negara menghadapi tantangan dalam hal institusi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknis, seperti koneksi internet dan jangkauan penginderaan jauh yang buruk. Upaya internasional dapat meningkatkan cakupan data satelit dengan berinvestasi dalam fasilitas akuisisi data yang lebih baik. Bagi negara lain, persoalannya bukan soal teknologi, tetapi penegakan hukum.

Sistem pelacakan deforestasi Brasil sudah maju, tetapi perlu didukung oleh penegakan dan perlindungan [Studi Kasus]

Sistem pelacakan deforestasi Brasil –jika ditegakkan dengan benar– adalah sistem yang sangat maju dan pendorong utama pengurangan deforestasi Amazon selama satu dekade terakhir.

Lembaga setara dengan NASA di Brasil –the National Institute for Space Research (INPE)– telah menggunakan sistem pemantauan satelit sejak 2004 untuk mencatat deforestasi di Amazon Brasil secara *real-time*.

Data tahunan resolusi tinggi yang dikumpulkan program khusus pemantauan deforestasi di Kawasan Amazon (PRODES) dilengkapi dengan data resolusi yang lebih rendah dari program Deteksi deforestasi real time (DETER) yang bebas diunduh oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah/LSM. Polisi dan militer ikut di mobilisasi untuk melaksanakan operasi pengawasan di seluruh kawasan “busur deforestasi” (arc of deforestation).

Penegakan aturan terus menjadi masalah dan produsen kecil yang paling dirugikan oleh peningkatan pemantauan. Sementara, produsen besar tidak terpengaruh karena kemampuan mereka untuk embela diri secara prosedural terhadap denda selama proses administrasi. Kasus Brasil menyoroti pentingnya pengembangan sistem pelacakan data yang kuat dalam membangun upaya pemantauan, yang harus didukung oleh penegakan dan kerangka pengaman³¹.

30 Boissière, M., Herold, M., Atmadja, S., Sheil, D., 2017. The feasibility of local participation in Measuring, Reporting and Verification (PMRV) for REDD+. PLoS ONE 12, e0176897. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176897>

31 May, P.H., Gebara, M.F., de Barcellos, L.M., Millikan, B., 2016. The context of REDD+ in Brazil: drivers, agents, and institutions - 3rd edition. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006338>

Upaya Guyana untuk meningkatkan jumlah dan akurasi data deforestasi [Studi Kasus]

Selama beberapa tahun terakhir, Guyana telah berupaya untuk mengatasi kurangnya data deforestasi yang terpercaya. Sistem pemantauan hutan nasional Guyana, yang dikenal sebagai sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MVRS), secara historis berjuang dengan kurangnya data dalam mengukur cakupan hutan dan deforestasi. Lebih dari separuh hutan Guyana tidak dapat diakses melalui jalan raya dan sungai, yang membuat pengumpulan data lapangan menjadi sulit. Untuk mengatasi masalah ini, Guyana menerapkan proses penilaian akurasi independen untuk melengkapi sistem pelaporan nasional. Untuk mengurangi risiko penilaian laju deforestasi terlalu rendah, sistem dibangun atas prinsip konservatif, yang menilai rendah penurunan emisi. Komisi Kehutanan Guyana (GCF) juga telah meningkatkan ketelitian data deforestasi yang dapat diverifikasi melalui perbaikan metodologi. Akhirnya, verifikasi pihak ketiga yang independen juga telah memverifikasi indikator sementara untuk kinerja REDD+ di Guyana terkait dengan emisi yang dihasilkan dari; i) kegiatan pengelolaan hutan; dan ii) kegiatan pembalakan liar. Negara-negara yang berjuang dengan kurangnya data terpercaya dapat belajar dari Guyana bagaimana berbagai pendekatan yang mungkin, seperti menerapkan penilaian akurasi independen, mengadopsi prinsip konservatif dan perbaikan metodologi, dan terlibat dalam verifikasi pihak ketiga yang independen³².

Pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam mengidentifikasi dan menghentikan penggunaan lahan ilegal: Kisah orang Surui di Para, Brazil [Studi Kasus]

Proyek Karbon Hutan Surui adalah proyek konservasi pertama yang dipimpin oleh masyarakat asli yang dibiayai melalui penjualan *offset* karbon. Hal ini secara dramatis mengurangi deforestasi dalam wilayah selama lima tahun pertama beroperasi (2009 – 2014) dan mendanai enam inisiatif pengembangan masyarakat mandiri meskipun kurangnya permintaan yang didorong oleh kepatuhan untuk off-set pada pasar karbon, kurangnya penegakan hukum, dan kehadiran kegiatan kriminal yang berniat mengganggu proyek dengan menabur konflik. Proyek ini juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis pengembang proyek lokal dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat asli, sementara beberapa perusahaan swasta membeli *offset* karbon untuk mendukung proyek tersebut³³. Namun, proyek dihentikan pada 2018 setelah penemuan deposit emas di wilayah tersebut yang memicu lonjakan deforestasi. Beberapa anggota masyarakat Paiter bekerja sama dengan orang luar yang memasuki wilayah tersebut secara ilegal, mengembangkan penambangan aluvial ilegal. Deforestasi meningkat pada tahun 2016 dan 2017, karena seorang anggota Paiter yang berkolusi dengan para penambang menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk membeli ternak dan membuka hutan untuk lahan penggembalaan. Hilangnya hutan memaksa masyarakat Paiter menunda proyek karbon, sedangkan usaha pertambangan dan pertanian baru berkontribusi pada keresahan masyarakat karena perbedaan pendapatan³⁴. Proyek ini rusak akibat ulah kelompok kecil penebang, penambang, misionaris, dan kolusi, tetapi peningkatan kemampuan pengawasan wilayah dapat membantu mencegah penggunaan ilegal. Proyek ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang akurat dalam mengidentifikasi dan menghentikan penggunaan lahan ilegal sebelum lepas kendali.

32 Benn, V.P., T.T., P., Moeliono, M., Maharani, C., Thomas, T., Chesney, P., Dwisatrio, B., Ha, C.N., 2020. The context of REDD+ in Guyana: Drivers, agents and institutions. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007627>

33 Garcia, B., Rimmer, L., Canal Vieira, L., Mackey, B., 2021. REDD+ and forest protection on indigenous lands in the Amazon. RECIEL 30, 207–219. <https://doi.org/10.1111/reel.12389>

34 Zwick, S., 2019. The Story of the Surui Forest Carbon Project. Forest Trends. URL <https://www.forest-trends.org/blog/the-story-of-the-surui-forest-carbon-project/> (accessed 2.11.22).

Hambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat lokal untuk memahami mekanisme pembagian manfaat REDD+

Adanya hambatan penyampaian informasi kepada masyarakat lokal yang menghalangi mereka untuk memahami dengan jelas baik risiko maupun manfaat terkait dengan mekanisme pembagian manfaat seperti REDD+.

Hambatan dapat berupa bahasa teknis, tingkat literasi, dan bahasa itu sendiri. Di antara pemangku kepentingan, dapat terjadi asimetri antara akses informasi dan sumber daya yang dapat menciptakan tidak seimbangnya kemampuan dan distorsi partisipasi. Jika tidak diatasi, hambatan memahami mekanisme pembagian manfaat REDD+ ini dapat menyebabkan harapan yang tidak jelas tentang kapan biaya dan manfaat mungkin diperoleh. Pelopor proyek mungkin juga menahan informasi untuk menghindari timbulnya harapan atau kebingungan yang salah, tetapi pendekatan ini harus dihindari. Meskipun menghindari risiko meningkatkan harapan palsu tentang pendapatan karbon sah-sah saja, hal ini dapat membuat masyarakat frustrasi karena diberi informasi sedikit demi sedikit.

Meningkatkan penyebaran informasi, ketersediaan, dan transparansi tentang persyaratan dan distribusi pembayaran dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif tentang penggunaan sumber daya REDD+.

Panjangnya proses dalam menyiapkan infrastruktur pembayaran dan minimnya ketersediaan rincian informasi tentang alokasi dana di Indonesia menyebabkan kebingungan dan mengurangi semangat untuk REDD+ [Studi Kasus]

Pada 2019 dan 2020, pendanaan berbasis kinerja REDD+ untuk yurisdiksi sub-nasional disetujui untuk Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Meskipun semangat tinggi di awal, keterlambatan dalam menyiapkan infrastruktur nasional untuk menerima dan mengalokasikan pembayaran REDD+ mengurangi kegembiraan para peserta. Baru pada September 2019 terbentuk mekanisme keuangan yang diperlukan untuk menengahi transfer dana dari pendanaan iklim internasional ke penggunaan domestik –Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)–setelah tertunda bertahun-tahun³⁵.

Informasi penting tentang bagaimana mekanisme baru mengalokasikan dan menyalurkan dana kepada peserta belum diungkapkan, sehingga belum jelas pula yurisdiksi subnasional yang mana akan menerima bagian pembayaran internasional³⁶. Penundaan atau waktu yang buruk harus dihindari sebisa mungkin, seperti halnya menahan informasi karena dapat menyebabkan kebingungan seputar inisiatif REDD+ dan melemahkan insentif untuk partisipasi.

35 Arumingtyas, L., 2019. Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan. Monga Bay. URL <https://www.mongabay.co.id/2019/10/13/pemerintah-bentuk-badan-pengelola-dana-lingkungan/>

36 Seymour, F.J., Aurora, L., Arif, J., 2020. The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Front. For. Glob. Change* 3, 503326. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>

2.3.3 Masalah tata kelola berjenjang

Banyak yang berpendapat, pendekatan berjenjang dengan beragam pihak akan mendorong “diferensiasi dan spesialisasi” dalam desain dan implementasi kebijakan serta menciptakan kebijakan adaptif yang dapat memenuhi kebutuhan teritorial yang beragam.

Baik untuk REDD+ maupun banyak mekanisme pembagian keuntungan, interaksi kompleks antar pelaku diperlukan untuk mencapai tujuan program secara terintegrasi. Interaksi yang ada, terjadi baik secara vertikal (internasional ke lokal) maupun horizontal (misalnya lintas komunitas, rumah tangga, dll.).

Dalam mewujudkan koordinasi lintas sektor dan bertingkat dibutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika mendasar antar para pelaku untuk menemukan solusi yang tidak biasa dan mencapai tujuan efektivitas dan keadilan.

Mendukung arus informasi lintas tingkat dan sektor.

Jika kepentingan di antara para pihak sudah selaras, fokus akan terletak pada koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan arus informasi lintas tingkat dan sektor, yang dapat dibina oleh perantara informasi independen dan perantara yang netral dan akuntabel. Pemerintah, LSM, dan donatur harus memperbaiki organisasi dan distribusi tanggung jawab, sebagaimana pemerintah yang menetapkan mandat yang jelas untuk koordinasi lintas sektor. Pendonor REDD+ juga dapat bertindak untuk meningkatkan kolaborasi; Bank Dunia dan UN-REDD memiliki peraturan yang berbeda tentang persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) untuk REDD+, tetapi dana juga tumpang tindih untuk kegiatan yang sama. Penyelarasan akan meningkatkan efisiensi.

Negosiasi politik dan keadilan prosedural untuk menyelaraskan kepentingan dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan

Menyelaraskan kepentingan antar pihak membutuhkan negosiasi politik yang menerapkan keadilan prosedural untuk mengatasi ketidakseimbangannya kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan perwakilan masyarakat atau perempuan melalui keterampilan dan kapasitas, atau inklusi partisipasi pelaku lokal. Yang penting juga adalah memperjelas hak, melalui peta georeferensi fisik, dan penetapan safeguard serta mekanisme ganti rugi yang kuat untuk memfasilitasi negosiasi³⁷.

Pelajaran dari sektor lain: Kolaborasi untuk kebijakan pembangunan pedesaan Uni Eropa? [Studi Kasus]

Kebijakan Pembangunan Desa atau *The European Rural Development (RDP)* Eropa adalah sebuah program Uni Eropa yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi di 27 negara anggota Uni Eropa (EU).

Desentralisasi ditentukan tidak hanya melalui kelembagaan, melainkan berdasarkan pemberdayaan pihak dan lembaga lokal. Oleh karena itu, untuk memperbaiki tata kelola, pendekatan kebijakan pembangunan pedesaan perlu mempertimbangkan peran dan dinamika antar pelaku, lembaga, jaringan, modal sosial dan kemampuan administratif.

Bersambung ke halaman berikutnya

37 Larson AM, Sarmiento Barletti JP, Ravikumar A and Korhonen-Kurki K. 2018. Multi-level governance: Some coordination problems cannot be solved through coordination. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 81–91

LEADER adalah program yang didanai EU untuk mendukung kegiatan — seperti konsultasi, pelatihan, pendampingan, dukungan untuk mengembangkan rencana bisnis dan alokasi modal — untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. ketika dilaksanakan di Prancis, meskipun kehadiran pelaku pemerintah maupun non pemerintah, elit politik, seperti walikota dan anggota dewan, tetaplah pengambil keputusan utama, yang tidak mengizinkan perwakilan lebih luas. Desentralisasi digunakan sebagai alat kekuasaan, dan dimanfaatkan untuk menguasai keputusan lokal. LEADER juga semakin banyak digunakan sebagai alat untuk aksi lokal bersama – sebagai contoh di Finlandia, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan minat untuk pembangunan pedesaan lintas sektoral, inklusivitas, kerja sama dan kapasitas³⁸.

Meskipun pemerintah Vietnam berkomitmen untuk memperbaiki pengambilan keputusan, terbatasnya kapasitas para pemangku kepentingan menyebabkan berkurangnya partisipasi [Studi Kasus]

Vietnam sudah mengadopsi kerangka legal REDD+ untuk menyediakan ruang politik inklusif bagi para pelaku untuk terlibat dalam pengambilan keputusan REDD+. Namun, meskipun ada komitmen politik negara untuk pengambilan keputusan inklusif, momentum minat partisipasi para pemangku kepentingan memudar. Pada awalnya, ada motivasi yang tinggi untuk terlibat didorong oleh keinginan agar terlihat oleh donatur, belajar dan memperoleh pengetahuan, serta mencari peluang pendanaan.

Namun partisipasi dalam pertemuan menurun akibat keterbatasan kapasitas (pengetahuan, keterampilan, waktu dan uang) para pemangku kepentingan³⁹. Untuk memastikan pengambilan keputusan REDD+ yang inklusif di Vietnam dibutuhkan pemahaman konteks politik, mengatasi dinamika kekuasaan yang mendasari rezim pemerintahan, membangun koalisi untuk perubahan di antara para elit politik dan masyarakat sipil, serta membina keinginan politik berkelanjutan dan komitmen.

Meskipun pemerintah DRC berupaya membangun pengambilan keputusan inklusif, pengaturan kelembagaan baru tidak menjamin inklusi yang lebih besar [Studi Kasus]

Di Republik Demokrasi Kongo, terlepas dari kepentingan awal pelaku di REDD+, antusiasme menurun seiring berjalannya waktu karena kekhawatiran pemangku kepentingan jarang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan masyarakat sipil dan masyarakat asli masih lemah, sementara organisasi internasional mendominasi. Lebih jauh lagi, lembaga pemerintahan dapat dengan mudah memanipulasi partisipasi REDD+ di DRC untuk tujuan mereka sendiri (misalnya memperlambat pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam memenuhi persyaratan partisipasi yang ditetapkan oleh donor), sehingga gagal mengatasi masalah mendasar kekuasaan dan politik. Jika kekhawatiran para pemangku kepentingan tidak dimasukkan ke dalam kebijakan aktual dan hasil proyek, para pelaku akan kehilangan minat dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, walaupun pemerintah berusaha meningkatkan inklusivitas pengambilan keputusan, sekedar memperbaharui pengaturan kelembagaan tidak akan menjamin inklusi lebih besar dalam pembuatan kebijakan karena yang dibutuhkan adalah perubahan bentuk kekuasaan dan ruang politik⁴⁰.

38 Larson AM, Sarmiento Barletti JP, Ravikumar A and Korhonen-Kurki K. 2018. Multi-level governance: Some coordination problems cannot be solved through coordination. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 81–91

39 Pham, Thu Thuy, Ngo, H.C., Dao, T.L.C., Hoang, T.L., Moeliono, M., 2021b. Participation and influence of REDD+ actors in Vietnam, 2011–2019. *Global Environmental Change* 68, 102249. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249>

40 Pham, Thu Thuy, Le, T.T.T., Tuyet, H.N.K., Pham, V.T., Tran, P.H.N.K., Tran, T.D., Tran, N.M.H., Nguyen, T.T.A., Nguyen, T.V.A., 2021a. Impacts of Payment for Forest Ecosystem Services in Protecting Forests in Dak Lak Province, Vietnam. *Forests* 12, 1383. <https://doi.org/10.3390/f12101383>

Peran organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Siak, Indonesia [Studi Kasus]

Di Kabupaten Siak di Indonesia, wilayah luas gambut dalam yang dikembalikan oleh perusahaan ke pemerintah hampir didistribusikan ke petani kecil di bawah program reforma agraria, meskipun ada moratorium pembukaan baru lahan gambut. Resolusi pertentangan kebijakan ini dibantu oleh organisasi masyarakat sipil, yang memfasilitasi hubungan antara yurisdiksi dan badan pemerintahan nasional. Melalui koordinasi oleh jaringan masyarakat sipil lokal dan nasional dalam mendukung pemerintah kabupaten, 4.000 hektar area sekarang ada di bawah manajemen komunal⁴¹. Keterlibatan jaringan masyarakat sipil dalam proyek tidak boleh diabaikan, karena mereka dapat membantu mengkoordinasikan dan membantu masalah yang mungkin muncul di berbagai tingkat pemerintahan.

Integrasi horizontal

Di desa Nomedjoh di Kamerun, berbagi informasi dan transparansi bukan masalah dalam proyek REDD+ sebagian besar karena upaya tokoh lokal, yang membantu pengungkapan informasi tentang kegiatan proyek selama proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Masyarakat yang diwawancarai memuji pendeta karena telah membantu menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan hak penduduk setempat dan menjelaskan tujuan dari proyek. Studi kasus ini menyorot pentingnya peran yang bisa dimainkan oleh tokoh lokal dalam membantu menyebarkan informasi tentang proyek REDD+ pada komunitas yang lebih luas⁴².

Pendekatan yurisdiksi REDD+ di Indonesia [Studi Kasus]

Sebagai wahana bagi para pemimpin 38 negara bagian dan provinsi di seluruh dunia, Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan atau *the Governor's Climate and Forests Task Force* (GCFTF) yang melibatkan gubernur dan staff senior pada pertemuan tahunan, telah menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi beberapa inisiatif yurisdiksi di Indonesia. GCFTF dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) – sebuah asosiasi kabupaten di Indonesia yang mendukung pendekatan yurisdiksi – memainkan fungsi fasilitasi horizontal serupa: keduanya menawarkan wahana untuk membandingkan kemajuan anggota, sekaligus memberi bantuan teknis untuk anggota dalam bidang seperti perencanaan dan pemantauan lintas yurisdiksi. Sebagai contoh, LTKL menyediakan sebuah wahana yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang berkomitmen pada pembangunan hijau. Pertemuan yang difasilitasi oleh LTKL, membantu kepala daerah dan staf mereka untuk mengidentifikasi kepentingan dan tantangan bersama, serta menyediakan wahana untuk belajar dari pengalaman satu sama lain. Selain itu, sekretariat LTKL membantu kabupaten anggota dengan memobilisasi bantuan teknis dan menawarkan program-program seperti seri *Masterclass* dalam membangun kapasitas kabupaten untuk mengembangkan portofolio investasi, sementara *Festival Kabupaten Lestari* atau Festival Kabupaten Berkelanjutan memberi kesempatan pertukaran pelajaran kabupaten anggota⁴³.

41 Seymour FJ, Aurora L and Arif J. 2020. The jurisdictional approach in Indonesia: Incentives, actions, and facilitating connections. *Frontiers in Forests and Global Change* 3:124. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>

42 Tegegne YT, Palmer C, Wunder S, Moustapha NM, Fobissie K and Moro E. 2021. REDD+ and equity outcomes: Two cases from Cameroon. *Environmental Science & Policy* 124:324-35. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003>

43 Seymour, F.J., Aurora, L., Arif, J., 2020. The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Front. For. Glob. Change* 3, 503326. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>

Kemitraan pengelolaan antara federasi pribumi dan otoritas pemerintah di Peru [Studi Kasus]

Sebuah studi mengungkapkan bahwa lahirnya kemitraan manajemen bersama antara Program Konservasi Hutan Nasional atau *the Peruvian government's National Forest Conservation Programme* (PNCB) Peru – skema pembayaran bersyarat yang bertujuan mendorong manajemen hutan berkelanjutan – dan kelompok perwakilan masyarakat adat Federasi Adat Madre de Dios atau *Native Federation of Madre de Dios* (FENAMAD) bisa berdampak positif. Manajemen bersama pada skala daerah mendukung inklusi pertimbangan politik lokal dalam program mitigasi perubahan iklim yang dipimpin pemerintah yang didesain pada skala nasional. Selain itu, kemitraan ini mengatasi kesenjangan kelembagaan vertikal dengan memperkuat kehadiran PNCB di daerah dan memperkuat kehadiran skema pembayaran bersyarat, karena FENAMAD adalah lembaga daerah permanen. Akhirnya, kemitraan ini membantu memperkuat pemantauan dan implementasi skema pembayaran konservasi⁴⁴.

2.3.4 Derajat desentralisasi (fiskal dan lainnya): Desentralisasi fiskal

Hak pemerintah atas pendapatan dan transfer anggaran dari pemerintah pusat

Transfer fiskal antar pemerintah adalah praktik umum untuk mendistribusikan pendapatan publik dari tingkat nasional ke daerah.

Mendistribusikan bagian dari pendapatan pemerintah nasional ke pemerintah subnasional (bagi hasil vertikal) dapat membantu memperbaiki variasi penyediaan layanan publik wilayah geografis yang berbeda di suatu negara, (misalnya, dampak dari bendungan hulu ke masyarakat hilir) (bagi hasil horizontal).

Bagaimana penerimaan dari hutan didistribusikan di Kamerun? [Studi Kasus]

Di Kamerun, hutan dinilai berdasarkan luas dan iuran hasil hutan dibayar kepada pemerintah pusat. Iuran tahunan hutan yang ditetapkan pada 1998 adalah 1.500 CFA Franc/ha (2,40 USD/ha) untuk konsesi hutan dan 2.500 CFA Franc/ha (4,05 USD) untuk eksploitasi, meskipun ada upaya desentralisasi tingkat penjualan dari volume masih lebih rendah.

Bagi hasil dari hutan untuk pembangunan lokal adalah salah satu bidang prioritas kebijakan Kamerun. Pada 2012, pemerintah Kamerun mendesentralisasi iuran hasil hutan dan margasatwa pada dewan kota dan komunitas lokal.

Akan tetapi, Undang-Undang Keuangan tahun 2015 menyatakan 50% dari iuran hasil hutan tahunan menjadi bagian negara dan 50% untuk dewan. Hal ini membatalkan alokasi 10% untuk komunitas lokal, dan mengurangi sebagian otonomi keuangan dan politik masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat sebagai resentralisasi tentatif dalam arah menuju ketergantungan tinggi pada pemerintah nasional⁴⁵.

44 Dupuits, E., Cronkleton, P., 2020. Indigenous tenure security and local participation in climate mitigation programs: Exploring the institutional gaps of REDD+ implementation in the Peruvian Amazon. *Env Pol Gov* 30, 209–220. <https://doi.org/10.1002/eet.1888>

45 Assembe-Mvondo S, Wong G, Loft L and Tjajadi JS. 2015. Comparative assessment of forest revenue redistribution mechanisms in Cameroon: Lessons for REDD+ benefit sharing. Working Paper 190. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005738>

Pembelajaran dari sektor lain: Kebijakan Pembangunan Pedesaan Eropa [Studi Kasus]

Kebijakan Pembangunan Pedesaan atau *the European Rural Development* (RDP) Eropa adalah sebuah program EU yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi di 27 negara anggota Uni Eropa (EU).

Desentralisasi diidentifikasi sebagai cara efektif mencapai tujuan lingkungan, karena pengambilan keputusan bergeser ke tingkat lokal. Ini berarti bahwa kebijakan dapat diinformasikan dengan lebih kontekstual. Banyak negara Uni Eropa meregionalisasi pendekatan kebijakan pembangunan pedesaan nasional mereka. RDP Skotlandia dikembangkan dan diimplementasikan secara nasional, namun pada 2007-2013, kelompok pengambilan keputusan regional dipilih untuk mengembangkan prioritas pedesaan dan menyusun kebijakan. Namun, pada praktiknya, kekuasaan gagal ditransfer dari pemerintah pusat ke kelompok regional, karena kurangnya kapasitas⁴⁶.

Desentralisasi di Vietnam: apakah pemerintah daerah berkuasa mendistribusikan pembayaran REDD+? [Studi Kasus]

Di Vietnam, Undang Undang Anggaran Negara tahun 2004 memandatkan desentralisasi fiskal secara formal, memberikan pemerintah lokal, termasuk di tingkat provinsi, kekuasaan lebih besar untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya di provinsi mereka⁴⁷. Mengingat kecenderungan menuju desentralisasi, mungkin saja di masa depan bisa diterapkan mekanisme pembagian Pembayaran untuk Jasa Lingkungan Hutan (PFES) untuk distribusi pembayaran REDD+. Dalam mekanisme ini, dana FPES pusat—yang mencakup dana REDD+—dikelola oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa akan mendistribusikan dana penggunaan lahan seperti REDD+ kepada pemerintah provinsi, mengizinkan setiap provinsi mendistribusikan dana kepada penyedia layanan lingkungannya sendiri⁴⁸.

Myanmar merupakan negara sangat terpusat karena kurangnya kapasitas di tingkat daerah [Studi Kasus]

Di Myanmar, proses desentralisasi mendorong beberapa devolusi tanggung jawab administratif, namun pemerintah di tingkat daerah masih sangat bergantung pada pemerintah nasional karena kapasitas tidak merata. Pemerintah negara dan daerah memiliki basis pendapatan terbatas dan mengandalkan transfer dari tingkat pusat. Myanmar terus menjadi negara terpusat karena anggaran yang kecil dan pengawasan anggaran pusat, serta pembatasan otonomi politik⁴⁹.

46 Yang AL, Wong G and Loft L. 2015. What can REDD+ benefit sharing mechanisms learn from the European Rural Development Policy?. Info Brief 126. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005745>

47 Morgan PJ and Trinh LQ. 2016. Fiscal Decentralization and Local Budget Deficits in Viet Nam: An Empirical Analysis. ADBI Working Paper 613. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Accessed 11 July 2022. <https://www.adb.org/publications/fiscal-decentralization-local-budgetdeficits-viet-nam>

48 Pham TT, Ngo HC, Dao TL, Hoang TL and Moeliono M. 2021. Participation and influence of REDD+ actors in Vietnam, 2011–2019. *Global Environmental Change* 68:102249. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249>

49 Oo, T.N., Hlaing, E.E.S., Aye, Y.Y., Chan, N., Maung, M., Phyoe, S., .S., Pham, T.T., Maharani, C., Moeliono, M., Adi, G., Dwisatrio, B., Kyi, M.K.M., San, S.M., 2020. The context of REDD+ in Myanmar: Drivers, agents and institutions. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007556>

Di DRC, dukungan kontinu pemerintah pusat pada provinsi diperlukan terlepas dari undang-undang desentralisasi [Studi Kasus]

Di bawah konstitusi dan undang-undang DRC, unit pemerintahan terdesentralisasi memiliki sistem keuangan terpisah untuk memastikan desentralisasi otonomi keuangan satuan teritorial. Biaya yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah pusat dialihkan ke provinsi, antara lain tanggung jawab untuk memastikan pendapatan dari sumber daya alam dapat secara efektif berkontribusi pada pembangunan provinsi. Akibat perubahan ini, provinsi yang paling diberkahi secara finansial adalah provinsi lama, sementara provinsi yang baru terbentuk sering kekurangan infrastruktur dan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembangunan mereka. Proyek yurisdiksi REDD+ Maï-Ndomebe juga menyorot mengapa dukungan untuk provinsi diperlukan: provinsi perlu untuk mempertahankan kepemilikan penuh atas program penurunan emisi hutan agar REDD+ efektif karena mereka akan menerima sebagian pembayaran yang dihasilkan dari penurunan emisi yang dilakukan di provinsi.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan yang timbul dari perkembangan provinsi dan satuan teritorial yang terdesentralisasi, Konstitusi DRC menetapkan 40% dari pendapatan nasional dipungut di awal sebagai bagian dana pemerataan nasional untuk didistribusikan kembali. Dana pemerataan nasional ini dapat membantu memperbaiki kapasitas pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan mandiri dari berbagai sumber, termasuk eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, fungsi dana ini tidak jelas, dan sulit menentukan kontribusi nyata yang dapat diberikan untuk perkembangan provinsi baru⁵⁰.

Pembayaran berbasis kinerja untuk pemerintah daerah

Menyediakan pembayaran berbasis kinerja untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan memerlukan tambahan alokasi kawasan hutan untuk bersaing dengan penggunaan lahan lainnya.

Pembayaran ini bisa disalurkan ke pemerintah lokal yang memiliki mandat yang sesuai untuk mengelola hutan dan penggunaan lahan.

Penghargaan untuk pemerintah lokal Brasil karena mempromosikan konservasi [Studi Kasus]

Berawal pada 1991, negara bagian Paraná Brasil mengumpulkan pajak dari penjualan barang, transportasi, dan layanan komunikasi, yang lalu digunakan untuk melindungi kawasan keanekaragaman hayati. Dinamai Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – Ecológico atau ICMS-E, pajak pertambahan nilai “ekologi” ini mencapai lebih dari 90% dari pendapatan fiskal pemerintah negara bagian di Brasil.

Bagian dari hasil pajak dialokasikan kembali ke pemerintah kota sebagai kompensasi untuk pendapatan yang hilang dari kawasan lindung. ICMS-E dimaksudkan sebagai mekanisme kompensasi dan insentif, mendorong manajemen yang lebih baik untuk kawasan lindung yang ada, selain juga penetapan kawasan konservasi baru.

Bersambung ke halaman berikutnya

50 Kengoum, F., Pham, T.T., Moeliono, M., Dwisatrio, B., Sonwa, D.J., 2020. The context of REDD+ in the Democratic Republic of Congo: Drivers, agents and institutions, 2nd edition. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007793>

Beberapa studi telah menunjukkan hubungan langsung antara pajak ekologi dan peningkatan kawasan lindung: total kawasan lindung di negara bagian Paraná meningkat 164% sejak 1991. Namun, indikator kualitas untuk memantau keefektifitasan lingkungan masih kurang.

Pajak ekologi Brasil memanfaatkan administrasi negara bagian yang ada dan dapat menciptakan dukungan politik melalui pendekatan bawah-ke-atas dalam konservasi hutan. Namun hal ini membutuhkan transparansi dalam distribusi pendapatan⁵¹.

Transfer fiskal lingkungan di China berkontribusi meningkatkan kualitas lingkungan [Studi Kasus]

Di China, sistem transfer fiskal antar pemerintah terdiri dari tiga tipe Transfer Fiskal Lingkungan atau *ecological fiscal transfers* (EFTs). Tipe terpenting adalah pembayaran transfer fiskal umum untuk Area Fungsi Ekologis Kunci Nasional atau *National Key Ecological Function Areas* (NKEFAs). Pola ini diresmikan secara nasional pada 2010 untuk memberikan kompensasi kepada pemerintah tingkat desa atas pengeluaran dan mendorong konservasi alam di daerah dengan keanekaragaman hayati yang rentan. Pemerintah pusat mentransfer sekitar USD 11,4 miliar melalui skema NKEFA pada 2020. EFT mendistribusikan sekitar 0,95% dari total transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal ke kabupaten-kabupaten yang memiliki NKEFA berdasarkan rumus alokasi yang terdiri dari banyak elemen terkait kualitas ekosistem (misalnya kekayaan biologis, tutupan vegetasi, kepadatan jaringan air, tekanan tanah, beban polusi, dan pembatasan lingkungan). Skema transfer juga mencakup pembayaran bonus bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik, dan denda bagi pemerintah daerah yang berkinerja buruk, sebagian didasarkan pada indeks ekologi. Beberapa studi telah menemukan pembayaran NKEFA China memiliki efek positif pada beberapa aspek kualitas lingkungan. Sebagai contoh, studi kuasi-eksperimental menemukan bahwa pembayaran transfer mengurangi aktivitas padat polusi di daerah aliran Sungai Yangtze dan meningkatkan kualitas lingkungan di Provinsi Guangdong, sementara regresi panel di seluruh provinsi China menemukan bahwa pembayaran transfer mengurangi polusi dan pembayaran meningkatkan kualitas dan kuantitas air. Ini menunjukkan bahwa EFTs telah meningkatkan beberapa aspek kualitas lingkungan di China⁵².

India memberikan kompensasi pada negara bagian yang melindungi hutan atas kehilangan pendapatan pajak [Studi Kasus]

Komisi Keuangan India bertanggung jawab untuk memutuskan jumlah pendapatan pajak yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah negara bagian setiap lima tahun, dan menentukan bagaimana pendapatan ini didistribusikan antara negara bagian. Program transfer fiskal ekologis India dimulai pada 2015 ketika Komisi Keuangan ke-14 memasukkan kawasan hutan dengan kepadatan tinggi sebagai 7,5% dalam rumus distribusi. Ini dilakukan untuk memberi kompensasi negara bagian atas "ketidakmampuan fiskal" dari pendapatan pajak yang hilang karena mempertahankan atau melindungi tutupan hutan, dan untuk mengakui manfaat ekologis hutan. Pada lima tahun pertama EFT, lebih dari USD 37 miliar di transfer ke negara bagian berdasarkan tutupan hutan. Pengenalan transfer fiskal ekologis yang berlangsung bersamaan dengan peningkatan substansial dalam transfer ke negara bagian mengakibatkan jumlah uang yang didistribusikan

Bersambung ke halaman berikutnya

51 Loft L, Gebara MF and Wong GY. 2016. The experience of ecological fiscal transfers: Lessons for REDD+ benefit sharing. Occasional Paper 154. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006168>

52 Busch, J., Ring, I., Akullo, M., Amarjargal, O., Borie, M., Cassola, R.S., Cruz-Trinidad, A., Droste, N., Haryanto, J.T., Kasymov, U., Kotenko, N.V., Lhkgvadorj, A., De Paulo, F.L.L., May, P.H., Mukherjee, A., Mumbunan, S., Santos, R., Tacconi, L., Verde Selva, G., Verma, M., Wang, X., Yu, L., Zhou, K., 2021. A global review of ecological fiscal transfers. *Nat Sustain* 4, 756–765. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0>

dari pemerintah nasional ke pemerintah negara bagian meningkat dari 32% menjadi 42% dari pendapatan pajak, sehingga meningkatkan keyakinan pemerintah negara bagian bahwa peningkatan tutupan hutan dapat dihargai dengan peningkatan pendanaan⁵³. Ini hanya salah satu contoh bagaimana pemerintah nasional dapat memberi kompensasi pada pemerintah subnasional atas hilangnya pendapatan karena melindungi kawasan hutan yang seharusnya mereka terima dari membangun.

Pajak tanah Kamerun [Studi Kasus]

Undang-undang pajak tanah di Kamerun telah ada sejak pertengahan 1970-an. Sampai saat ini, belum ada evaluasi pelaksanaannya. Peneliti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau *Center for International Forestry Research* (CIFOR) telah mempelajari lima anak perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor kelapa sawit, karet, pisang dan tebu di Kamerun. Hanya perusahaan kelapa sawit dan tebu yang beroperasi di lahan “nasional” yaitu tanah yang belum dimiliki, dan dengan demikian mereka diharuskan membayar pajak tanah kepada dewan dan masyarakat.

Kebanyakan dewan menggunakan sewa tanah untuk memenuhi kebutuhan seperti membayar gaji, alih alih menginvestasikannya dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, dewan yang berinvestasi dalam proyek komunitas pun tidak berhasil mengurangi kemiskinan pada tingkat rumah tangga.

“Pendapatan dari biaya lahan tidak digunakan secara berbeda dari royalti hutan,” kata Samuel Assembe Mvondo, penulis utama studi ini. “tidak diinvestasikan secara berarti untuk kesehatan, listrik, air atau pendidikan.”

Untuk meningkatkan pembagian sewa pada lahan nasional, studi ini merokemendasikan:

- Melakukan inventarisasi sistematis lahan nasional yang diduduki atau dihibahkan/disediakan
- Memastikan seluruh operator membayar sewa lahan sesuai aturan
- Meluncurkan penawaran kompetitif untuk lahan nasional yang terbuka untuk investasi
- Memastikan seluruh informasi terkait pekerjaan/penggunaan lahan nasional diterbitkan.

Diadaptasi dari Results of Cameroon land-fee study hold lessons for REDD+⁵⁴

Bagaimana royalti/perpajakan di ditetapkan untuk hasil hutan kayu dan sektor lain

Pajak tanah menjadi sumber pendanaan pemerintah selama hampir seribu tahun

Pembahasan mengenai pajak tanah yang terkenal adalah oleh ahli ekonomi-politik AS, Henry George, yang berpendapat bahwa “karena nilai satu lokasi ditentukan oleh komunitas dan pemerintah, sewa ekonomi tanah adalah sumber pendanaan pemerintah yang paling logis.”

Harga yang dibayarkan untuk sebuah pohon berdiri disebut “tunggul” atau “royalti.” Royalti-hasil hutan didasarkan atas nilai produk di pintu pabrik, biaya panen, dan transportasi.

53 Busch, J., Ring, I., Akullo, M., Amarjargal, O., Borie, M., Cassola, R.S., Cruz-Trinidad, A., Droste, N., Haryanto, J.T., Kasymov, U., Kotenko, N.V., Lhkagvadorj, A., De Paulo, F.L.L., May, P.H., Mukherjee, A., Mumbunan, S., Santos, R., Tacconi, L., Verde Selva, G., Verma, M., Wang, X., Yu, L., Zhou, K., 2021. A global review of ecological fiscal transfers. *Nat Sustain* 4, 756–765. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0>

54 Assembe-Mvondo S, Brockhaus M and Lescuyer G. 2013. Assessment of the effectiveness, efficiency and equity of benefit-sharing schemes under large-scale agriculture: Lessons from land fees in Cameroon. *The European Journal of Development Research* 25(4):641-56. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.27>

Pembayaran REDD+, yang berasal dari sewa tanah maupun royalti, bisa jadi tak berarti jika mekanismenya tidak disiapkan dengan efektif, efisien, dan adil. Studi kasus berikut mendemonstrasikan isu ini.

Secara global, pajak dan iuran ditetapkan terlalu rendah untuk menutupi biaya eksternalitas lingkungan proses produksi [Studi Kasus]

Secara global, diperkirakan hanya antara 3% sampai 30% dari potensi nilai ekonomi dari kayu yang dikumpulkan oleh pemerintah⁵⁵. Sebagai contoh, Indonesia mengumpulkan sekitar USD 272 miliar setiap tahun dari iuran sektor kehutanan, 70% di antaranya datang dari jadwal pembayaran yang tidak mempertimbangkan harga pasar dan tidak berubah sejak 1999⁵⁶. Demikian juga pada 2016, pemerintah Indonesia hanya mengumpulkan 52% dari potensi pendapatan royalti kayu⁵⁷. Masalahnya makin parah karena lemahnya tata Kelola menghambat pengumpulan pendapatan, dan pendapatan yang hilang tidak dapat diinvestasikan kembali dalam penegakan hukum dan mempertahankan staf yang baik⁵⁸. Biaya eksternalitas lingkungan yang negatif harus ditetapkan lebih tinggi agar secara efektif menghalangi perilaku merusak lingkungan.

2.3.5 Penegakkan hukum

Penegakan hukum harus kuat agar perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan illegal menjadi efektif. Penegakan hukum yang lemah sering berasal dari kurangnya kapasitas para penegak hukum, koordinasi yang buruk antar para pemangku kepentingan, masalah kepemilikan tanah dan kekeliruan atau perebutan klaim, dan ketidakampunan pemerintah menjalankan kebijakan dan menegakkan aturan/hukum secara jelas dan transparan. Korupsi juga bisa menjadi masalah, dengan kolusi di antara kelompok besar yang menjadi pendorong deforestasi dan mereka yang berkuasa menjadi kekuatan yang menentang perubahan. Menghadapi tantangan ini memerlukan peningkatan investasi untuk peningkatan kapasitas, meningkatkan transparansi data dan meningkatkan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dan kebijakan.

Di Vietnam, aktivitas antikorupsi menjadi langkah penegakan hukum [Studi Kasus]

Sebuah studi di Vietnam menemukan aspek pendekatan partisipatif yang diperkenalkan oleh organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah dan nonpemerintah domestik dapat mengurangi risiko korupsi tertentu. Jenis kegiatan antikorupsi, termasuk kerangka pengaman sosial (*social safeguards*), mekanisme pengaduan dan pengelolaan dana, mengungkap upaya untuk memperkuat intervensi agen utama dan mempromosikan partisipasi sebagai norma di dalam proses pembuatan kebijakan, serta mendukung usaha penegakan hukum. Namun lobi antara sektor swasta dan para politikus pada tingkat provinsi, serta terbatasnya keterlibatan warga

Bersambung ke halaman berikutnya

55 Heine, D., Batmanian, G., Hayde, E., n.d. 2021. Designing fiscal instruments for sustainable forests.

56 Corruption Eradication Commission (KPK). 2015. Preventing state losses in Indonesia's forestry sector. Indonesia: KPK. Accessed 11 July 2022 <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Preventing-State-Losses-in-Indonesia-Forestry-Sector-KPK.pdf>

57 Mumbunan, S., Wahyudi, R., 2016. Revenue loss from legal timber in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 71, 115–123

58 Verhoeven, M., Magrath, W., Robbins, A., Kallaur, E., 2019. Mobilizing and Managing Public Forestry Revenue. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/33086>

dalam proses pemangku kepentingan menunjukkan persaingan norma sosial pro-korupsi dan kedangkalan proses konsultasi REDD+. Sementara kegiatan antikorupsi dapat memiliki efek positif dan harus terus dikejar, pelaksana proyek harus waspada dalam menjaga terhadap korupsi untuk memastikan hukum ditegakkan dengan benar⁵⁹.

Lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan sebagian disebabkan kurangnya kemauan politik [Studi Kasus]

Di DRC, deforestasi didorong antara lain oleh ketidakkonsistenan undang-undang Kehutanan dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan pengelolaan hutan tidak efektif. Wawancara dengan pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa upah rendah dan sumber daya yang tidak memadai untuk pemantauan berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Penjelasan ini terpaut dengan keengganan dari pemerintah pusat maupun pejabat daerah untuk menegakkan hukum dan memantau aktivitas penebangan. Ini jelas ditunjukkan dari alokasi izin penebangan skala kecil dan mekanisme penegakkan hukum pada tingkat daerah. Proses-proses ini didorong oleh kepentingan pribadi dan perilaku mencari rente dari otoritas administratif sementara kekhawatiran ekologi tentang hutan dirusak⁶⁰.

Perkembangan kelembagaan tingkat desa, “pagar sosial” dan masa depan bersama melalui pembayaran REDD+ memengaruhi tingkat kepatuhan di desa di Tanzania [Studi Kasus]

Secara umum, ketika REDD+ diimplementasikan pada tingkat kelompok, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan agar individu penduduk desa mematuhi pembatasan yang disyaratkan. Penegakan eksplisit, yang bisa diukur, bergantung terutama pada patroli dan hukuman untuk yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di dalam hutan REDD+. Namun, dalam beberapa proyek percontohan REDD+ yang berhasil di Tanzania, penduduk desa tidak mengalokasikan dana apapun untuk perlindungan demikian. Satu penjelasan kurangnya dana penegakan adalah bahwa di desa-desa ini telah ada banyak upaya membangun kelembagaan. Pengalaman tersebut mungkin mencerminkan asumsi bahwa “pagar sosial” – rasa tanggung jawab kolektif untuk melindungi sumber dayamilik bersama – memadai untuk melindungi hutan REDD+. Pagar sosial mungkin memastikan kepatuhan dengan mempengaruhi “orang dalam” untuk mengikuti regulasi desa. Akan tetapi, orang luar yang bukan bagian dari desa dan tidak memperoleh bagian pembayaran REDD+ tidak terpengaruh oleh tekanan seperti itu. Mereka tidak memiliki saham di hutan REDD+, dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh pembayaran REDD+ atau perasaan tentang masa depan bersama⁶¹. Bahkan tanpa mekanisme formal untuk penegakkan hukum rasa tanggung jawab kolektif yang kuat atas barang publik mungkin cukup untuk menimbulkan kepatuhan.

59 Williams, D.A., and Dupuy, K.E., 2019. Will REDD+ Safeguards Mitigate Corruption? Qualitative Evidence from Southeast Asia. *The Journal of Development Studies* 55, 2129–2144. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1510118>

60 Samndong, R.A., Bush, G., Vatn, A., Chapman, M., 2018. Institutional analysis of causes of deforestation in REDD+ pilot sites in the Equateur province: Implication for REDD+ in the Democratic Republic of Congo. *Land Use Policy* 76, 664–674. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.048>

61 Robinson, E., Albers, H., Lokina, R., Meshack, C., 2016. Allocating Group-Level Payments for Ecosystem Services: Experiences from a REDD+ Pilot in Tanzania. *Resources* 5, 43. <https://doi.org/10.3390/resources5040043>

Lemahnya penegakan hukum di Provinsi Dak Lak Vietnam akibat rendahnya pembayaran dan buruknya perlengkapan para penegak hukum [Studi Kasus]

Di Provinsi Dak Lak, Vietnam deforestasi ilegal berlangsung terus, sebagiannya akibat penegakan hukum yang lemah di kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan perusahaan milik negara. Penyedia layanan dibayar untuk mengadakan patroli dan mengambil tindakan lain untuk melindungi hutan, namun patroli yang dipimpin masyarakat itu mengalami kendala. Pembayaran yang diterima dianggap terlalu rendah untuk waktu dan usaha melintasi medan yang berat. Tim patroli komunitas tidak dapat menerapkan denda, dan kekurangan sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, khususnya karena para penduduk desa kekurangan seragam, alat pelindung diri dan fasilitas lain yang layak. Sebaliknya, para pelanggar semakin agresif dan lebih siap. Sifat hutan yang terfragmentasi dan terpencil juga membuat perlindungannya lebih sulit. Hutan alam di Dak Lak terus ditebang dan dirambah secara ilegal, sementara pemilik hutan tidak mampu mencegah situasi ini, dan sering mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Tantangan dalam mengatasi pelanggaran adalah buruknya fasilitas dan sumber daya bagi mereka yang bertanggung jawab atas penegakan hukum kehutanan, dan pemantauan serta kerangka sistem evaluasi yang tidak jelas⁶².

Di Brasil, penegakan hukum yang lemah disebabkan kekurangan personel [Studi Kasus]

Di Brasil, penegakan hukum lemah baik di tingkat federal dan negara bagian, serta lembaga lingkungan di seluruh tingkat kekurangan tenaga. Data menunjukkan bahwa pemerintah di beberapa negara bagian di Amazon Brasil memainkan peran kunci dalam menciptakan kawasan lindung atau *protected areas* (PAs) sejak 2003, yang membantu menurunkan laju deforestasi. Meskipun Brasil membuat kemajuan yang luar biasa dalam menciptakan PAs dalam delapan tahun berikutnya, dengan partisipasi yang besar oleh pemerintah negara bagian, perlindungan hutan di masa depan tidak bisa dianggap sepele. Pelanggaran batas di PAs dan kawasan pribumi sering terjadi, laju deforestasi masih tinggi dan rentan terhadap kekuatan pasar. Brasil dan negara bagian Amazon tidak seharusnya menunggu uang REDD+ untuk memecahkan masalah-masalah ini. Sebaliknya, mereka seharusnya segera meningkatkan investasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan agar siap mengelola uang REDD+ ketika (atau jika) itu tersedia. Demikian pula, pemerintah federal harus mempertimbangan REDD+ sebagai salah satu bagian dari keseluruhan strategi untuk mengurangi emisi karbon⁶³.

Mengatasi masalah tenurial di Indonesia dengan data lahan yang lebih transparan melalui geoportal kebijakan Satu Peta [Studi Kasus]

Diluncurkan pada 2018, geoportal Kebijakan Satu Peta adalah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peta terintegrasi dengan menyelaraskan data di 19 kementerian dan badan pemerintah. Pemerintah menemukan bahwa 40 persen lahan disengketakan⁶⁴. Sejak itu, kebijakan ini membantu mengatasi beberapa masalah tenurial melalui peningkatan transparansi dan data terbuka.

Bersambung ke halaman berikutnya

62 Pham, Thu Thuy, Le, T.T.T., Tuyet, H.N.K., Pham, V.T., Tran, P.H.N.K., Tran, T.D., Tran, N.M.H., Nguyen, T.T.A., Nguyen, T.V.A., 2021a. Impacts of Payment for Forest Ecosystem Services in Protecting Forests in Dak Lak Province, Vietnam. *Forests* 12, 1383. <https://doi.org/10.3390/f12101383>

63 Toni, F., 2011. Decentralization and REDD+ in Brazil. *Forests* 2, 66–85. <https://doi.org/10.3390/f2010066>

64 Aqil, A.M.I. 2020. Concerns of transparency, inclusivity raised as One Map nears completion. *The Jakarta Post*

Inisiatif ini merupakan langkah untuk mengatasi sengketa dan tumpang tindih klaim lahan akibat dari ketidakkonsistenan demarkasi lahan dari lembaga negara berbeda, serta mengidentifikasi skala kepemilikan yang tumpang tindih⁶⁵.

Masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas. Masyarakat sipil dan masyarakat adat serta lokal (IPLCs) menyatakan kekhawatiran mengenai masuknya tanah adat tradisional, yang secara historis dikecualikan dari dokumen perencanaan geospasial pemerintah; yang merupakan data utama peta terintegrasi ini. Selain itu, geoportal Kebijakan Satu Peta ini hanya dapat diakses sepenuhnya oleh menteri dan departemen utama pemerintah. Penguatan Kebijakan Satu Peta dengan menggabungkan peta partisipatif yang mencakup tanah dan hutan adat serta menyediakan akses publik pada peta dapat membantu mengurangi ancaman perampasan dan konversi lahan⁶⁶.

2.3.6 Instrumen pendukung kebijakan

Sejumlah kebijakan dapat mendukung suksesnya proyek REDD+, yaitu kebijakan strategis penggunaan lahan yang selaras, komitmen dari sektor swasta, dan promosi pertanian berkelanjutan dan reforestasi.

Penyelarasan strategis kebijakan penggunaan lahan: REDD+ termasuk dalam Komitmen Kontribusi Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDCs) dan kebijakan perubahan iklim di banyak negara, namun penyebab deforestasi dan degradasi hutan tidak sepenuhnya diakui. Kebijakan penggunaan lahan yang jelas yang melawan penyebab deforestasi dan degradasi hutan, bersama dengan kerangka pemantauan dan evaluasi yang transparan, dibutuhkan untuk memastikan efektivitas NDCs dalam mencapai hasil yang diinginkan. Perbaikan juga bisa dibuat atas kebijakan yang sudah ada terkait perencanaan penggunaan lahan, kepemilikan, layanan perpanjangan, dan skema pembiayaan⁶⁷.

Komitmen sektor swasta: Pertanian komersial adalah penyebab besar terjadinya penggundulan hutan. Para pelaku sektor swasta dapat membuat komitmen untuk memproduksi dan mencari komoditas untuk mengurangi risiko terhadap hutan, namun penerapan janji yang diusung sektor swasta mengenai deforestasi nol (*zero deforestation*) sebaiknya dipercepat dan transparan untuk menunjukkan hasil dan kemajuan nyata. Alternatifnya, Perusahaan juga dapat mengadopsi sertifikasi standar manajemen dan produksi, melaksanakan audit dan verifikasi, dan berpartisipasi dalam menjamin rantai pasokan. Pemasok dapat meningkatkan ketertelusuran serta upaya pemantauan dan verifikasi mereka⁶⁸.

Intensifikasi produksi pertanian berkelanjutan: Intensifikasi berkelanjutan melibatkan peningkatan hasil pertanian tanpa memperluas konversi lahan nonpertanian untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari peternakan; meningkatkan adaptasi dan resiliensi perubahan iklim; serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari pertanian. Hasil yang lebih baik mungkin memberikan insentif untuk memperluas lahan pertanian menjadi hutan, jadi kebijakan perlu meliputi tindakan khusus penghematan lahan. Petani harus memiliki kapasitas, tenaga

65 Umali, T., 2020. Completion of One Map Policy targeted for end of 2020. OpenGov Asia. URL <https://opengovasia.com/completion-of-one-map-policy-targeted-for-end-of-2020/> (accessed 2.11.22).

66 NYDF Assessment Partners. 2021. Taking stock of national climate action for forests. Amsterdam: Climate Focus. Accessed 11 Jun 2023. <https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/>

67 Pham, T.T., Moeliono, M., Angelsen, A., Brockhaus, M., Gallo, P., Hoang, T.L., Dao, T.L.C., Ochoa, C., Bocanegra, K., 2018. Integrating REDD+ in NDCs and national climate policies. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7066>

68 Pacheco P, Bakhtary H, Camargo M, Donofrio S, Drigo I and Mithöfer D. 2018. The private sector: Can zero deforestation commitments save tropical forests? In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. Transforming REDD+: Lessons and new directions. Bogor, Indonesia: CIFOR. 161–173

kerja, dan input intensifikasi pertanian, dengan tidak menggunakan sumber daya tersebut untuk memperluas lahan pertanian dan tidak melanggar kebijakan tata kelola dan konservasi hutan⁶⁹.

Restorasi hutan: Inisiatif untuk memulihkan hutan dan lanskap yang terdegrasi semakin populer, khususnya di wilayah Amerika Latin, dimana proyek restorasi hutan ditujukan untuk meningkatkan tutupan vegetasi dan membangun kembali proses ekologi dan keanekaragaman hayati. Untuk proyek-proyek yang langsung mengatasi penyebab degradasi, struktur insentif perlu untuk mempromosikan pengelolaan tanah berkelanjutan dan restorasi lahan terdegradasi dan termasuk kegiatan pemantauan untuk melacak dampak karbon hutan⁷⁰.

Perusahaan yang berkomitmen akan rantai pasok kakao bebas deforestasi bekerja sama dengan Pantai Gading dan Ghana untuk peran kakao dalam strategi NDCs dan REDD+ [Studi Kasus]

Kakao adalah penyebab penting perubahan hutan di Sub-Sahara Afrika (SSA). Sebuah studi baru tentang deforestasi terkait tanaman komoditas menemukan bahwa produksi kakao di SSA menyumbang 57% dari perluasan kakao global antara tahun 2000 dan 2013. Dalam usaha untuk membalikkan kecenderungan ini, dua negara penghasil utama kakao di SSA – Pantai Gading and Ghana – telah menjadikan kakao sebagai pemeran utama dalam strategi NDCs dan REDD+ mereka, mengembangkan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada rantai pasokan kakao bebas deforestasi untuk bekerja sama dengan dua negara ini. Di lapangan, pendekatan terintegrasi untuk wanatani yang mempertimbangan seluruh rantai nilai kakao akan menjadi inti dari upaya REDD+⁷¹. Kasus ini adalah contoh dari meningkatnya komitmen sektor swasta yang ditujukan untuk sumber bahan berkelanjutan dan rantai pasokan bebas deforestasi.

Akan tetapi, pekerjaan di bidang ini belumlah selesai. Satu studi yang mengevaluasi kesepakatan zero deforestation seperti Inisiatif Kakao dan Hutan atau *the Cocoa and Forests Initiative* (CFI) Pantai Gading dan Ghana menemukan beberapa masalah, antara lain bahwa perusahaan di hilir yang berhadapan dengan konsumen menggunakan persyaratan yang lebih longgar daripada mitra di hilir, tidak jelasnya definisi dan jadwal, diabaikannya rantai pasokan yang tidak langsung dan tidak telitinya lokasi geospasial⁷².

Restorasi lanskap hutan di Etiopia [Studi Kasus]

Upaya berani restorasi hutan Ethiopia dapat membantu memenuhi tujuan REDD+. Negara ini berkomitmen untuk memulihkan 22 juta hektar hutan dan lahan pertanian terdegradasi pada 2030. Dengan melestarikan hutan alam dan membangun yang baru, hutan diharapkan berperan signifikan dalam pembangunan sosial ekonomi negara, menyumbang 50% dari potensi reduksi

Bersambung ke halaman berikutnya

-
- 69 Ngoma H, Angelsen A, Carter S and Roman-Cuesta RM. 2018. Climatesmart agriculture: Will higher yields lead to lower deforestation? In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 175–187
- 70 Verchot L, De Sy V, Romijn E, Herold M and Coppus R. Forest restoration: Getting serious about the 'plus' in REDD+. 2018. Introduction: REDD+ enters its second decade. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 189–202
- 71 Ngoma H, Angelsen A, Carter S and Roman-Cuesta RM. 2018. Climatesmart agriculture: Will higher yields lead to lower deforestation? In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 175–187
- 72 Carodenuto S and Buluran M. 2021. The effect of supply chain position on zero-deforestation commitments: evidence from the cocoa industry. *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, 716–731.

emisi nasional, dan berkontribusi untuk membangun ekonomi netral karbon pada 2030. Antara 2016 dan 2020, Ethiopia bertujuan untuk mengalihkan 2 juta hektar hutan untuk pengelolaan hutan partisipatif sambil mengidentifikasi dan membatasi 4,5 juta hektar lahan yang terdegradasi untuk restorasi, penghijauan, dan reforestasi. Selain itu, Komisi Lingkungan, Hutan, dan Perubahan Iklim Ethiopia telah mengidentifikasi opsi restorasi berbasis pohon untuk meningkatkan tutupan pohon di lanskap berbeda, seperti tepi danau dan tepi sungai, zona penyangga hutan alam, padang rumput dan lanskap pertanian. Namun, terlepas dari komitmen restorasi nasional yang berani, kurangnya kemauan dan kapasitas politik pada negara bagian dan tingkat pemerintah yang lebih rendah dapat menimbulkan masalah implementasi. Selain itu, keberhasilan skema hutan partisipatif di komunitas berbeda tidak pasti, menunjuk pada kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembentukan koperasi, kekayaan wakaf masyarakat, homogenitas etnis, jarak ke pasar terdekat, dan hubungan antara kantor perlindungan lingkungan kabupaten dengan koperasi (Walle and Nayak 2020⁷³). Diambil dari: "Forest landscape restoration in Ethiopia by Habtemariam Kassa" in Ngoma et al. (2018)⁷⁴ dan (Walle and Nayak 2020)⁷⁵.

2.3.7 Hubungan dengan kebijakan sektor lain

Deforestasi dan degradasi hutan tidak bisa dibingkai hanya sebagai masalah kehutanan mengingat bahwa sektor lain, seperti eksploitasi kayu komersial, pengembangan industri pertanian, perladangan berpindah dan perluasan infrastruktur, semua berperan juga. Undang-undang dan peraturan yang bersaing atau bertentangan di sektor lain dapat menghambat keberhasilan program REDD+. Dan karena pemanfaatan hutan dan lahan yang lebih baik juga melibatkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, seperti kemiskinan pedesaan, kepemilikan lahan, masalah jasa lingkungan dan keuangan dan pasar, REDD+ membutuhkan tanggapan lintas sektor untuk mencapai perubahan transformasional⁷⁶.

Koordinasi antar pelaku kebijakan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah hal yang krusial. Agar kelembagaan REDD+ dapat menanggapi cakupan masalah yang lebih luas, diperlukan adanya keterwakilan dan interaksi pelaku lintas batas sektor dan pengetahuan serta nilai yang beragam. Program REDD+ harus dikaitkan dengan sektor lain (kehutanan, lingkungan, dan keuangan) dan kebijakan penggunaan lahan untuk memastikan keberhasilannya.

Keterwakilan pemerintah dari berbagai sektor kebijakan saja tidak menjamin peningkatan koordinasi kebijakan lebih baik. Kepentingan politik, hubungan kekuasaan dan kebiasaan lama dapat merusak efektivitas kelembagaan. Dibutuhkan dukungan bagi mereka yang terkena dampak REDD+ untuk memastikan suara mereka dapat terdengar dalam proses pengambilan keputusan⁷⁷.

73 Walle, Y., Nayak, D., 2020. How Can Participatory Forest Management Cooperatives be Successful in Forest Resources Conservation? An Evidence From Ethiopia. *Journal of Sustainable Forestry* 39, 655–673. <https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1684950>

74 Ngoma, H., Angelsen, A., Carter, S., Roman-Cuesta, R.M., 2018. Climate-smart agriculture. Transforming REDD. https://www.researchgate.net/profile/Hambulo-Ngoma/publication/329337912_Climate-smart_agriculture_Will_higher_yields_lead_to_lower_deforestation/links/5c94986445851506d72257b4/Climate-smart-agriculture-Will-higher-yields-lead-to-lower-deforestation.pdf

75 Walle, Y. and Nayak, D., 2020. How Can Participatory Forest Management Cooperatives be Successful in Forest Resources Conservation? An Evidence From Ethiopia. *Journal of Sustainable Forestry* 39, 655–673. <https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1684950>

76 Brockhaus, M., Di Gregorio, M., Mardiah, S., 2014. Governing the design of national REDD+: An analysis of the power of agency. *Forest Policy and Economics* 49, 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.003>

77 Fujisaki, T., Hyakumura, K., Scheyvens, H., Cadman, T., 2016. Does REDD+ Ensure Sectoral Coordination and Stakeholder Participation? A Comparative Analysis of REDD+ National Governance Structures in Countries of Asia-Pacific Region. *Forests* 7, 195. <https://doi.org/10.3390/f7090195>

Hubungan lintas sektor dan dampak kebijakan di Brasil [Studi Kasus]

Di Brasil, paradigma pembangunan sejak pertengahan 1970-an semakin terpusat pada promosi perusahaan swasta melalui kredit dan insentif fiskal yang besar, dengan perhatian khusus bagi sektor peternakan, kayu dan pertambangan. Akibatnya tekanan pada hutan meningkat. Meskipun telah ada langkah-langkah untuk mengurangi deforestasi, konversi hutan terus difasilitasi oleh kebijakan yang bertentangan, khususnya dalam sektor infrastruktur, agribisnis, dan pertambangan. Lebih banyak upaya yang harus dilakukan di berbagai industri yang terkait dengan deforestasi untuk memastikan ada koordinasi kebijakan lintas sektor yang lebih besar pada undang-undang kehutanan⁷⁸.

Mengembangkan rancangan standar REDD+ untuk industri ekstraktif di DRC [Studi Kasus]

Industri ekstraktif dan infrastruktur terkait adalah merupakan penyebab utama berkurangnya hutan, berada di peringkat keempat pendorong deforestasi setelah pembalakan industrial, ekspansi pertanian, dan kebakaran hutan. Sebagian besar industri ekstraktif tidak menyebut REDD+ secara eksplisit dalam laporan atau inisiatif keberlanjutan mereka, namun mereka sering memiliki kebijakan lingkungan dan sosial yang relevan yang menawarkan hubungan praktis dengan tujuan REDD+.

Sebuah studi menemukan bahwa ada kesempatan bagi industri ekstraktif untuk berkontribusi dalam tujuan REDD+, menggunakan wawasan yang didapat dari pengembangan standar REDD+ untuk ekstraktif di Republik Demokratik Kongo (DRC). Kerangka strategi REDD+ nasional DRC yang diadopsi pada tahun 2014 menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan manfaat investasi sektor swasta pada umumnya dan sektor minyak dan pertambangan, yaitu:

- Pengembangan dan implementasi tata kelola lahan yang ambisius untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya alam;
- Revisi kerangka hukum untuk sektor ekstraktif;
- Penguatan penegakan hukum perihal jaring pengaman (safeguard) sosial dan lingkungan;
- Mendukung penelitian tentang dampak dari industri ekstraktif terhadap hutan (baik skala besar maupun skala kecil) bersama dengan langkah-langkah mitigasi dan kompensasi;
- Mendukung rencana mitigasi dan rehabilitasi lokasi dengan partisipasi masyarakat sipil dan komunitas daerah untuk membatasi kerusakan hutan.

Rancangan Standar REDD+ DRC untuk industri ekstraktif ditujukan untuk memandu seluruh kegiatan ekstraktif di kawasan hutan dengan tujuan mencegah, mengurangi, atau mengkompensasi dampaknya terhadap tutupan hutan. Standar ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar REDD+, termasuk keabadian pengurangan yang dicapai, tambahan dari pengurangan ini dibandingkan dengan referensi, langkah-langkah pengamanan pilihan mata pencaharian bagi penduduk lokal dan pencegahan efek kebocoran dari pemindahan kegiatan ke kawasan hutan lainnya. Rancangan Standar secara tegas menyatakan tujuan deforestasi nol dan berisi persyaratan eksplisit untuk menggabungkan deforestasi langsung dan tidak langsung dan degradasi hutan dalam sistem pengelolaan lingkungan.

Intervensi REDD+ yang berhasil untuk sektor ekstraktif perlu mengatasi risiko yang ada agar mencapai hasil REDD+ yang efektif, efisien, dan berkeadilan, seperti batasan dan kesulitan dalam

Bersambung ke halaman berikutnya

78 May, P.H., Gebara, M.F., de Barcellos, L.M., Millikan, B., 2016. The context of REDD+ in Brazil: drivers, agents, and institutions - 3rd edition. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006338>

perencanaan antarsektor, dan kepentingan eksploitasi minyak dan mineral. Secara keseluruhan, Draft Standar REDD+ untuk industri ekstraktif adalah contoh bagaimana mengembangkan kebijakan REDD+ dapat memengaruhi sektor ekstraktif dan memperluas perspektif bagaimana sektor tersebut dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan REDD+⁷⁹.

Kebijakan sektor kehutanan

Bauran kebijakan telah menjadi bidang minat yang berkembang di kalangan komunitas internasional.

Instrumen kebijakan cenderung dianalisis secara terisolasi, namun pada kenyataannya, yang diterapkan adalah bauran kebijakan atau intervensi. Efek gabungan berbeda dari efek masing-masing.

Implementasi REDD+ seharusnya melibatkan campuran berbagai instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan.

Beberapa bauran kebijakan tersebut antara lain:

- Instrumen kebijakan berbasis insentif untuk mendorong konservasi hutan, seperti PES atau subsidi (sering disebut “wortel”);
- Kebijakan disinsentif untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, seperti penegakan hukum dengan hukuman atas pelanggaran yang lebih berat (sering disebut “tongkat”);
- Kebijakan untuk mengubah kondisi kelembagaan yang mendukung (misalnya, restrukturisasi tanggung jawab kementerian atau desentralisasi otoritas), yang mempersiapkan landasan bagi insentif dan disinsentif untuk bekerja lebih baik.

Sementara bauran kebijakan insentif–disinsentif diperlukan, tujuan kebijakan ganda tidak dapat dicapai begitu saja oleh satu instrumen kebijakan. Apalagi karena deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh banyak faktor penguat. Evaluasi bauran kebijakan ini perlu mempertimbangkan elemen efisiensi ekonomi, efektivitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial yang terkait dengan pendapatan. Untung ruginya bergantung pada pola dan tekanan deforestasi, peluang konservasi dan biaya penegakan dan kepatuhan. Efektivitas penegakan hukum adalah kunci efisiensi kebijakan apa pun.

79 Hund, K., Schure, J., van der Goes, A., 2017. Extractive industries in forest landscapes: options for synergy with REDD+ and development of standards in the Democratic Republic of Congo. *Resources Policy* 54, 97–108. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.09.011>

Bauran kebijakan yang menyebabkan perlambatan deforestasi Brasil [Studi Kasus]

Dalam hal memerangi deforestasi, keberhasilan Brasil tak tertandingi dan sebagian besar disebabkan oleh bauran kebijakan.

Pada 2012, deforestasi di Brasil sebesar 13.750 kilometer persegi lebih rendah dari rata-rata historis dan kurang lebih 700 kilometer persegi di bawah target kebijakan nasional yang ambisius untuk periode 2011–2015.

Kesuksesan ini sebagian besar dikaitkan dengan langkah-langkah perintah dan kontrol (*command and control*) seperti:

- Daftar hitam wilayah atau kabupaten dengan kehilangan hutan tahunan yang tinggi
- Pemantauan deforestasi waktu nyata agar penjahat dapat ditangkap dengan cepat
- Penegakan hukum yang efektif

Bagaimana pun juga, untuk menyeimbangkan biaya, manfaat, dan keadilan sosial, pemerintah mulai menyadari pentingnya memasukkan insentif ke dalam bauran kebijakan penegakan hukum. Hal ini mencakup kompensasi kepada petani untuk melestarikan vegetasi alami dalam lahan mereka serta pembayaran berbasis kinerja untuk pelestarian jasa lingkungan atau *payments for environmental service conservation* (PES).

Pada praktiknya merancang bauran kebijakan yang efektif dapat menjadi tantangan dan disertai adanya timbal balik. Sebuah studi pada 2015 menemukan adanya kendala untuk menyelaraskan insentif dengan disintensif agar konservasi dapat diterima secara sosial dan hemat biaya.

Atas dasar pertimbangan moneter murni pengeluaran pemerintah, bauran yang paling hemat biaya didominasi oleh langkah-langkah perintah dan kontrol, dengan lebih dari 30 hektar hutan yang dikonservasi per BRL 1.000 (1.000 real Brasil, sekitar USD 345) yang diinvestasikan dalam kebijakan.

Jenis kebijakan ini dapat mencapai keberhasilan dengan biaya penegakan hanya BRL 0,03 (kurang dari satu sen AS) per hektar dari hutan yang dikonservasi. Namun, biaya peluang yang ditanggung oleh pengguna lahan dalam skenario ini akan besar. Untuk pengurangan deforestasi yang terjadi antara 2004 dan 2012, biayanya bisa melebihi BRL 2 miliar (sekitar USD 700 juta) per tahun.

Studi yang sama menemukan bahwa wortel tanpa tongkat, dapat mengurangi efektivitas biaya hingga lebih dari 98%, meskipun wortel membantu memastikan pembagian biaya dan manfaat yang lebih setara sehingga membuat konservasi secara politis lebih diterima.

“Alasannya adalah bahwa Anda memberi kompensasi kepada pengguna lahan untuk setidaknya beberapa kerugian yang terjadi ketika mereka meningkatkan kepatuhan mereka terhadap hukum. Tapi tentu saja, hal ini menimbulkan biaya yang signifikan bagi negara, yang harus menyediakan anggaran yang lebih besar,” kata Jan Börner, penulis utama studi.

Diadaptasi dari: Mind the ‘stick’: How ‘carrots’ can make conservation fairer in Brazil’s Amazon⁸⁰

80 Börner J, Marinho E and Wunder S. 2015. Mixing Carrots and Sticks to Conserve Forests in the Brazilian Amazon: A Spatial Probabilistic Modeling Approach. PLOS ONE 10(2): e0116846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116846>

Legislasi kehutanan dan hak-hak kepemilikan lahan untuk Masyarakat pribumi di Acre [Studi Kasus]

Pada tahun 1976, Yayasan Nasional Indian atau *National Indian Foundation* (FUNAI) Brasil mulai bekerja di negara bagian Acre membangun kontak pertama antara negara dan penduduk pribumi untuk menetapkan tanah mereka. Demarkasi “wilayah pribumi” sebagai kategori tanah legal sangat penting karena memberikan hak atas tanah kepada penduduk pribumi. Selain itu, Konstitusi Brasil tahun 1988 memperkuat hak penduduk pribumi, menghapus mandat bahwa penduduk pribumi harus berasimilasi dengan masyarakat Brasil. Demarkasi, dalam hubungannya dengan undang-undang konstitusional yang mengakui dan memperkuat hak-hak penduduk pribumi, berkontribusi pada kepemilikan tanah. Sejak tahun 1976, 717 wilayah pribumi telah ditetapkan secara nasional⁸¹.

Kebijakan baru di Brasil untuk menghindari dan mengimbangi emisi terkait [Studi Kasus]

Di Amazon Brasil, dimana inisiatif pemerintah dan tekanan internasional membantu mengurangi emisi dari deforestasi, emisi dari kebakaran hutan dan efek tepi meningkat di antara 2005 dan 2015. Kebijakan efektif untuk mengurangi deforestasi tidak secara langsung mengatasi degradasi hutan; mengatasi degradasi yang disebabkan oleh manusia harus melampaui identifikasi dan mengukur berbagai jenis gangguan untuk menciptakan strategi baru. Beberapa dari kebijakan baru yang bisa disusun – dan akhirnya dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan perjanjian internasional – adalah kebijakan yang ditujukan untuk menghindari dan mengimbangi emisi terkait, termasuk penggunaan berkelanjutan sumber daya hutan, memulihkan hutan tua dan melindungi hutan sekunder⁸².

Akan tetapi kebijakan baru demikian dapat dengan mudah digagalkan dan dibuat ulang oleh kepentingan politik. Bolsonaro menerbitkan kebijakan yang mengizinkan pengembangan produk pertanian dan kehutanan secara komersial di wilayah pribumi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak serupa yang terjadi pada jaman kolonial⁸³.

Pembayaran pada komunitas lokal dari perusahaan penebangan sejalan dengan peningkatan transparansi hutan di Ghana [Studi Kasus]

Di Ghana, reformasi sistem Perjanjian Tanggung Jawab Sosial yang memberikan hak kepada masyarakat lokal atas pembayaran dari perusahaan penebangan telah meningkatkan transparansi dan meningkatkan pembayaran kepada masyarakat, dan dengan demikian meningkatkan pengumpulan dan penggunaan pendapatan hutan⁸⁴. Hasil positif lain termasuk peningkatan pendapatan sektor kehutanan, proses yang lebih adil untuk menegosiasikan Perjanjian Tanggung Jawab Sosial, pemantauan yang lebih baik atas implementasi oleh pemerintah, dan dampak positif secara keseluruhan dalam pengelolaan sektor kehutanan di negara.

81 DiGiano, M., Mendoza, E., Ochoa, M., Ardila, J., Oliveira de Lima, F., Nepstad, D., 2018. The Twenty-Year-Old Partnership Between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil.

82 Silva Junior, C.H.L., Carvalho, N.S., Pessôa, A.C.M., Reis, J.B.C., Pontes-Lopes, A., Doblaz, J., Heinrich, V., Campanharo, W., Alencar, A., Silva, C., Lapola, D.M., Armenteras, D., Matricardi, E.A.T., Berenguer, E., Cassol, H., Numata, I., House, J., Ferreira, J., Barlow, J., Gatti, L., Brando, P., Fearnside, P.M., Saatchi, S., Silva, S., Sitch, S., Aguiar, A.P., Silva, C.A., Vancutsem, C., Achard, F., Beuchle, R., Shimabukuro, Y.E., Anderson, L.O., Aragão, L.E.O.C., 2021. Amazonian forest degradation must be incorporated into the COP26 agenda. *Nat. Geosci.* 14, 634–635. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00823-z>

83 Urzedo D and Chatterjee P. 2021. The Colonial Reproduction of Deforestation in the Brazilian Amazon: Violence Against Indigenous Peoples for Land Development. *Journal of Genocide Research* 23(2): 302-324, DOI:10.1080/14623528.2021.1905758

84 Hoare, A., Young, D., Uehara, T., Seidu, M.K., Birikorang, G., Wete Soh, L., Kamga, J.K., Royal Institute of International Affairs, 2020. Forest sector accountability in Cameroon and Ghana: Exploring the Impact of Transparency and Participation

3 Merancang mekanisme pembagian manfaat

3.1 Deskripsi/tipologi dasar

3.1.1 Tujuan mekanisme

Sasaran

Program insentif untuk jasa ekosistem paling efektif jika menetapkan kelompok tertentu sebagai sasaran program.

Program REDD+ dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pembagian manfaat untuk menjamin agar sebagian besar keuntungan dapat dirasakan oleh kelompok tertentu. Bagaimana kelompok sasaran diidentifikasi bergantung pada proyek dan prioritasnya, tetapi kelompok yang menjadi prioritas adalah komunitas yang melibatkan anggota yang kurang beruntung, rentan, atau terpinggirkan.

Alasan yang digunakan untuk menguatkan distribusi manfaat dan penentuan kelompok penerima manfaat meliputi hal-hal berikut:

- Manfaat diberikan kepada pelaku berdasarkan hak hukum (alasan “hak hukum”).
- Manfaat disalurkan kepada para pelaku yang mencapai pengurangan emisi (alasan “pengurangan emisi”).
- Manfaat diberikan kepada pengelola hutan yang beremisi rendah (alasan “perwalian”).
- Para pelaku yang mengeluarkan biaya diberikan kompensasi (alasan “kompensasi biaya”).
- Manfaat diberikan kepada fasilitator implementasi REDD+ yang efektif (alasan “fasilitasi”).
- Manfaat diberikan kepada yang paling miskin (alasan “pro-kemiskinan”).

Proses perancangan mekanisme harus dilegitimasi karena adanya berbagai tujuan dan kelompok kepentingan dalam suatu proyek. Adanya prinsip dan tujuan yang jelas dapat mencegah kelompok kepentingan kecil dan tidak representatif memberi pengaruh kuat yang tidak proporsional atas rancangan pembagian manfaat REDD+⁸⁵.

Pendekatan penentuan kelompok sasaran dan kriteria kelayakan berbeda menghasilkan pertimbangan untung rugi yang berbeda pula dan kelengkapan, dengan kriteria kelayakan yang lebih canggih dan ketat mungkin lebih efektif meski biaya lebih tinggi untuk diterapkan. Selain itu, terdapat potensi konflik jika hanya beberapa orang dan tidak semua anggota komunitas menerima manfaat. Bagaimana kelompok sasaran dicirikan (misalnya, bagaimana kelompok miskin dan rentan didefinisikan?) dan ketersediaan data, dana, dan kapasitas kelembagaan untuk menerapkan kriteria tersebut harus dipertimbangkan.

85 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. *E&S* 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

Kriteria pertemuan pengguna lahan dalam program FLA Vietnam menjamin tenurial [Studi Kasus]

Program Alokasi Lahan Hutan Vietnam atau *Forest Land Allocation* (FLA) memberi kepastian tenurial bagi pengguna lahan hutan. FLA merupakan penyerahan hak hutan kepada masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan dan pembangunan hutan lokal. Program ini diharapkan mengatasi kemiskinan dengan memprioritaskan masyarakat dan individu miskin di wilayah desa hutan. Mereka kemudian yang diberikan kualifikasi yang dibutuhkan agar layak menerima Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan atau *Payment for Environmental Services* (PFES)⁸⁶ dan ikut serta REDD+⁸⁷.

Rumah tangga dan desa sebagai kelompok sasaran program PFES Vietnam di Cat Tien [Studi Kasus]

Di wilayah Cat Thien, Vietnam, staf yang menjalankan program Pembayaran Jasa Lingkungan Kehutanan atau *Payment for Forestry Environmental Services* (PFES) memilih masyarakat yang berpartisipasi menggunakan kriteria, yaitu desa dekat perbatasan dengan provinsi lain, daerah dengan risiko penebangan liar tinggi, desa dengan kinerja perlindungan hutan yang baik di masa lalu, dan masyarakat yang tidak terlibat dalam program perlindungan hutan negara lainnya. Meskipun penentuan sasaran pembagian manfaat cukup baik, masih perlu ada perbaikan. Sebagai contoh, proses pemilihan rumah tangga seharusnya tidak melalui konsultasi dengan kepala desa. Staf program meminta pendapat kepala desa, sehingga mungkin ada bias. Untuk memastikan kesetaraan di masa depan, staf program akan mencoba merotasi desa penerima PFES setiap beberapa tahun. Desa yang tidak menjalankan tugas PFES secara efektif akan dikeluarkan dari program dan diganti dengan yang lain. Upaya untuk meningkatkan pemerataan harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam seluruh upaya untuk menargetkan proyek-proyek⁸⁸.

3.1.2 Jenis manfaat

Uang tunai langsung berdasarkan kinerja

Keuntungan moneter langsung jarang terjadi di REDD+. Sampai harga karbon global atau nasional dapat ditentukan, REDD+ dan inisiatif pembangunan rendah emisi lainnya tidak mungkin menjanjikan keuntungan moneter secara langsung kepada masyarakat.

Tidak berdasarkan kinerja

Tidak jarang, proyek mengeluarkan dana untuk biaya awal, yang memungkinkan pemilik lahan untuk menutupi biaya tenaga kerja di muka yang cukup besar dan biaya peluang dari perubahan penggunaan lahan.

86 Pham, Thu Thuy, Le, T.T.T., Tuyet, H.N.K., Pham, V.T., Tran, P.H.N.K., Tran, T.D., Tran, N.M.H., Nguyen, T.T.A., Nguyen, T.V.A., 2021a. Impacts of Payment for Forest Ecosystem Services in Protecting Forests in Dak Lak Province, Vietnam. *Forests* 12, 1383. <https://doi.org/10.3390/f12101383>

87 Wong, G.Y., Loft, L., Brockhaus, M., Yang, A.L., Pham, T.T., Assembe-Mvondo, S., Luttrell, C., 2017. An Assessment Framework for Benefit Sharing Mechanisms to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation within a Forest Policy Mix: Assessment Framework for REDD+ BSM. *Env. Pol. Gov.* 27, 436–452. <https://doi.org/10.1002/eet.1771>

88 Pham, T.T., Nguyen, T.D., Dao, C.T.L., Hoang, L.T., Pham, L.H., Nguyen, L.T., Tran, B.K., 2021. Impacts of Payment for Forest Environmental Services in Cat Tien National Park. *Forests* 12, 921. <https://doi.org/10.3390/f12070921>

Uang muka: pengalaman dari percontohan REDD+ di Tanzania [Studi Kasus]

Sebuah percobaan REDD+ memperkenalkan sistem PED tingkat desa berbasis kinerja di distrik Kilosa dan Lindi. Penduduk desa diharuskan mengurangi atau menghentikan konversi kawasan untuk penggunaan lahan lain, selain REDD+ verifikasi tercapai, dan sebelum pembayaran REDD+ yang benar-benar bersyarat dapat dilakukan. Menyadari biaya di awal dan sama dengan inisiatif jenis PES lainnya yang terdokumentasi, pembayaran REDD+ pertama dilakukan ke desa-desa sebelum pengurangan hilangnya hutan yang terukur. Mengatur pembayaran di awal merupakan sebuah tantangan karena tidak ada kinerja yang dicapai, tetapi diperlukan untuk menciptakan insentif bagi manajemen di masa depan. Pembayaran pertama ini didasarkan pada data dasar historis desa dan persentase hutan yang mereka putuskan untuk dimasukkan ke dalam hutan lindung desa. Proyek ini mencari keseimbangan antara persyaratan yang harus dipenuhi dengan kebutuhan untuk melakukan pembayaran di awal agar tidak membebankan biaya itu pada rumah tangga. Pembayaran di awal ini mungkin dikritik karena dianggap meniadakan persyaratan untuk PES, tetapi tanpa itu, pendekatan pengelolaan sumber daya bisa jadi gagal di tahun awal, atau tidak ditolak sejak diusulkan. Hal ini terutama terjadi pada negara berpenghasilan rendah, di mana masyarakatnya sangat bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Implementasi REDD+ akan berbeda dari PES di negara dengan kepemilikan lahan yang berfungsi dengan baik. Karena itu, ada baiknya mempertimbangkan kemungkinan membayar biaya di muka, dan dampaknya akan membantu memfasilitasi keberhasilan suatu proyek⁸⁹.

Pembayaran uang muka untuk program Mai-Ndombe di DRC [Studi Kasus]

Untuk proyek REDD+ Mai-Ndombe di DRC, direncanakan penyediaan minimal 5,3 juta dolar AS sebelum pembayaran untuk penurunan emisi atau *Emission Reduction Program Agreement* (ERPA) (terlepas dari kinerja proyek), untuk membantu memenuhi biaya awal. Selain pembayaran di awal ini, hingga 1,9 juta dolar AS akan ditambahkan dalam kinerja program pengurangan emisi atau *emissions reduction programme* (ER). Pembayaran ditujukan untuk berkontribusi pada manajemen program ER, pengembangan dan tata kelola, dan kegiatan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan. Untuk negara-negara seperti DRC yang mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam skema REDD+ jika tidak adanya dukungan dari luar, pendanaan awal dari dibutuhkan agar tidak adanya dana menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam REDD+⁹⁰.

Menutupi sebagian biaya implementasi program FCPF di Vietnam [Studi Kasus]

Di Vietnam, dari total pembayaran yang diharapkan sebesar 48 juta dolar AS, sebanyak 3,2% –setara dengan perkiraan 1,42 juta dolar AS– telah dialokasikan langsung untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat keadaan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi penguatan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian konversi hutan alam; menerapkan kerangka hukum untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan alam; mengelola sumber daya hutan alam secara berkelanjutan dan mengembangkan perkebunan secara berkelanjutan di Wilayah Tengah Utara; memperkuat penegakan hukum dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan aturan (50% dari total

Bersambung ke halaman berikutnya

89 Robinson EJZ, Albers HJ, Lokina R and Meshack C. 2016. Allocating Group-Level Payments for Ecosystem Services: Experiences from a REDD+ Pilot in Tanzania. *Resources* 5(4):43. <https://doi.org/10.3390/resources5040043>

90 The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 2018. Advanced Draft Benefit Sharing Plan for the Mai-Ndombe Emission Reductions Program in the Democratic Republic of Congo [Draft]. Accessed 11 July 2022. https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%202018_CLEAN.pdf

jumlah yang dialokasikan ke tingkat pusat); pengembangan dan sosialisasi peraturan dan pedoman; dan mendorong keterlibatan sektor swasta, komunitas lokal dan etnis minoritas agar secara efektif dapat berkontribusi pada target ER (50% dari total jumlah yang dialokasikan ke tingkat pusat). Sisa 96,8% dari total pembayaran bersih (setara dengan 46,58 juta dolar AS) berbasis kinerja dan akan dialokasikan ke provinsi⁹¹.

Non-tunai/Dalam bentuk barang

Kecuali jika REDD+ memberikan mata pencarian, infrastruktur, jaminan kepemilikan, keanekaragaman hayati dan keuntungan jasa ekosistem (sering kali dilabeli “keuntungan tambahan” atau “keuntungan non-karbon”), tujuan karbon tidak mungkin dapat tercapai. Sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dan didistribusikan oleh REDD+ sejauh ini bersifat non-moneter.

Memanfaatkan pelatihan keterampilan pemantauan hutan untuk peluang mata pencarian [Studi Kasus]

Anggota subkomite pemantauan Puerto Ocopa, Peru, tidak diberi kompensasi berupa uang untuk pekerjaan mereka, tetapi menerima pelatihan dari program REDD+ mengenai teknologi dan teknik pemantauan hutan, yaitu pelatihan *Global Positioning System* (GPS), pemetaan dan pembacaan koordinat, topik konservasi dan bagaimana menanggapi keadaan yang diidentifikasi selama pemantauan dilakukan (yaitu, bagaimana melaporkan masalah terkait penebangan liar, perambahan, dan kejahatan lingkungan lainnya). Beberapa anggota telah menggunakan teknologi dan teknik pemantauan hutan yang baru untuk memperluas peluang mata pencarian mereka atau untuk mendapatkan penghasilan tambahan, seperti yang dibayarkan oleh petani skala kecil dan tetangga untuk membatasi plot mereka dengan koordinat GPS⁹².

Mempekerjakan orang lokal menghasilkan beberapa manfaat tambahan di Madagaskar [Studi Kasus]

Di Madagaskar, sebuah LSM lokal yang bernama Eden menerapkan model pembangunan yang mempekerjakan penduduk setempat untuk menanam pohon dengan tujuan meningkatkan pendapatan, meningkatkan kapasitas adaptif, dan menghentikan deforestasi. Eden mempekerjakan lebih dari 100 pekerja tetap per desa untuk melakukan penanaman bakau dan selama lebih dari sepuluh tahun ini telah menciptakan stabilitas pekerjaan yang telah memberikan pembelajaran keterampilan baru dan keuntungan dalam pengembangan karier. Masyarakat yang menerima manfaat telah mampu mendiversifikasi mata pencarian mereka berkat peningkatan kapasitas tabungan mereka. Selain itu, peningkatan pendapatan mereka memungkinkan pemenuhan kebutuhan antara lain Pendidikan dan penguatan modal sosial⁹³.

- 91 [MARD] Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam and [FCPF] The Forest Carbon Partnership Facility. 2019. Benefit sharing plan of the program on emissions reductions in north central region of Viet Nam for the period 2019-2024. Washington DC, USA: The World Bank. Accessed 11 July 2022. <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/676631550223032222/Advanced-Draft-Benefit-Sharing-Plan-for-Vietnam-North-Central-Region.docx>
- 92 F. Kowler L, Kumar Pratihast A, Pérez Ojeda del Arco A, Larson AM, Braun C and Herold M. 2020. Aiming for Sustainability and Scalability: Community Engagement in Forest Payment Schemes. *Forests* 11(4):444. <https://doi.org/10.3390/f11040444>
- 93 Favretto N, Afionis S, Stringer LC, Dougill AJ, Quinn CH and Ranarijaona HL. 2020. Delivering climate-development co-benefits through multi-stakeholder forestry projects in Madagascar: Opportunities and challenges. *Land* 9(5):157. <https://doi.org/10.3390/land9050157>

Campuran manfaat REDD+ non-karbon di Kalimantan, Indonesia [Studi Kasus]

REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat dari karbon dan non-karbon (seperti sosial dan lingkungan) meliputi konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan pangan, bahan bakar dan serat, serta kontribusi untuk mata pencarian lokal. Akan tetapi, cukup sulit untuk menentukan jenis dan tingkat manfaat tambahan yang dapat dihasilkan oleh proyek REDD+ dan ada kemungkinan juga proyek ini memiliki dampak negatif di masyarakat. Sebuah penelitian dari Indonesia menggunakan data sekunder dan indikator kesejahteraan pada 2.242 desa di 18 lokasi proyek REDD+ di Kalimantan menemukan hasil yang relatif positif untuk tenurial, tetapi berpotensi memiliki dampak negatif pada kesejahteraan. Para penulis menganjurkan sistem pengumpulan dan pemantauan data yang lebih kuat untuk mengevaluasi dampak sosial proyek REDD+ dari waktu ke waktu⁹⁴.

Membangun pendidikan dan kapasitas Masyarakat pribumi Acre melalui program agroforestri [Studi Kasus]

Di negara bagian Acre, Brasil, para pemimpin pribumi yang terlibat dalam program Indigenous Agroforestry Agents (IAA) untuk menjadi penyuluh perdesaan, juga menjadi pendidik dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Bagi banyak IAA, program pelatihan memberikan keterampilan yang diperlukan dan pengalaman transformatif di luar komunitas mereka untuk terlibat dengan masyarakat yang lebih luas secara setara. Bagi kebanyakan orang, pelatihan IAA merupakan paparan pertama mereka terhadap bahasa Portugis, di mana mereka memperoleh keterampilan membaca dan menulis. Pada tahun 2018, sebanyak 59 IAA telah menyelesaikan pendidikan menengah atau teknis, dan beberapa dari lulusan ini memiliki peran profesional lain dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, termasuk sebagai Sekretaris Urusan Pribumi untuk pemerintah negara bagian Acre. Program IAA membantu memperkuat budaya, pengetahuan, dan lembaga masyarakat dalam mengambil keputusan di komunitas mereka dan proses untuk bagian negara yang lebih luas, sekaligus mempromosikan perlindungan hutan⁹⁵.

3.1.3 Jenis keuangan

REDD+ dapat didanai dengan berbagai cara, antara lain transfer tunai bersyarat dan tanpa syarat, dana lingkungan khusus, sistem PES, pembayaran di muka dan pembayaran sementara, dan sistem redistribusi pajak tanah atau hutan.

Di tingkat global, pendanaan REDD+ sebagian besar telah dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan REDD+, pengembangan strategi nasional REDD+ dan pada tingkat yang lebih rendah untuk reformasi kebijakan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan indikator yang jelas untuk kinerja REDD+ merupakan proses yang dinegosiasikan.

94 Jagger P and Rana P. 2017. Using publicly available social and spatial data to evaluate progress on REDD+ social safeguards in Indonesia. *Environmental Science & Policy* 76:59-69. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.06.006>

95 DiGiano M, Mendoza E, Ochoa M, Ardila J, Oliveira de Lima F and Nepstad D. 2018. The Twenty-Year-Old Partnership Between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil: Lessons for realizing climate change mitigation and social justice in tropical forest regions through partnerships between subnational governments and indigenous peoples. San Francisco, USA: Earth Innovation Institute (EII). DOI:[10.13140/RG.2.2.34535.29609](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34535.29609)

Dana kehutanan khusus: Dana Amazon Brasil [Studi Kasus]

Dana Amazon Brasil merupakan salah satu instrumen pembayaran berbasis hasil terbesar dan paling berpengalaman di seluruh dunia, dengan aktivitas operasional lebih dari satu dekade, meliputi sampai 2 miliar dolar AS dalam perjanjian donasi dan pencairan yang disetujui lebih dari 707 juta dolar AS untuk mendukung 100 proyek. Donor internasional terutama Norwegia dan Jerman telah melakukan pembayaran Amazon Fund berdasarkan pengurangan emisi Brasil dari tingkat deforestasi yang lebih rendah⁹⁶.

Dana Amazon mengandung banyak pelajaran untuk implementasi dan operasionalisasi pembayaran berbasis kinerja, bukan saja di Brasil, tetapi juga bagi negara lain yang ingin melakukan upaya serupa. Misalnya, ada pertanyaan apakah dan sejauh mana transfer keuangan harus disediakan untuk pengurangan emisi yang telah dilakukan. Brasil beranggapan mereka layak mendapatkan pembayaran sebesar 21 miliar dolar AS untuk hasil yang telah dicapai antara tahun 2006 dan 2016, tetapi negara-negara donor hanya bersedia membayar untuk hasil yang terbaru sebagai cara untuk mendorong pengurangan berkelanjutan. Ada juga beberapa kekhawatiran bahwa kinerja proyek Dana Amazon dalam menghasilkan pengurangan lebih lanjut belum diukur secara ketat sehingga negara-negara donor mungkin mempertimbangkan mengubah mekanisme pembiayaan berbasis hasil *Results-Based Financing* (RBF) saat ini atau terlibat dalam bentuk pendanaan yang baru.

Secara keseluruhan, dana lingkungan adalah mekanisme pembiayaan yang menyediakan berbagai pilihan untuk struktur, operasi, dan mekanisme pendanaan dan juga memastikan bahwa setiap dana dapat beradaptasi dengan konteks hukum serta kondisi nasional dan lokal. Pada sisi keuangan, mereka dapat menyediakan sumber keuangan jangka panjang untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan, alat untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dan instrumen yang hemat biaya untuk mengelola dana. Pada sisi lingkungan, dana ini dilihat sebagai cara untuk membiayai strategi lingkungan nasional dan memperkuat kapasitas organisasi lingkungan lokal⁹⁷.

Skema Nasional Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (PFES) Vietnam [Studi Kasus]

Pada tahun 2004, Vietnam menjadi negara pertama di Asia yang mengembangkan program nasional Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (PFES). Gagasan dasar pembayaran jasa lingkungan atau PES adalah untuk menciptakan insentif bagi individu dan masyarakat untuk melindungi jasa lingkungan dengan memberikan kompensasi kepada mereka untuk setiap biaya yang dikeluarkan untuk mengelola dan menyediakan jasa tersebut. Pemerintah Vietnam pertama kali menguji coba skema PFES di dua provinsi: Son La dan Lam Dong pada tahun 2008 dan sejak 2010 telah meningkatkan program tersebut ke tingkat nasional. Vietnam menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan skema PES nasional.

PFES Vietnam sebagian besar mengikuti skema PES meskipun program ini memiliki beberapa karakteristik khusus:

- Keputusan No. 99/2010/ND-CP mendefinisikan pembeli sebagai perusahaan penyedia air, pembangkit listrik tenaga air, perusahaan pariwisata dan bisnis akuakultur dan penjual sebagai pemilik hutan (organisasi, rumah tangga atau individu) dengan hutan yang dialokasikan atau disewa oleh negara untuk tujuan kehutanan secara kekal.
- Partisipasi dalam skema adalah wajib karena pembeli dan penjual diidentifikasi oleh hukum dan wajib mengambil bagian dalam program.

Bersambung ke halaman berikutnya

96 Amazon Fund, n.d. URL <http://www.amazonfund.gov.br/en/home/> (accessed 2.2.22).

97 van der Hoff, R., Rajão, R., Leroy, P., 2018. Clashing interpretations of REDD+ "results" in the Amazon Fund. *Climatic Change* 150, 433–445. <https://doi.org/10.1007/s10584-018-2288-x>

- Pemerintah menetapkan tingkat pembayaran dan Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Vietnam menandatangani kontrak dengan pembeli yang menetapkan jumlah yang harus dibayar untuk jasa ekosistem.
- Pembayaran dicairkan untuk pemeliharaan tutupan hutan sebagai *proxy* untuk jasa ekosistem.
- Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Provinsi menandatangani kontrak dengan pembeli jasa dan mengumpulkan pembayaran atas jasa yang disediakan di dalam provinsi. Dana tersebut menyiapkan rencana pembayaran, memantau, dan melepaskan pembayaran kepada pemasok layanan dan menyerahkan laporan berkala kepada Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Vietnam⁹⁸.

3.2 Bentuk rancangan

Dalam struktur pembiayaan yang sama pun, kemungkinan ada perbedaan yang berasal dari variasi bentuk hukum, keuangan, dan tata kelola. Dana dapat dialokasikan berdasarkan pengurangan emisi ke tingkat nasional dan dapat dilakukan realokasi nasional ke lokal untuk target sementara (misalnya berdasarkan pemantauan dan perencanaan). Dana dapat diberikan dengan syarat atau tanpa syarat dan dapat diberikan di muka atau dicicil. Rancangan pembiayaan proyek REDD+ harus selaras dengan kebutuhan dan keinginan donor serta negara penerima dan memiliki pengaturan kelembagaan yang menentukan aktor yang terlibat serta aturan yang berlaku untuk operasi mereka.

3.2.1 Jenis kegiatan

Banyak inisiatif percontohan REDD+ berfokus pada kegiatan konservasi hutan yang melibatkan petani kecil yang kurang mampu ekonomi dengan menyediakan mata pencarian dan kesejahteraan sosial⁹⁹. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas jika mereka merupakan pelaku yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan.

Tinjauan terhadap strategi negara REDD+ menyoroiti bahwa sebagian besar cenderung berfokus pada kegiatan untuk mengurangi degradasi hutan dan meningkatkan stok karbon hutan dibandingkan dengan mengatasi deforestasi yang biasanya disebabkan oleh pelaku komersial besar¹⁰⁰. Disarankan agar Intervensi tidak hanya terfokus pada kegiatan untuk mengurangi deforestasi, tetapi juga pada kegiatan REDD+ terkait dengan hutan lainnya, seperti pengelolaan hutan yang lestari yang mengurangi degradasi hutan dan meningkatkan stok karbon hutan¹⁰¹.

Perladangan di Indonesia dan perlunya menangani perluasan perkebunan dan pertambangan sebagai pendorong konversi hutan [Studi Kasus]

Perladangan atau *swidden agriculture*, juga dikenal sebagai *tebas-bakar*, secara historis merupakan salah satu penggunaan lahan paling luas di dataran tinggi Asia Tenggara. Di dua desa di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia di mana Program Karbon Hutan Berau atau *Berau Forest Carbon Program* (BFCP) diluncurkan, penduduk desa merasa tertekan akibat persaingan penggunaan lahan yang didorong secara langsung dan tidak langsung oleh sektor

Bersambung ke halaman berikutnya

-
- 98 Le ND, Loft L, Tjajadi JS, Pham TT and Wong GY. 2016. Being equitable is not always fair: An assessment of PFES implementation in Dien Bien, Vietnam. Working Paper 205. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006167>
- 99 Lin L, Sills E and Cheshire H. 2014. Targeting areas for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) projects in Tanzania. *Global Environmental Change* 24:277-286. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.003>
- 100 Salvini G, Herold M, De Sy V, Kissinger G, Brockhaus M and Skutsch M. 2014. How countries link REDD+ interventions to drivers in their readiness plans: implications for monitoring systems. *Environmental Research Letters* 9(7):074004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/7/074004>
- 101 Wong, G.Y., Luttrell, C., Loft, L., Yang, A., Pham, T.T., Naito, D., 2019. Narratives in REDD+ benefit sharing: examining evidence within and beyond the forest sector. *Climte Policy* 19, 8. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1618786>

perkebunan dan pertambangan. Perluasan yang cepat konsesi pertambangan dan kelapa sawit meningkatkan persepsi ketidakpastian tenurial yang mendorong pembukaan lahan yang spekulatif dan kontroversial.

Pada tingkat desa dan kabupaten, pengendalian perladangan berpindah menjadi fokus pengembangan tata kelola hutan oleh pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, perusahaan dan kelompok konservasi. Upaya pembatasan ladang berpindah dan pengembangan mata pencarian alternatif, dimaksudkan untuk membatasi dan meminimalkan area pertanian masyarakat dan mencegah perubahan lahan yang kontroversial. Tersedia inisiatif masyarakat dan inisiatif penembangan berkelanjutan, seperti penyediaan dukungan bagi perusahaan penembangan untuk mengadopsi metode penembangan berdampak rendah dan mencapai sertifikasi berkelanjutan. Akan tetapi, pembatasan perladangan berpindah memainkan peran penting dalam pembukaan ruang untuk penggunaan lahan industri (konsesi penembangan dan kelapa sawit). Proyek REDD+ sejauh ini belum berhasil untuk mengikutsertakan perusahaan besar. Pemerintah telah mengeluarkan seri kebijakan untuk mendukung REDD+, di antaranya adalah Instruksi Presiden nomor 98 tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon tetapi implementasi masih berjalan perlahan. Hampir tidak ada partisipasi dalam BFCP oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman maupun sektor pertambangan. Melupakan penggunaan lahan industri ini dalam rezim tata kelola hutan melemahkan upaya untuk membatasi pembukaan lahan yang kontroversial dan mengakibatkan kegagalan untuk mengurangi deforestasi tingkat kabupaten. Mencegah dan mengurangi perubahan lahan yang kontroversial dan deforestasi tidak akan mungkin dilakukan jika tidak menangani perluasan perkebunan dan pertambangan. Kasus ini menyoroti bahwa menetapkan masyarakat lokal sebagai kelompok sasaran secara politis lebih mudah dibandingkan dengan mengatasi kekuasaan pendorong deforestasi skala besar yang terkait dengan ambisi pertumbuhan nasional¹⁰².

3.2.2 Persyaratan pembayaran

Persyaratan dalam program REDD+ mengacu pada gagasan bahwa pembayaran diberikan kepada penerima berdasarkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan REDD+. Pendekatan berbasis kinerja ini makin menentukan program-program REDD+ dan sangat menarik bagi para donor sebagai kontrak anggaran pembangunan. Akan tetapi, perlunya persyaratan kinerja yang merupakan ciri yang diunggulkan dari REDD+, masih terus diperdebatkan. Sebagai contoh, transfer tunai bersyarat dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan transfer tunai tanpa syarat. Meskipun yang terakhir lebih adil, skema pembayaran yang tidak berdasarkan kondisi masih bisa efektif jika dianggap adil.

Selain itu, bantuan tunai tanpa syarat juga dipandang lebih adil dibandingkan dengan bantuan tunai bersyarat. Terakhir, ada juga implikasi efisiensi yang perlu dipertimbangkan sebagai kriteria persyaratan yang lebih jelas untuk dapat meningkatkan efektivitas atau kriteria kelayakan yang lebih kompleks untuk memastikan hasil kesetaraan yang memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk diimplementasikan dan dipantau¹⁰³.

Pembayaran bersyarat sedikit lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembayaran tanpa syarat [Studi Kasus]

Rancangan skema pembayaran mempengaruhi persepsi penerima manfaat mengenai upaya dan kesetaraan. Adanya persyaratan terbukti dapat memberi hasil yang lebih baik. Sebuah eksperimen yang menilai persepsi individu mengenai upaya konservasi dan kesetaraan tingkat masyarakat di bawah empat desain PES yang berbeda di delapan desa di barat laut Vietnam menemukan bahwa

Bersambung ke halaman berikutnya

102 Thaler, G.M., Anandi, C.A.M., 2017. Shifting cultivation, contentious land change and forest governance: the politics of swidden in East Kalimantan. *The Journal of Peasant Studies* 44, 1066–1087. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1243531>

103 Loft L, Gehrig S, Le DN and Rommel J. 2019. Effectiveness and equity of Payments for Ecosystem Services: Real-effort experiments with Vietnamese land users. *Land Use Policy* 86:218-28. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.010>

dua jenis pembayaran bersyarat yang hanya didasarkan pada kompensasi dan yang didasarkan pada penyediaan jasa ekosistem sebenarnya menghasilkan efektivitas lingkungan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tanpa syarat dan pembayaran terdiferensiasi. Sebuah desain dengan pembayaran yang berbeda yang hanya bergantung pada kontribusi terhadap upaya individu dianggap sebagai yang paling adil dan lebih efektif dibandingkan dengan desain lain dalam memotivasi upaya konservasi. Sementara itu, usaha konservasi di bawah pembayaran bersyarat, pembayaran yang tidak terdiferensiasi (pembayaran egaliter) telah dipersepsikan tidak secara signifikan berbeda dengan rancangan-rancangan lainnya. Secara umum, dukungan pada ide mengenai desain berkeadilan dan efektif dari PES telah dipengaruhi oleh diferensiasi dan persyaratan pembayaran, dengan persyaratan pembayaran sedikit lebih efektif dan nampak lebih berkeadilan dibandingkan pembayaran tanpa persyaratan. Lebih menjanjikannya lagi, rancangan PES yang berkeadilan dan efektif dapat dilakukan bersamaan¹⁰⁴.

3.2.3 Jadwal pembayaran: kapan manfaat didistribusikan?

Saat distribusi manfaat –pada awal proyek, pada interval proyek yang disepakati atau berdasarkan kinerja yang memadai (misalnya jumlah ton karbon yang disimpan) sangat penting untuk keberhasilan REDD+.

Ada diskusi mengenai apakah pembayaran harus diberikan berjangka atau sekaligus. Bukti dari PES dan program sertifikasi serta standar yang ada menunjukkan bahwa pembayaran di muka yang tidak berbasis kinerja dapat efektif di tingkat lokal karena pembayaran di muka memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam program, termasuk di antara pemangku kepentingan yang lebih miskin dan dapat membantu mengurangi beberapa risiko dan biaya yang dilibatkan^{105,106,107}. Ada juga bukti bahwa pembayaran reguler berdasarkan tolok ukur kinerja yang disepakati dapat memotivasi peserta untuk tetap mempertahankan komitmen mereka terhadap tujuan program. Meskipun pendekatan ini akan meningkatkan biaya keseluruhan, orang mungkin juga akan berpendapat bahwa lebih baik membayar dua kali untuk mendapatkan hasil daripada membayar sekali, tetapi tidak ada hasil¹⁰⁸. Jika pembayaran tidak dipertimbangkan dengan hati-hati dan bertahap sesuai dengan tujuan dan umur proyek, pembayaran memungkinkan memiliki risiko untuk membahayakan hasil dari proyek yang diharapkan.

Dukungan untuk program sesuai preferensi anggota masyarakat Meksiko untuk saat distribusi manfaat [Studi Kasus]

Di komunitas Xmabén dan La Mancolon di Campeche, Meksiko, pembayaran untuk program REDD+ direncanakan sebagai insentif yang dicairkan *ex-ante* untuk menutupi biaya tambahan. Kegiatan REDD+ tidak dimaksudkan memberikan manfaat ekonomi bersih lebih kepada masyarakat lokal, kecuali yang berpotensi diperoleh dari pelaksanaannya, seperti hasil hutan kayu dan non-kayu, kualitas air, dan daging hewan liar. Sementara, masyarakat lokal lebih menyukai manfaat uang perorangan yang dicairkan *ex-post* dalam satu kali angsuran tahunan. Mereka juga

Bersambung ke halaman berikutnya

104 Loft, L., Gehrig, S., Le, D.N., Rommel, J., 2019. Effectiveness and equity of Payments for Ecosystem Services: Real-effort experiments with Vietnamese land users. *Land Use Policy* 86, 218–228. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.010>

105 Loft, L., Pham, T.T., Luttrell, C., 2014. Lessons from Payments for Ecosystem Services for REDD+ Benefit-Sharing Mechanisms. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/004488>

106 Angelsen A. 2017. REDD+ as result-based aid: General lessons and bilateral agreements of Norway. *Review of Development Economics* 21(2):237-64. <https://doi.org/10.1111/rode.12271>

107 Tjajadi, J.S., Yang, A.L., Naito, D., Arwida, A.L., 2015. Lessons from environmental and social sustainability certification standards for equitable REDD+ benefit-sharing mechanisms. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/005587>

108 Angelsen A. 2017. REDD+ as result-based aid: General lessons and bilateral agreements of Norway. *Review of Development Economics* 21(2):237-64. <https://doi.org/10.1111/rode.12271>

bersedia menerima manfaat non-tunai yang dicairkan *ex-ante*, tetapi hanya sebagai sarana untuk mendukung kegiatan pertanian secara perorangan. Akan tetapi, dukungan masyarakat untuk program lain yang mencakup dukungan keuangan perorangan yang dicairkan setiap bulan menunjukkan bahwa mungkin dukungan untuk program REDD+ lebih besar, jika waktu distribusi manfaat selaras dengan preferensi peserta¹⁰⁹.

3.2.4 Siapa saja penerima manfaat dan bagaimana mengidentifikasinya?

Kriteria berbasis kinerja

Karena REDD+ melibatkan pembayaran berbasis kinerja, kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan kelompok sasaran dapat bergantung pada faktor-faktor seperti praktik pengelolaan hutan atau peran dalam memfasilitasi atau memungkinkan pelaksanaan REDD+.

Kriteria kelayakan menjadi bumerang bagi pemangku hutan yang baik di Vietnam [Studi Kasus]

Dalam program Pembayaran Jasa Ekosistem Hutan (PFES) nasional Vietnam, mereka yang telah mengelola hutan selama 20 tahun terakhir tidak memenuhi syarat untuk menerima PFES karena hanya ada sedikit atau tidak ada tambahan dari kegiatan BAU dari pelaku emisi rendah¹¹⁰. Hal ini mengabaikan upaya pemangku hutan yang selama ini mendukung konservasi hutan dan menciptakan insentif yang buruk bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan yang mengeluarkan emisi karena hanya dengan demikian mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan REDD+. Alih-alih melindungi hutan, kelompok-kelompok ini kini menjadi aktor utama di balik deforestasi dan degradasi hutan. Pendekatan REDD+ yang terlalu didasarkan pada efektivitas dan efisiensi mengabaikan pertimbangan kesetaraan. Program tidak boleh memprioritaskan pengurangan emisi secara ketat berdasarkan kriteria kelayakan yang tidak adil dalam pemenuhan tujuan dan manfaat, karena seperti di banyak negara penduduk di daerah terpencil telah memainkan peran penting dalam perlindungan hutan¹¹¹.

Siapa sebenarnya yang diuntungkan?

Dengan manfaat REDD+ yang mengalir ke negara, ada pertanyaan yang cukup sentral seputar siapa yang sepatantasnya menerima manfaat tersebut.

Analisis praktik dan diskusi ini mengenai pembagian manfaat REDD+ mengidentifikasi enam alasan untuk memilih penerima manfaat, yaitu:

- Mereka yang memiliki hak hukum terkait pengurangan emisi karbon;
- Mereka yang mengurangi emisi;
- Penjaga dan pemangku hutan;
- Mereka yang mengeluarkan biaya-biaya;
- Fasilitator implementasi REDD+ yang efektif;
- Orang miskin.

Kelompok-kelompok ini tidak eksklusif dan setiap proyek REDD+ dapat menguntungkan banyak kelompok.

109 Špirić J, Reyes AE, Rodríguez ML and Ramírez MI. 2021. Impacts of REDD+ in Mexico: Experiences of Two Local Communities in Campeche. *Sociedad y Ambiente* (24):1-33. <https://doi.org/10.31840/sya.vi24.2387>

110 Pham TT, Di Gregorio M, Carmenta R, Brockhaus M and Le DN. 2014. The REDD+ policy arena in Vietnam: participation of policy actors. *Ecology and Society* 19(2): 22. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-06389-190222>

111 Loft L, Le DN, Pham TT, Yang AL, Tjajadi JS and Wong GY. 2017. Whose equity matters? National to local equity perceptions in Vietnam's payments for forest ecosystem services scheme. *Ecological Economics* 135:164-75. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.016>

Mereka yang memiliki hak hukum atas pengurangan emisi karbon [Studi Kasus]

SIAPA: Mereka yang memiliki klaim atau hak hukum, baik menurut undang-undang atau adat, atas manfaat apa pun yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon.

MENGAPA: Berdasarkan teori keadilan libertarian, yaitu siapa yang pertama dia yang dapat. Sumber daya alam adalah milik mereka yang pertama menemukan, memenduduki atau mengolahnya.

DIMANA: Sentimen ini sangat terasa di Tanzania dan Brasil, mungkin merupakan cerminan bahwa hak atas tanah dan sumber daya hutan lebih jelas didefinisikan di negara-negara ini.

TANTANGAN/IMPLIKASI: Jika karbon dan/atau hak atas tanah tidak pasti (seperti yang terjadi di banyak negara REDD+), maka hak hukum juga tidak. Manfaat atas dasar hak legal juga dapat lebih merugikan pengguna hutan miskin yang jarang memiliki hak yang diakui secara hukum atas tanah dan/atau hasil hutan, sering kali karena tingginya biaya untuk mendapatkan pengakuan hukum¹¹².

Mereka yang mengurangi emisi [Studi Kasus]

SIAPA: Pengelola hutan, masyarakat lokal, dan perusahaan.

MENGAPA: Penghargaan berdasarkan prestasi harus didistribusikan kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan.

DI MANA: Ketika diajukan pertanyaan dalam survei apakah “keuntungan REDD+ seharusnya memberi penghargaan kepada industri/perusahaan skala besar karena mengurangi emisi hutan”, banyak kelompok pribumi dan tradisional Brasil khawatir bahwa “pelaku kriminal” akan diberi imbalan, mengingat banyak deforestasi dilakukan oleh pemilik lahan hutan luas yang tidak mematuhi Undang-undang Hutan Nasional atau tidak memiliki sertifikat tanah yang layak. Di sisi lain, di Indonesia, pertanyaan ini mendapat dukungan kuat di antara responden pemerintah dan swasta, tetapi hanya sekitar setengah dari responden LSM/penelitian.

TANTANGAN/implikasi: Pada konteks tertentu, pengurangan emisi terbesar dapat dicapai oleh perusahaan besar (yang seringkali juga merupakan penghasil emisi yang dominan). Apakah hal tersebut berarti kita memberi mereka penghargaan atas kinerja lingkungan mereka yang buruk di masa lalu?¹¹³

Penjaga dan pemangku hutan [Studi Kasus]

SIAPA: Kelompok masyarakat pribumi atau pengguna hutan lainnya yang memiliki catatan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Dalam pandangan ini, REDD+ memiliki fungsi untuk mengenali upaya yang telah dilakukan di masa lalu dan saat ini, serta untuk mendorong perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Bersambung ke halaman berikutnya

112 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

113 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

MENGAPA: Untuk menghargai pola perilaku yang baik (berbasis prestasi), manfaat harus didistribusikan secara merata di antara semua penyedia jasa terlepas dari tingkat penyediaan layanan (egalitarian) dan mendukung penghuni hutan yang terpinggirkan (berbasis kebutuhan).

DI MANA: Di Peru dan Brasil, manfaat dibagikan kepada orang yang tidak terlibat langsung dalam deforestasi. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mendorong kolaborasi dan menciptakan insentif untuk perlindungan hutan. Di tempat lain, alasan ini tidak banyak dipertimbangkan dalam desain sistem pembagian manfaat di tingkat proyek.

TANTANGAN/implikasi: Dalam situasi yang rendah emisi merupakan hal yang sulit untuk membuktikan dan menghargai pengurangan emisi itu sendiri. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar, emisi akan meningkat di masa depan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya konservasi berkelanjutan yang dapat mengurangi potensi emisi di masa depan¹¹⁴.

Mereka yang mengeluarkan biaya-biaya [Studi Kasus]

SIAPA: pelaksana proyek dan penerima manfaat.

MENGAPA: Berbasis prestasi, manfaat harus seimbang dengan usaha sehingga orang dan/atau perusahaan yang menanggung biaya implementasi, transaksi, dan peluang diberi kompensasi terlepas dari pengurangan emisi yang menjadi tanggung jawab mereka secara langsung. Selain itu, sebagian besar proyek REDD+ berada pada tahap awal penerapan dan menyadari perlunya memberikan insentif kepada para pelaku yang terlibat.

DI MANA: Di Tanzania, banyak proyek REDD+ yang menggabungkan pendanaan di muka sebagai kompensasi untuk input awal, dengan rencana untuk beralih ke pembayaran berdasarkan kinerja. Akan tetapi, insentif keuangan telah meningkatkan harapan. Ada studi yang menunjukkan bahwa pembayaran awal didasarkan pada upaya dan/atau minat dari penduduk desa yang minimal sehingga tidak dapat menjamin perubahan perilaku jangka panjang. Tanpa pembayaran yang berkelanjutan, upaya konservasi desa akan terhenti.

TANTANGAN/implikasi: Pendekatan ini tidak serta merta memungkinkan adanya hubungan langsung antara pembayaran dan pengurangan pada deforestasi dan degradasi hutan. Jika orang dihargai terlepas dari hasil yang ada, mereka memiliki sedikit insentif untuk berkinerja baik. Hal ini juga mengabaikan perbedaan dalam biaya peluang, misalnya juga ada peluang ekonomi yang lebih bernilai di kawasan hutan yang memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi, masyarakat di sekitar kawasan (terutama pada daerah dataran tinggi) akan berpotensi mengalami kerugian lebih besar karena hilangnya mata pencarian dibandingkan dengan masyarakat di hutan rendah karbon¹¹⁵.

114 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

115 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

Fasilitator implementasi REDD+ yang efektif [Studi Kasus]

SIAPA: pelaksana proyek sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah pusat atau daerah, yaitu mereka yang tidak harus berbasis di hutan, tetapi berperan penting untuk pelaksanaan REDD+.

MENGAPA: Perusahaan dan pemerintah harus diberi kompensasi untuk biaya operasional, seperti menyiapkan sistem untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi, serta untuk penegakan.

DI MANA: Pengembang proyek sektor swasta di Indonesia berusaha bernegosiasi untuk memberikan masukan yang membangun untuk kebijakan nasional dalam menetapkan aturan pembagian manfaat, dengan alasan bahwa pengembang proyek memerlukan kompensasi yang memadai agar dapat menutup biaya implementasi dan transaksi yang muncul sebagai akibat dari kegiatan kesiapan REDD+. Di Tanzania, tingkat biaya administrasi yang harus ditanggung oleh organisasi fasilitator merupakan isu utama dalam negosiasi dengan masyarakat.

TANTANGAN/implikasi: Kebutuhan untuk menyeimbangkan pemberian insentif kepada mereka yang memfasilitasi pelaksanaan REDD+ untuk mencapai penerapan yang efektif, tetapi juga menjaga agar tidak mendapat manfaat yang berlimpah tidak terduga.

Orang miskin [Studi Kasus]

SIAPA: Anggota komunitas yang terpinggirkan dan rentan (pada area di suatu wilayah).

MENGAPA: Berdasarkan kebutuhan, yaitu mereka yang paling membutuhkan harus menerima upah/penghargaan yang lebih besar. Berfokus pada emisi karbon dan kompensasi biaya dapat berarti memberi penghargaan kepada pelaku kaya karena mengurangi perilaku ilegal mereka yang dapat memperkuat ketidaksetaraan dan merusak legitimasi moral dan politik REDD+.

DI MANA: Banyak dari mereka yang diwawancarai dalam studi di Brasil dan Indonesia sangat setuju dengan gagasan bahwa REDD+ harus memberi upah/penghargaan kepada masyarakat lokal untuk kegiatan pengurangan emisi.

TANTANGAN/implikasi: Tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya, proyek REDD+ tidak mungkin efektif¹¹⁶.

Pandangan mengenai siapa penerima manfaat program REDD+ bersifat politis, didorong oleh pertimbangan ekonomi di tingkat nasional dan biasanya ditentukan oleh pemerintah [Studi Kasus]

Terlepas dari kesepakatan umum bahwa manfaat REDD+ harus dibagi di antara pemangku kepentingan yang berbeda, ada juga beragam pandangan mengenai siapa yang seharusnya menerima keuntungan REDD+ dan bagaimana seharusnya mereka dibayar. Sebuah makalah yang mengkaji persepsi pemangku kepentingan REDD+ di Brasil, Indonesia, dan Vietnam mengenai berbagai aspek pembiayaan; yaitu siapa yang seharusnya membiayai REDD+ dan siapa yang seharusnya menerima keuntungan REDD+, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat politis

Bersambung ke halaman berikutnya

116 Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52. <https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452>

dan ditentukan pemerintah, didorong oleh pertimbangan berdasarkan tingkat nasional dan terlepas dari narasi pengambilan keputusan partisipatif yang inklusif. Enam penerima manfaat utama diidentifikasi dan dikaji: para pelaku dengan hak hukum; para pelaku yang mengurangi emisi secara sungguh-sungguh; pemangku hutan; pelaku yang menanggung biaya; fasilitator yang efektif untuk implementasi; dan kaum miskin yang terpinggirkan. Di Brasil, Indonesia, dan Vietnam, sebagian besar orang yang diwawancarai setuju bahwa pelaku yang benar-benar mengurangi emisi harus diprioritaskan untuk menerima keuntungan REDD+, dengan konsensus yang berkembang bahwa masyarakat yang miskin dan pelaku yang memiliki hak hukum harus menerima manfaat dari REDD+.

Akan tetapi, di ketiga negara tersebut terdapat perbedaan mengenai cara para pelaku memandang masalah yang berkaitan dengan pembiayaan REDD+. Di Vietnam, sebagian besar responden percaya bahwa manfaat harus dialokasikan kepada para pelaku yang benar-benar mengurangi emisi, dengan banyak pemangku kepentingan menganjurkan agar lebih banyak perhatian diberikan pada pembagian manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu, dan lebih sedikit manfaat yang disalurkan kepada fasilitator. Sebaliknya, di Indonesia dan Brasil, responden kurang yakin bahwa pembayaran berbasis kinerja merupakan cara terbaik. Di Brasil, banyak pemangku kepentingan percaya bahwa fasilitator juga harus menerima manfaat karena peran aktif yang mereka mainkan dalam program REDD+ di negara tersebut.

Karena persepsi dan kebijakan publik tidak selalu selaras dan juga kepentingan politik turut menentukan bagaimana mekanisme pembagian manfaat dan pendanaan REDD+ dirancang dan dilaksanakan, mengatasi kesenjangan pendanaan, dan meningkatkan mekanisme pembagian manfaat saja tidak akan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah juga perlu menangani koordinasi yang lemah antara sektor dan lembaga pemerintah, kepemilikan yang tidak jelas dan penegakan hukum yang lemah; mengenali dan menangani pelaku deforestasi; dan keselarasan yang lebih baik antara tujuan pembangunan nasional tanpa mengorbankan hutan¹¹⁷.

Masyarakat pribumi dan tradisional sebagai penerima manfaat utama dari program Acre REDD Early Movers (REM) [Studi Kasus]

Dalam program REM di Acre, Brasil, 70% hingga 90% dana Jerman langsung disalurkan ke pelaku lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat pribumi dan komunitas tradisional yang bertindak sebagai penjaga konservasi serta petani dan peternak sapi yang mengurangi deforestasi¹¹⁸. Pelajaran dari pengalaman berbagi manfaat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko hasil yang tidak sesuai¹¹⁹. Masyarakat pribumi dan penduduk tradisional secara proaktif dikonsultasikan dan partisipasi mereka dalam kerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu memastikan bahwa pembangunan jalan tidak disertai permukiman liar atau tidak teratur. Program ini juga memiliki fokus yang kuat pada penguatan identitas budaya penduduk melalui penyusunan inventarisasi budaya tradisional dan diseminasi penelitian melalui lima pusat diseminasi budaya yang memiliki tujuan untuk menegakkan nilai identitas budaya dari total 12 suku bangsa yang diakui. Pada akhirnya, upaya ini memiliki dampak positif pada pelaksanaan program dengan menciptakan kekuatan politik

Bersambung ke halaman berikutnya

117 Pham TT, Moeliono M, Yuwono J, Dwisatrio B and Gallo P. 2021. REDD+ finance in Brazil, Indonesia and Vietnam: Stakeholder perspectives between 2009-2019. *Global Environmental Change* 70:102330. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102330>

118 KfW Development Bank. 2017. REDD+ in the State of Acre, Brazil: Rewarding a pioneer in forest protection and sustainable livelihood development. Fact Sheet. Frankfurt: Germany: KfW. Accessed 11 July 2022. <https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/REDD-Early-Movers-Acre-Fact-Sheet.pdf>

119 Duchelle, A., Seymour, F., Brockhaus, M., Angelsen, A., Larson, AM., Moeliono, M., Wong, G.Y., Pham, T.T., Martius, C., n.d. 2019. Forest-based climate mitigation: lessons from REDD+ implementation. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/7428/>

dan sosial yang setiap hari berusaha mencapai hasil yang nyata dan inklusi sosial, sekaligus menghargai hutan yang ada¹²⁰.

Variasi regional dalam penguasaan lahan memengaruhi tingkat manfaat finansial yang diterima di Vietnam [Studi Kasus]

Program Pembayaran Jasa Ekosistem Hutan (PFES) Vietnam sebagian besar dianggap berhasil karena memiliki dampak keuangannya pada penerima manfaat. Akan tetapi, hasil akhir lingkungan dan sosial di antara penerima dana cukup beragam, sebagian besar karena konteks kepemilikan lahan.

Sebagai contoh, di wilayah utara Vietnam di mana orang-orang dialokasikan kurang dari satu hektare hutan, pembayaran PFES berkontribusi kurang dari satu persen dari pendapatan mereka¹²¹. Akan tetapi, di wilayah selatan masyarakat memiliki setidaknya 30 hektare hutan dan PFES dapat berkontribusi hingga 74% dari pendapatan rumah tangga¹²². Perbedaan hasil ini, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan tenurial yang menunjukkan bahwa di dalam suatu negara diperlukan pertimbangan variasi dalam konteks regional selama perancangan program untuk mengidentifikasi penerima keuntungan program utama.

3.2.5 Apa saja jenis biaya, untuk siapa dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan? Berapa biaya dan bebannya?

Untuk penerima manfaat

Jenis beban yang dialami oleh penerima proyek REDD+ (biasanya masyarakat lokal) seringkali berupa biaya tinggi (termasuk biaya peluang dan peningkatan ketidakadilan melalui penangkapan elite) dan hak.

Biaya peluang merupakan hilangnya sumber pendapatan alternatif. Karena cenderung adanya peluang ekonomi yang lebih berharga di daerah hutan yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi, masyarakat yang menerapkan REDD+ lebih sulit mencari sumber pendapatan alternatif dibandingkan dengan masyarakat yang menerapkan REDD+ di hutan rendah karbon di mana tidak ada peluang demikian. Bagi wanita, harapan untuk berpartisipasi pada program REDD+ – meskipun dimaksudkan dengan baik dan dengan tujuan meningkatkan inklusivitas – juga dapat menambah beban dari segi waktu mereka. Konsultasi yang erat dengan penerima manfaat proyek dapat membantu menginformasikan proses perencanaan untuk mengurangi beban yang tidak seharusnya ada pada peserta.

Korupsi dan pengambilan manfaat oleh kelompok elit juga dapat membebani penerima manfaat proyek yang seharusnya. Berbagai bentuk ilegalitas banyak terjadi di sektor kehutanan global sedangkan di banyak negara REDD+ tata kelola hutan lemah dan korupsi oleh pejabat pemerintah dalam hutan komersial merupakan hal yang lumrah. Korupsi paling umum terjadi dalam pengelolaan pendapatan atau alokasi penerima manfaat. REDD+ juga dapat terganggu, terutama jika uang dalam jumlah besar mengalir melalui pasar dan mekanisme keuangan baru yang belum

120 Dengel, C., Horton, J., 2011. Lessons Learned from Implementing the Sustainable Development Program in the State of Acre in Brazil.

121 Pham TT., Chau, N.H., Chi, D.T.L., Long, H.T., Fisher, M.R., 2020. The politics of numbers and additionality governing the national Payment for Forest Environmental Services scheme in Vietnam: A case study from Son La province. FS 379–404. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891>

122 Pham, T.T., Nguyen, T.D., Dao, C.T.L., Hoang, L.T., Pham, L.H., Nguyen, L.T., Tran, B.K., 2021. Impacts of Payment for Forest Environmental Services in Cat Tien National Park. Forests 12, 921. <https://doi.org/10.3390/f12070921>

teruji. Memerangi korupsi dan pengambilan manfaat oleh elite dapat melibatkan penguatan penegakan hukum, meningkatkan upaya pemantauan dan verifikasi serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Di Vietnam, kompensasi REDD+ terlalu rendah untuk bersaing secara efektif dengan biaya peluang [Studi Kasus]

Di Vietnam, masyarakat lokal memandang pemantauan program alokasi lahan hutan sebagai beban karena pembayaran REDD+ terlalu rendah dibandingkan dengan biaya peluang tinggi pendorong deforestasi seperti perluasan pembangkit listrik tenaga air dan pertanian skala besar.

Akibatnya, mereka melihat insentif REDD+ tidak cukup untuk menjaga hutan agar tetap ada. Sebaliknya, jika membandingkan insentif dari REDD+ dengan skema nasional Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan atau *Payment for Forest Environmental Services* (PFES), PFES menjadi lebih penting dan efektif dalam perlindungan dan pembangunan hutan di Vietnam¹²³. Hal ini menandakan bahwa pembayaran program REDD+ harus cukup tinggi untuk dapat bersaing dengan biaya peluang dari pendorong deforestasi dan degradasi hutan¹²⁴.

Risiko beban ganda pada perempuan di Vietnam [Studi Kasus]

Kebijakan dan pendekatan yang dirancang untuk dapat mengatasi perubahan iklim secara tidak langsung dapat meningkatkan ketidaksetaraan gender dan melemahkan hak-hak perempuan jika berakibat meningkatkan beban perempuan. Di Vietnam, wacana sosial mengangkat pentingnya peran tradisional perempuan dalam keluarga, tetapi pemerintah juga mendorong perempuan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses REDD+ dalam pekerjaan kantor dan pembangunan sosial. Pesan ini telah menyebabkan beban ganda bagi perempuan di Vietnam. Kemajuan hak dan kesejahteraan perempuan tidak dapat dilakukan jika tidak melihat adanya dinamika hubungan gender dalam keluarga dan kehidupan kerja yang membutuhkan perubahan sikap dan perilaku oleh laki-laki dan kebijakan yang mengurangi beban perempuan¹²⁵.

Tanggung jawab atas proyek-proyek REDD+ dipandang sebagai beban oleh anggota masyarakat Asháninka, Peru [Studi Kasus]

Sebuah studi yang meneliti proyek REDD+ menemukan bahwa anggota masyarakat pribumi Asháninka, Peru menganggap pengambilan tanggung jawab merupakan beban. Pada komunitas Asháninka, keputusan mengenai pengelolaan lahan dan sumber daya serta keterlibatan dengan pihak luar dimediasi melalui presiden yang dipilih setiap dua tahun sekali.

Akan tetapi, terdapat persepsi di antara anggota masyarakat yang menganggap bahwa mengambil posisi kewenangan administratif merupakan hal yang membebani. Selain tugas

Bersambung ke halaman berikutnya

123 Pham TT, Ngoc TB, Thüner T, O'Connell E. 2021. Payments for Forest Environmental Services in Viet Nam: Strengthening effectiveness through monitoring and evaluation. Info Brief No 327. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/008028>

124 Wong, G.Y., Loft, L., Brockhaus, M., Yang, A.L., Pham, T.T., Assembe-Mvondo, S., Luttrell, C., 2017. An Assessment Framework for Benefit Sharing Mechanisms to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation within a Forest Policy Mix: Assessment Framework for REDD+ BSM. *Env. Pol. Gov.* 27, 436–452. <https://doi.org/10.1002/eet.1771>

125 Pham, T.T., Mai, Y.H., Moeliono, M., Brockhaus, M., 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *Int. Forest. Rev.* 18, 334–344. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>

sehari-hari, pihak berwenang juga harus mengatur prosedur administrasi yang sering menuntut perjalanan ke luar selama beberapa hari. Perjalanan-perjalanan ini sering kali melibatkan biaya sendiri atau seperti pendekatan umum di antara anggota masyarakat, berupa pinjaman dari perusahaan kayu. Tantangan demikian berakibat bahwa pemimpin proyek REDD+ yang kurang terlibat, yang dengan mudah melepaskan tanggung jawab atas urusan setelah tugas mereka selesai. Pemimpin dan figur otoritas dengan kekuasaan atas masalah penggunaan lahan yang tidak termotivasi atau yang dipilih dengan kurang baik dapat mengganggu keberhasilan dari proyek REDD+. Proyek REDD+ harus dirancang dengan hati-hati sehingga agar orang yang termotivasi dan terampil dapat dipilih sebagai pemimpin¹²⁶.

Memerangi korupsi di Kamboja melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) [Studi Kasus]

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menghindari korupsi yaitu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendaftarkan penerima keuntungan, merekonsiliasi transfer keuangan, dan mendokumentasikan dampak untuk pemantauan dan evaluasi.

Penggunaan telepon pintar untuk pengumpulan data telah membuka peluang baru bagi komunitas yang ingin terlibat dalam pemantauan berbasis komunitas di Prey Lang, Kamboja. Bersama jaringan komunitas Prey Lang diadakan lokakarya untuk mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas ilegal yang akan dipantau. Aplikasi telepon pintar kemudian dikembangkan bersama 36 anggota komunitas yang telah terlatih dalam menggunakannya. Anggota masyarakat dari semua jender dan usia, mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar, menghasilkan 10.842 entry data mengenai penebangan liar dan sumber daya hutan. Biaya untuk pemantauan demikian serupa dengan program pemantauan berbasis masyarakat lainnya, tetapi lebih murah dibandingkan dengan pemantauan yang dilakukan oleh rimbawan yang profesional. Dokumentasi yang dikumpulkan sangat berharga, tetapi pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras serta proses validasi data digital akan terus membutuhkan dukungan dari luar. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tanpa banyak pendidikan formal dapat memantau kejahatan hutan dan sumber daya hutan secara efektif menggunakan TIK dan TIK dapat membantu untuk mensistematisasi pengumpulan data¹²⁷.

Untuk pemrakarsa proyek

Pelaksana inisiatif sub-nasional menanggung biaya implementasi baik untuk kegiatan yang mengurangi deforestasi dan degradasi hutan maupun biaya transaksi untuk memperoleh pendanaan karbon. Kurangnya kejelasan mengenai pemicu biaya, bersamaan dengan pengakuan bahwa REDD+ lebih kompleks dan lebih mahal dari yang sudah diperkirakan sebelumnya telah menjadi penghalang untuk meningkatkan program REDD+.

126 Barletti, S. J.P., Begert, B., Guerra Loza, M.A., 2021. Is the Formalization of Collective Tenure Rights Supporting Sustainable Indigenous Livelihoods? Insights from Comunidades Nativas in the Peruvian Amazon. *International Journal of the Commons* 15, 381–394. <https://doi.org/10.5334/ijc.1126>

127 Brofeldt, S., Argyriou, D., Turreira-García, N., Meilby, H., Danielsen, F., Theilade, I., 2018. Community-Based Monitoring of Tropical Forest Crimes and Forest Resources Using Information and Communication Technology – Experiences from Prey Lang, Cambodia. *CSTP* 3, 4. <https://doi.org/10.5334/cstp.129>

Biaya administrasi dan kontrol yang lebih sedikit untuk donor Dana Amazon

Bagi negara donor Dana Amazon seperti Norwegia dan Jerman, menyumbang untuk dana lingkungan tidak datang tanpa biaya administrasi. Dana lingkungan menambah lapisan manajemen lain antara organisasi pembiayaan dan penerima manfaat, sementara dana lingkungan yang terpisah dapat berarti berkurangnya kontrol donor atas alokasi sumber daya. Misalnya, ada ketegangan atas pengeluaran sumber daya keuangan dari sumbangan yang telah didapatkan, dengan organisasi donor mengeluh bahwa pada Desember 2012, dana tersebut hanya menyetujui 36 proyek dan mengucurkan dana sebesar 55 juta dolar AS; kurang dari setengah dari jumlah yang disumbangkan. Sebagian alasannya melibatkan pedoman dan kriteria yang meminta untuk persetujuan proposal proyek, di mana Bank Pembangunan Brasil (BNDES) mengharuskan ketersediaan sumber daya keuangan untuk seluruh jangka waktu proyek. Akibatnya, negara-negara donor mengirimkan 16 juta dolar AS hanya dalam lima donasi dan menekan BNDES untuk dapat mempercepat prosedur persetujuan proyek. Akhirnya, masalah ini dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dan negara-negara donor mampu mengejar keterlambatan dan mengirimkan 654 juta dolar AS pada tahun 2013. Akan tetapi, kasus tersebut menyoroti bagaimana ketegangan dalam administrasi dapat meningkat dan menjadi penyebab frustrasinya negara-negara donor apabila mereka merasa bahwa kondisi mereka tidak terpenuhi.

3.2.6 Struktur pembiayaan kelembagaan

Dana yang terpisah

Uang dapat disalurkan melalui dana yang dikelola secara independen, yang menarik pendanaan dari sektor publik dan sektor swasta yang diperuntukkan tujuan tertentu.

Dana tersebut memiliki hasil yang lebih baik jika memiliki kebijakan alokasi khusus dan Badan pengarah yang terdiri dari pemangku kebijakan yang memutuskan program.

Memang, mekanisme keuangan untuk iklim dapat mengambil manfaat jika tunduk pada lembaga audit internal fungsional di negara.

PERINGATAN

Ada dana yang telah mengimplementasikan strategi pengaman yang ketat untuk dapat menghindari konflik. Akan tetapi, ketatnya persyaratan yang ada dapat mengakibatkan pembatasan partisipasi dari masyarakat pribumi yang dapat berdampak negatif pada legitimasi pengambilan keputusan dalam distribusi keuntungan.

Kurangnya minat sektor swasta dalam berinvestasi untuk konservasi hutan di negara bagian Meksiko karena adanya dukungan berkelanjutan dari industri pendorong deforestasi [Studi Kasus]

Di negara bagian Jalisco dan Chiapas di Meksiko, persaingan antarkepentingan menjelaskan rendahnya minat internasional dalam mendanai upaya konservasi. Program REDD+ Jalisco menetapkan koordinasi antarlembaga termasuk perjanjian kerja sama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi negara bagian untuk mengurangi deforestasi. Meskipun perjanjian tersebut telah dikembangkan dan diimplementasikan, ternyata langkah tersebut tidak cukup mampu mendorong pengurangan deforestasi atau mengendalikan kebocoran. Demikian pula di Chiapas, sebagian besar emisi berasal dari perluasan kawasan pertanian untuk sektor daging sapi, kelapa sawit, dan kopi sementara regulasi kurang berperan.

Upaya negara bagian Chiapas untuk mengatasi deforestasi telah dibatasi oleh rendahnya koordinasi antar sektor dan kepentingan pemerintah nasional dan negara bagian untuk berinvestasi di sektor peternakan dan pertanian di negara bagian, yang mengalihkan sumber daya keuangan dari program lingkungan. Kepentingan yang bersaing untuk konservasi di Jalisco dan Chiapas menyebabkan rendahnya minat donor dan investor internasional untuk program REDD+¹²⁸.

Melalui anggaran pemerintah

Sebuah pertanyaan kunci dalam desain pembagian manfaat REDD+ menyangkut cara pendapatan REDD+ akan dialokasikan oleh pemerintah.

Terdapat dua skenario utama di mana pertanyaan ini relevan dengan REDD+:

- Ketika pemerintah pusat mendapatkan pembayaran dari sumber internasional dan perlu memutuskan bagaimana pembayaran tersebut akan didistribusikan ke tingkat subnasional;
- Ketika pemerintah pusat memperoleh pajak dan iuran yang dikumpulkan dari kegiatan REDD+ dan perlu memutuskan bagaimana mendistribusikannya kembali ke tingkat subnasional.

Menggunakan sistem anggaran yang ada dapat mendorong peningkatan rasa kepemilikan pemerintah dan meminimalkan biaya transaksi. Akan tetapi, ada risiko bahwa pemantauan hanya dilakukan secara independen semu.

Pelajaran dari sektor lain: alokasi pendapatan dalam sumber daya ekstraktif [Studi Kasus]

Sektor industri ekstraktif memberikan pelajaran penting mengenai alokasi pendapatan yang dapat berguna untuk proyek-proyek di REDD+. Gagasan redistribusi pendapatan secara umum diterima di sektor industri ekstraktif (pertambangan, minyak, dan gas), tetapi belum ada kesepakatan mengenai caranya. Pertanyaan yang relevan untuk redistribusi adalah bagaimana pemerintah pusat berbagi pendapatan dari industri ekstraktif dengan pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah mendistribusikan pendapatan di seluruh daerah ekstraktif dan non-ekstraktif. Terdapat dua pembenaran untuk merancang redistribusi pendapatan: "keadilan" dan "kesetaraan". Dalam hal keadilan:

1a. Negara yang mengalokasikan pendapatan secara proporsional dengan tingkat produksi lokal (turunan): Dalam kasus REDD+ hal ini dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh berdasarkan tingkat pengurangan emisi karbon dan dengan demikian serupa dengan pendekatan berbasis kinerja yang menghargai upaya daerah tersebut.

1b. Negara mengalokasikan pendapatan untuk mengkompensasi dampak negatif: Pada kasus sumber daya ekstraktif, hal ini sering dianggap sebagai kompensasi lingkungan dan karena itu akan bervariasi bergantung pada sifat sumber daya. Beberapa contoh: di Peru masyarakat di daerah pertambangan bersaing dengan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya dan terkena dampak langsung. Sementara di Chile sebagian besar pertambangan terjadi di daerah yang jarang penduduk. Di Brasil, sebagian sumber daya ekstraktif terletak di lepas pantai. Dalam kasus REDD+ pendapatan tersebut dapat dirumuskan sebagai kompensasi atas biaya peluang dan biaya implementasi.

128 Stickler C, David O, Chan C, Ardila JP and Bezerra T. 2020. The Rio Branco Declaration: Assessing progress toward a near-term voluntary deforestation reduction target in subnational jurisdictions across the tropics. *Frontiers in Forests and Global Change* 3:50. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050>

Pro:

- Membantu memastikan stabilitas sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan memungkinkan adanya fleksibilitas tentang bagaimana dana dapat dibelanjakan di tingkat lokal;
- Kompensasi atas biaya yang dikeluarkan;
- Mengurangi kemarahan di daerah penghasil;
- Bertindak sebagai insentif untuk produksi.

Kontra:

- Dapat meningkatkan ketidaksetaraan di seluruh negara dan menyebabkan kemarahan daerah non-penghasil tentang ketidakseimbangan regional;
- Memberikan kesempatan untuk alokasi diskresioner oleh pemerintah pusat dan dapat menyebabkan “kutukan sumber daya” lokal dalam hal volume pendapatan yang besar;
- Keputusan mengenai apa yang dimaksud dengan “bagian yang adil” membutuhkan penyelesaian politik yang kompleks;
- Kesepakatan khusus dapat mengurangi legitimasi pemerintah pusat.

2. Beberapa negara mengalokasikan pendapatan secara merata berdasarkan indikator pembangunan.

Di Filipina misalnya, sekitar 40% pendapatan nasional didistribusikan ke pemerintah daerah berdasarkan indikator seperti ukuran populasi atau luas lahan. Negara-negara di mana sumber daya ekstraktif merupakan bagian besar dari anggaran (misalnya Nigeria, Bolivia, Indonesia, dan Meksiko) cenderung mendistribusikan kembali pendapatan secara lebih merata. Berdasarkan studi kasus di Peru dan Bolivia, pengelolaan terpusat dan alokasi pendapatan dari sektor ekstraktif menyebabkan indikator sosial yang lebih baik sedangkan devolusi yang ekstrem mengakibatkan pencarian rente dan konflik. Akan tetapi, belum ada bukti jelas formula redistribusi mana yang paling baik.

Pro:

Pendapatan dapat dialokasikan berdasarkan tujuan pembangunan dan perencanaan pemerintah dan dengan demikian dapat dengan mudah diintegrasikan dalam anggaran atau dialokasikan kepada sektor yang menjadi prioritas.

Kontra:

Ketegangan dapat muncul pada skala dan batasan lokalitas yang seharusnya menerima pendapatan.

Dikutip dari : *Luttrell and Betteridge (2017)*¹²⁹.

Transfer fiskal ekologis domestik India menyarmenunjukkan peluang bagi pemerintah negara bagian untuk melindungi dan memulihkan hutan [Studi Kasus]

Pada tahun 2014, India menciptakan salah satu transfer fiskal ekologis atau *Ecological Fiscal Transfers* (EFTs) pertama di dunia dengan memperhitungkan tutupan hutan dalam rumus penentuan pendapatan pajak yang dapat didistribusikan pemerintah pusat ke 29 negara bagiannya setiap tahun. Tingkat pendanaan yang dipertaruhkan diperkirakan mencapai 6,9 miliar dolar AS hingga 12 miliar dolar AS per tahun antara 2015 hingga 2019¹³⁰. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa pengenalan EFT belum mendorong negara bagian untuk meningkatkan

Bersambung ke halaman berikutnya

129 Luttrell, C., Betteridge, B., 2017. Lessons for multi-level REDD+ benefit-sharing from revenue distribution in extractive resource sectors (oil, gas and mining). Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006385>

130 Bush, J. And Mukherjee, A. 2017. Encouraging State Governments to Protect and Restore Forests Using Ecological Fiscal Transfers: India's Tax Revenue Distribution Reform. Conservation Letter 11, 2. <http://dx.doi.org/10.1111/conl.12416>

anggaran kehutanan mereka, India meningkatkan bagian pendapatan yang diterima negara dari hutan dari 7,5% menjadi 10%. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemerintah negara bagian bahwa meningkatkan tutupan hutan dapat dihargai dengan peningkatan pendanaan¹³¹. Pada akhirnya, pemerintah di negara bagian berpeluang untuk melindungi dan merestorasi hutan sebagai investasi untuk pendapatan negara di masa depan.

Peluang peningkatan koordinasi federal dan negara bagian di Brasil [Studi Kasus]

Di Brasil, promosi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah federal telah berkontribusi pada peningkatan laju deforestasi, sementara pemerintah sub-nasional berupaya memperoleh pendanaan REDD+¹³². Ketidaksiharasan prioritas dan kepentingan REDD+ menyebabkan tidak selarasnya kebijakan federal dan negara bagian dengan beberapa negara bagian di Brasil yang telah mengembangkan kebijakan REDD+ mendahului pemerintah federal. Perlu ada struktur yang lebih efisien dan tidak terlalu birokratis untuk menarik investasi dan memfasilitasi akses ke sumber daya keuangan, terutama oleh masyarakat lokal dan petani kecil yang mengajukan proyek dalam kerangka kerja REDD+ yang resmi seperti Dana Amazon¹³³.

3.2.7 Proses pengambilan keputusan dalam desain dan implementasi

Mekanisme pembagian manfaat harus dapat memastikan proses pengambilan keputusan melibatkan banyak pemangku kepentingan, transparan, dan ada mekanisme pengaduan.

Legitimasi pengaturan pembagian manfaat REDD+ mengharuskan konsultasi inklusif dan partisipasi kelompok yang menganggap diri sebagai pemangku kepentingan, seperti lembaga dan aktor lokal, dan pemimpin tradisional dan pribumi. Sebuah studi banding menemukan partisipasi perempuan dan pemahaman dasar mengenai REDD+ di lima negara (Peru, Brasil, Indonesia, Vietnam, dan Kamerun) hanya sekedar menghadiri pertemuan dan pelatihan, sedangkan kelompok pengguna hutan yang didominasi laki-laki terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pemantauan, dan kegiatan penegakan aturan¹³⁴. Elit lokal di banyak komunitas pedesaan dan hutan juga menguasai akses terhadap informasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan lokal. Akibatnya mereka memperoleh manfaat yang lebih besar dan dengan demikian membatasi kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Proses top-down sering kali berupa penyampaian informasi atau keputusan dan tidak benar-benar melibatkan kelompok lokal dalam pengambilan keputusan. Maka usaha konservasi bisa jadi sia-sia.

131 Busch, J., Ring, I., Akullo, M., Amarjargal, O., Borie, M., Cassola, R.S., Cruz-Trinidad, A., Droste, N., Haryanto, J.T., Kasymov, U., Kotenko, N.V., Lhkagvadorj, A., De Paulo, F.L.L., May, P.H., Mukherjee, A., Mumbunan, S., Santos, R., Tacconi, L., Verde Selva, G., Verma, M., Wang, X., Yu, L., Zhou, K., 2021. A global review of ecological fiscal transfers. *Nat Sustain* 4, 756–765. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0>

132 Santiago I. 2020. REDD+ RORAIMA | Denarium lança política que possibilita a captação de recursos financeiros pela valorização de ativos ambientais. Roraima, Brazil: Roraima government. Accessed 1 November 2020. <http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/2550-redd-roraima-d>

133 Pham, T.T., Moeliono, M., Yuwono, J., Dwisatrio, B., Gallo, P., 2021. REDD+ finance in Brazil, Indonesia and Vietnam: Stakeholder perspectives between 2009-2019. *Global Environmental Change* 70, 102330. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102330>

134 Larson, A.M., Dokken, T., Duchelle, A.E., Atmadja, S., Resosudarmo, I.A.P., Cronkleton, P., Cromberg, M., Suderlin, W., Awono, A., Selaya, G. 2015. The role of women in early REDD+ implementation lessons for future engagement. *International Forestry Review* 17.1. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/ALarson1501.pdf

Partisipasi masyarakat tinggi meskipun agenda dan informasi tidak disampaikan di Kondo, Tanzania [Studi Kasus]

Sebuah studi yang menyelidiki bagaimana pelaku berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proyek percontohan REDD+ di Kondo, Tanzania, mengungkapkan bagaimana partisipasi tidak mendorong pemberdayaan jika struktur dan proses partisipasi memperkuat perbedaan kekuasaan. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bahwa kebijakan global dan nasional dapat memastikan bahwa struktur tata kelola REDD+ memperhitungkan variasi kekuasaan antar pemeran yang beroperasi di tingkat yang berbeda.

Proyek percontohan REDD+ melibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi karena adanya intervensi khusus, termasuk meminta persetujuan dari masyarakat yang berpartisipasi, perencanaan penggunaan lahan, melakukan pembayaran dan memutuskan untuk mengatur pembagian manfaat. Penduduk setempat berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan terpisah untuk membuat keputusan terkait proses. Hal ini memungkinkan penduduk desa untuk mengendalikan sebagian besar keputusan dan menerima informasi yang ada. Secara keseluruhan, sikap terhadap proyek dan pengambilan keputusan merupakan hal yang positif karena tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, ternyata ada beberapa pemimpin desa yang mengambil alih agenda dan pelaksana proyek REDD+ dan pejabat kabupaten yang menghambat pembahasan isu tertentu mengenai REDD+. Ada pemimpin yang menggunakan mandat mereka untuk mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi berdasarkan kepentingan mereka atau menolak untuk mengadakan pertemuan sepenuhnya. Pelaksana proyek dan pejabat kabupaten diberi mandat untuk menyebarkan informasi tetapi memiliki fleksibilitas menentukan jenis informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat lokal. Meskipun ada saran dari Yayasan Satwa Liar Afrika dan pejabat publik untuk membagi 80% manfaat bagi masyarakat, saran ini tidak dibahas selama rapat umum di desa. Yang dibahas adalah penyusunan kriteria untuk melakukan pembayaran dan bagaimana mengalokasikan uang tersebut ke berbagai proyek masyarakat.

REDD+ di Kondo mencontohkan bagaimana struktur tata kelola pada tingkat internasional dan nasional dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sistem desentralisasi di Tanzania membantu penduduk setempat untuk melawan sebagian kekuasaan tingkat yang lebih tinggi dengan memungkinkan mereka untuk memutuskan aturan yang ditawarkan dan secara umum bagaimana program REDD+ harus diatur. Tantangannya adalah bagaimana menangani secara efektif dinamika kekuasaan¹³⁵.

Ruang pengambilan keputusan di Vietnam didominasi oleh lembaga pemerintah: tidak cukup ruang untuk pelaku non-pemerintah

Sebuah studi di Vietnam menemukan bahwa peran dominan lembaga pemerintah untuk membuat kebijakan REDD+ menyisakan ruang politik yang terbatas bagi pelaku non-negaraseperti, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pengaruh pada hasil akhir dari kebijakan. Akan tetapi, dalam konteks yang sangat tersentralisasi inipun, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada ruang politik dalam pengambilan keputusan untuk pelaku di luar negara yang mampu mengusulkan opsi kebijakan alternatif.

Pemangku kepentingan yang utama tidak hadir dalam diskusi utama REDD+, yaitu pelaku yang berkaitan dengan pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan di Vietnam, termasuk produsen pertanian skala besar misalnya, asosiasi kopi dan teh Vietnam, asosiasi perikanan serta

Bersambung ke halaman berikutnya

135 Nantongo, M., Vatn, A., 2019. Estimating Transaction Costs of REDD+. *Ecological Economics* 156, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.08.014>

kayu dan furnitur skala besar perusahaan. Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok ini, kebijakan REDD+ tidak akan mampu mengatasi deforestasi secara efektif. Selanjutnya, tidak ada perwakilan kelompok rentan, seperti masyarakat pribumi dan masyarakat miskin yang dilibatkan dalam proses konsultasi. Organisasi masyarakat seperti serikat pekerja perempuan atau asosiasi petani turut absen dalam pengambilan keputusan REDD+. Kepentingan akar-rumput diharapkan terwakili melalui organisasi massa, tetapi di dalam praktiknya hal ini tidak sering terjadi.

Permasalahan yang ada bukan hanya tiadanya lembaga swadaya masyarakat, tetapi lebih pada proses yang tidak representatif; ada suara (terutama, pelaku negara) diberi bobot yang lebih dibandingkan dengan yang lain (misal LSM). Pertemuan konsultasi, sebagai alat untuk memenuhi persyaratan partisipasi tampaknya kurang efektif dan kurang memadai untuk memasukkan saran dan pendapat dari lembaga swadaya masyarakat internasional dan untuk menghasilkan umpan balik yang serius. Menurut sebagian besar orang yang diwawancarai, pemerintah dan donor mengadopsi proses tata kelola partisipatif terutama untuk memenuhi persyaratan secara internasional. Motivasi yang kurang kuat ini mungkin saja berkontribusi pada ketidakefektifan konsultasi. Akibatnya juga tidak ada cukup insentif bagi pemangku kepentingan untuk mempertahankan keterlibatan dalam proses politik. Memastikan pengambilan keputusan yang inklusif dan bertanggung gugat, memerlukan perubahan tata kelola dari pendekatan tradisional *top-down* menjadi pengambilan keputusan yang lebih partisipatif¹³⁶.

3.2.8 Kerangka pengaman dan pemantauan

Bagaimana orang dilindungi dari resiko?

Kegiatan REDD+ dapat memiliki dampak secara langsung di tingkat lokal, misalnya konflik kepemilikan lahan, akses sumber daya, dan pembayaran yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan efektif untuk menyelesaikan konflik antara pemangku kepentingan dan meningkatkan keberhasilan. Beberapa dana telah menerapkan strategi kerangka pengaman yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan. Meskipun penting, pengamanan yang ketat dapat mengakibatkan pembatasan partisipasi kelompok tertentu, seperti masyarakat pribumi yang dapat berdampak negatif pada legitimasi pengambilan keputusan dalam distribusi manfaat.

Bagaimana menyelesaikan perselisihan: pelajaran dari standar sertifikasi [Studi Kasus]

Berbagai jenis standar sertifikasi sosial dan lingkungan (misalnya Fairtrade, Plan Vivo, dll.) sudah tertanam dalam komunitas, melalui organisasi produsen atau manajer proyek. Selain itu, Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus) yang baru diterbitkan dan diterapkan di Indonesia menegaskan standar baru untuk pembagian manfaat. Pada tahap awal menerima, menanggapi dan menyelesaikan perselisihan secara informal. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pertemuan informal yang teratur. Ketidakepakatan yang paling umum berkaitan dengan pembayaran, masalah kualitas produk serta kegagalan menepati kesepakatan.

Metode tradisional yang digunakan para pemangku kepentingan lokal bisa menjadi pelajaran bagi REDD+. Perselisihan dapat dikelola secara lebih efektif melalui mekanisme penyelesaian konflik tradisional ketika pengadilan memiliki kapasitas terbatas untuk memproses klaim atau tidak dapat menegakkan perintah mereka.

Bersambung ke halaman berikutnya

136 Pham, T.T., Di Gregorio, M., Carmenta, R., Brockhaus, M., Le, D.N., 2014. The REDD+ policy arena in Vietnam: participation of policy actors. *E&S* 19, art22. <https://doi.org/10.5751/ES-06389-190222>

Dewan pemangku Kehutanan atau *the Forestry Stewardship Council* (FSC) menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal, independen, dan terstruktur dengan baik yang berpotensi diadopsi di berbagai tingkat REDD+.

Pemangku kepentingan yang memiliki kekhawatiran mengenai pemegang sertifikat harus menghubungi pemegang sertifikat secara langsung. Jika masalah tidak dapat terselesaikan, pemangku kepentingan dapat menghubungi lembaga sertifikasi, FSC atau Accreditation Service International (lembaga independen yang memberi wewenang dan memantau lembaga sertifikasi dan FSC).

FSC telah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa terikat waktu dan mekanisme daring sehingga para pemangku kepentingan dapat mengajukan dan melacak keluhan dan banding sebagai cara memfasilitasi transparansi.

Studi kasus dari Brasil, Indonesia, dan Malaysia menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan operator hutan dan masyarakat lokal juga memperjelas hak penguasaan lahan.

PERINGATAN

Prosedur formal dapat menjadi penghalang bagi kelompok lokal dan masyarakat pribumi. Peran perantara penting agar dapat memastikan bahwa keluhan, terlepas dari keadaan pemangku kepentingan dapat diterima oleh manajemen. Inisiatif REDD+ harus menghindari prosedur hukum yang legal (yaitu menggunakan istilah hukum, klausa rujukan silang, dsb.) untuk membuat proses lebih mudah diakses oleh non-ahli dan terutama bagi individu lokal dan organisasi kecil¹³⁷.

Memastikan kegiatan REDD+ “tidak merugikan” perempuan [Studi Kasus]

Secara global, kekhawatiran meningkat jika REDD+ tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang peka secara sosial, ada risiko memperkuat struktur sosial dan kelembagaan yang mengabaikan perempuan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan ragam kesetaraan gender di banyak sektor termasuk REDD+, secara historis didominasi laki-laki, meningkatnya tekanan komersial lahan pada hutan dan tertanamnya norma sosial dan budaya serta interpretasi agama yang mungkin beresiko untuk memperburuk ketidaksetaraan gender di masyarakat perdesaan. Seruan “pengarusutamaan gender dalam REDD+” di Indonesia menuntut agar kegiatan “tidak merugikan” perempuan dan memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki.

Kondisi yang memungkinkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan REDD+ mencakup pengakuan hukum atas hak asasi manusia, dukungan keuangan dan teknis untuk pengarusutamaan gender, kehadiran serta partisipasi aktif pelaku negara dan non-negara serta organisasi perempuan dan persyaratan penyumbang untuk mewujudkan kesetaraan gender. Tantangan pengarusutamaan gender dalam REDD+ termasuk lemahnya kerangka hukum nasional mengenai kesetaraan gender, koordinasi yang lemah antara para pelaku, dana yang tidak pasti dan terbatas yang ditujukan untuk mengarusutamakan gender di dalam proses REDD+, norma sosial dan budaya mengenai gender, penegakan hukum yang lemah mengenai gender, proses pembuatan keputusan yang tidak inklusif dan kurangnya tokoh perempuan dan keahlian gender. Pengarusutamaan gender di dalam REDD+ tidak hanya membutuhkan komitmen politik tetapi juga pendanaan khusus; pengakuan atas norma sosial dan budaya, politik dan asimetri kekuasaan; dan intervensi untuk mengatasi dinamika

Bersambung ke halaman berikutnya

137 Tjajadi, J.S., Yang, A.L., Naito, D., Arwida, A.L., 2015. Lessons from environmental and social sustainability certification standards for equitable REDD+ benefit-sharing mechanisms. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/005587>

kekuasaan yang tertanam dalam struktur politik dan sosial. Sementara, tekanan dan pendanaan dari eksternal dapat membantu negara-negara yang mengambil langkah pertama mereka dalam mengarusutamakan gender ke dalam REDD+, koalisi untuk perubahan yang melibatkan lembaga pemerintah yang berpengaruh dan mampu membuat keputusan yang mengikat, dan kehadiran aktif masyarakat sipil juga diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik di lapangan dan mempertahankan gender sebagai prioritas dari politik¹³⁸.

Memburuknya lingkungan dan penindasan sistematis terhadap hak di negara berhutan selama COVID-19 dapat melemahkan perlindungan IPLC [Studi Kasus]

Pandemi COVID-19, telah menuntun pemerintah di negara-negara hutan utama seperti Brasil, Kolombia, Republik Negara Kongo, Indonesia dan Peru untuk fokus pada pemulihan dan ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi dalam prosesnya telah melemahkan atau menghapus perlindungan hukum dan kebijakan untuk masyarakat pribumi. Kebijakan dan praktik yang melanggar hak-hak masyarakat pribumi termasuk perubahan legislatif dan peraturan; pengecualian masyarakat pribumi dari proses pengambilan keputusan; perluasan kegiatan industri; peningkatan perampasan tanah, penambangan liar, dan penebangan liar di dekat wilayah pribumi; dan meningkatnya kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia pribumi.

Proses deregulasi dan kebijakan serta praktik pelanggaran hak akan menjadi lebih buruk jika pemerintah mementingkan pemulihan ekonomi daripada hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah donor dan lembaga pembangunan internasional harus dapat mendorong pemerintah negara-negara dengan hutan tropis tinggi untuk menyediakan, melindungi dan mendanai sistem partisipasi masyarakat pribumi. Sementara, organisasi harus meningkatkan uji tuntas mereka dan sistem perlindungan sosial dan lingkungan terkait, memantau secara ketat dan memberikan pengaduan yang dapat diakses dan mekanisme yang efektif untuk dapat memastikan bahwa perlindungan sosial dan lingkungan telah diterapkan sepenuhnya¹³⁹.

Bagaimana kinerja dan keuangan dipantau?

Akuntabilitas fiskal

Akuntabilitas adalah penerimaan tanggung jawab atas tindakan.

Akuntabilitas juga menyangkut kemampuan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang telah diambilnya atas nama masyarakat. Seorang pelaku dapat disebut akuntabel jika bertanggung jawab untuk transparan mengenai tindakan mereka, dipantau dan dipertanyakan oleh orang lain, dan menerima kritik jika diperlukan. Akan tetapi, banyak individu dan lembaga yang tidak ingin bertanggung jawab. Mungkin karena tekanan dari kelompok kepentingan, karena mengejar tujuan individu, karena tidak memiliki dasar keyakinan yang sama mengenai peran pemerintah atau karena mereka tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana menjadi transparan.

REDD+ menuntut mekanisme akuntabilitas seperti audit sistematis dan pemantauan secara independen serta kepatuhan protokol sehingga dana dapat disalurkan ke tempat yang dimaksudkan.

138 Pham, Thu Thuy, Tran, N.L.D., Nong Nguyen Khanh, N., Nguyen Dinh, T., 2021c. Mainstreaming gender in REDD+ policies and projects in 17 countries. *Journal of Environmental Policy & Planning* 1–15. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1903408>

139 Forest Peoples Programme (FPP). 2021. Rolling back social and environmental safeguards in the time of COVID-19. Report. England: FPP. <https://www.forestpeoples.org/en/rolling-back-safeguards/global>

Redistribusi pendapatan hutan dan satwa liar di Kamerun sebagian besar dianggap tidak efektif [Studi Kasus]

Akuntabilitas fiskal merupakan faktor penting dalam efektivitas instrumen kebijakan. Mekanisme redistribusi pendapatan hutan dan satwa liar di Kamerun sebagian besar dianggap kurang efektif untuk mencapai tujuan kebijakannya karena biaya transaksi yang tinggi, proses birokrasi yang rumit dan tidak jelas, dan kurangnya transparansi dalam transfer fiskal dari tingkat nasional ke tingkat lokal.

Legitimasi mekanisme redistribusi pendapatan dari satwa liar sebagai alat kebijakan dapat ditingkatkan melalui pembentukan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi keuangan partisipatif dengan pengawasan yang dilakukan lebih dari satu pemangku kepentingan, seperti yang diterapkan oleh Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif di Indonesia atau *the Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI)

EITI merupakan standar global untuk transparansi dan akuntabilitas pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor ekstraktif, termasuk minyak, gas, mineral, dan batu bara. Dibentuk oleh koalisi pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, investor, dan organisasi internasional, standar tersebut telah mengembangkan metodologi yang lugas dan fleksibel untuk memantau dan menyalurkan pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah.

Perusahaan wajib melaporkan pembayaran kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan royalti, serta pembayaran dalam bentuk natura. Pada saat yang sama, pemerintah wajib melaporkan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan ekstraktif. Laporan tersebut mencakup pembayaran sub-nasional atau sosial dan/atau komunitas transaksi yang tidak terkait dengan produksi. Kedua laporan ini kemudian dibandingkan dan direkonsiliasi oleh auditor independen dan dipublikasikan dalam laporan publik.

EITI juga mengembangkan mekanisme pengawasan oleh lebih dari satu pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan proses yang baik dan tepat waktu di setiap negara dan untuk memberikan rangsangan debat publik yang lebih besar mengenai bagaimana pendapatan yang terbatas yang dapat dikeluarkan¹⁴⁰.

Pentingnya persepsi kesetaraan – Vietnam [Studi Kasus]

Di banyak Provinsi Vietnam, Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Provinsi atau *Forest Protection and Development Funds* (FPDF) membentuk dan memimpin unit pengelolaan program Pembayaran Jasa Ekosistem Hutan (PFES) tingkat kabupaten, komune, dan desa untuk mendistribusikan pembayaran PFES dan memantau hutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, tingkat pemerintah yang lebih rendah sering kali tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sehingga tidak jelas bagi mereka bagaimana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di tingkat politik yang lebih tinggi. Tidak banyak panduan bagaimana masyarakat atau dewan pengelola desa dapat membelanjakan pendapatan PFES. Demikian pula, di tingkat masyarakat, penyedia jasa ekosistem jarang disertakan dalam pengambilan keputusan pembelanjaan oleh dewan pengelola karena tidak ada proses untuk mengomunikasikan kekhawatiran yang muncul selama implementasi dana provinsi. Implementasi PFES yang multilevel dirancang sebagai proses *top-down* pada seluruh tingkatan. Secara bersamaan, upaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai peran dan tanggung jawab sering kali gagal karena saluran informasi yang kurang efektif, yang memengaruhi penyediaan informasi dan saran secara umum, serta proses penandatanganan kontrak dan pendistribusian pembayaran. Secara keseluruhan, tidak adanya partisipasi *bottom-up* dapat mengakibatkan pengalaman negatif selama proses pertemuan dan penyempurnaan aturan PFES¹⁴¹.

140 Assembe-Mvondo, S., Wong, G., Loft, L., Tjajadi, J.S., 2015. Comparative assessment of forest revenue redistribution mechanisms in Cameroon: Lessons for REDD+ benefit sharing. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/005738>

141 Loft, L., Pham, T.T., Wong, G.Y., Brockhaus, M., Le, D.N., Tjajadi, J.S., Luttrell, C., 2017. Risks to REDD+: potential pitfalls for policy design and implementation. *Envir. Conserv.* 44, 44–55. <https://doi.org/10.1017/S0376892916000412>

Transparansi

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak inisiatif ber-profil tinggi menyoroti meningkatnya kegelisahan atas pengambilan keputusan yang tertutup dan rahasia.

Keterbukaan informasi yang lebih baik, akan membawa beberapa manfaat bagi implementasi keputusan kebijakan REDD+. Ini termasuk:

- Tuntutan akan pemerintahan yang terbuka dan transparan sebagai sarana untuk memberantas korupsi, terutama di negara yang kaya akan sumber daya;
- Transparansi juga penting untuk mencapai keberhasilan dan efisiensi kebijakan publik;
- Pengambilan keputusan yang transparan merupakan hal yang sangat penting untuk persetujuan berdasarkan informasi – inti dari demokrasi perwakilan.

Menegaskan kembali pentingnya transparansi dalam memantau deforestasi: INPE Brasil [Studi Kasus]

Sistem pelacakan deforestasi Brasil jika ditegakkan dengan benar sering dianggap sebagai alasan utama pengurangan dramatis deforestasi Amazon selama beberapa dekade terakhir.

Setara dengan NASA, di Brasil –Institut Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa atau *the National Institute for Space Research* (INPE) telah menggunakan sistem pemantauan satelit sejak 2004 untuk mencatat deforestasi di Amazon Brasil secara langsung. Disebut DETER, sistem ini mengidentifikasi pembukaan hutan baru dan memperingatkan pihak berwenang tentang adanya kemungkinan deforestasi ilegal. Meskipun sistem tersebut tidak mengidentifikasi penyebab deforestasi, penelitian lain menunjukkan sebagian besar ilegal dan dilakukan oleh peternak, penebang, penambang, dan perampas tanah yang mencari keuntungan dari lahan hutan publik. Sistem itu mengirimkan data ke badan penegak hukum lingkungan Brasil setiap dua minggu dan lembaga tersebut dapat mengirimkan tim untuk menghentikan deforestasi ilegal dan mendenda pelaku dalam hitungan hari. Nama-nama orang yang didapati melakukan deforestasi secara ilegal dimasukkan ke dalam daftar publik daring dan rumah jagal dapat memeriksa daftar tersebut untuk memastikan ternak yang diterima tidak secara tidak sengaja bersumber dari area terlarang dan bank dapat menolak kredit kepada mereka yang dituduh melakukan deforestasi ilegal. Sistem pemantauan lainnya termasuk Program Pemantauan Deforestasi Hutan Satelit Amazon Brazil (PRODES) dan Proyek Pemantauan Satelit Deforestasi Amazon, sebuah sistem resolusi lebih tinggi yang juga dioperasikan oleh INPE yang menghasilkan data deforestasi resmi Brasil. INPE telah terlibat dalam lokakarya di Afrika, Asia, dan di negara-negara Amazon lainnya, membagi perangkat lunak dan melatih orang-orang mengenai cara membuat program pemantauan hutan secara mandiri.

Pada tahun 2019, upaya pemantauan INPE mendapat kecaman dari Presiden Bolsonaro yang menyerang program PRODES karena mengindikasikan meningkatnya tingkat deforestasi. Direktur INPE Ricardo Galvão, lalu dipecat. Namun, ditekan oleh opini publik dan investor yang peduli terhadap keberlanjutan, Bolsonaro mengambil beberapa langkah untuk melindungi hutan dengan membentuk Dewan Amazon untuk mengawasi pembangunan berkelanjutan dan memandatkan angkatan bersenjata untuk memerangi kejahatan lingkungan di Amazon¹⁴². Meskipun iklim politik di Brasil tidak bersahabat dengan sistem pemantauan satelit nasional, mempertahankan sistem pemantauan lingkungan INPE dengan transparansi dan otonomi merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keputusan mengenai pengelolaan penggunaan lahan di negara tersebut. INPE juga membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang kehutanan nasional, menciptakan kepercayaan negara dalam perjanjian perdagangan internasional serta membantu menghormati karakter dan otonomi lembaga agar tidak menyerah pada kepentingan kelompok khusus. Studi kasus ini menggarisbawahi perlunya tanggung jawab sosial oleh para ilmuwan dan transparansi penuh data publik¹⁴³.

142 Escobar, H., 2020. Deforestation in the Brazilian Amazon is still rising sharply. *Science* 369, 613–613. <https://doi.org/10.1126/science.369.6504.613>

143 Araujo, R., Vieira, I.C.G., 2019. Deforestation and the ideologies of the frontier expansion: the case of criticism of the Brazilian Amazon monitoring program. *SustDeb* 10, 354–378. <https://doi.org/10.18472/SustDeb.v10n3.2019.27258>

Siapa yang memantau?

Sistem audit legalitas kayu di Indonesia [Studi Kasus]

Sejak tahun 2011, Uni Eropa telah merundingkan perjanjian perdagangan bilateral dengan berbagai negara pengekspor kayu. Hal yang melekat dalam perjanjian adalah sistem hukum yang dirancang untuk mengidentifikasi, memantau dan melisensikan kayu yang diproduksi secara legal, agar mengurangi permintaan Eropa untuk kayu ilegal. Untuk memenuhi persyaratan UE, suatu negara harus melewati beberapa langkah.

Misalnya, di Indonesia, badan verifikasi independen yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan, mengaudit semua operator dalam rantai pasokan: dari hutan hingga titik ekspor. Lisensi legalitas hanya dikeluarkan pada titik ekspor jika semua operator dalam rantai pasokan benar-benar patuh. Masyarakat sipil secara formal telah diintegrasikan ke dalam sistem sebagai pengamat independen. Proses ini telah menjadi kewajiban bagi semua produksi kayu di Indonesia.

Kementerian Kehutanan Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam akreditasi atau audit kepatuhan hukum dan tidak memiliki otoritas untuk menandatangani kepatuhan. Di satu sisi, jarak ini dapat meningkatkan kredibilitas sistem, melewati potensi korupsi atau ketidakpastian implementasi. Di sisi lain, ketika perusahaan mengambil alih Sebagian besar proses audit dan verifikasi, mereka mungkin tidak tunduk pada pengawasan kepentingan publik rutin, seperti oleh audit negara.

Verifikasi dilakukan oleh lembaga verifikasi atau sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, dengan lembaga pemantau independen yang dibentuk secara formal untuk mengawasi sistem legalitas kayu melalui pemantauan praktik oleh pengusaha hutan/industri, dan proses akreditasi dan verifikasi. Misalnya, ada persyaratan administratif dan teknis yang membatasi partisipasi masyarakat sipil yang lebih luas, dan ada keputusan menteri melarang pengamat internasional untuk terlibat dalam pemantauan. Oleh karena itu, pemantauan secara independen hanya dapat dilakukan oleh anggota badan pemantauan independen yang sudah terdaftar. Secara keseluruhan, keberadaan dan peran lembaga pemantau independen dalam sistem legalitas kayu belum sepenuhnya dipahami dan sering dipertanyakan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Terdapat juga beberapa keraguan mengenai ketidakberpihakan mereka. Dengan demikian, bahkan audit independen mungkin tidak akan cukup untuk mengimbangi tekanan politik atau komersial yang kuat pada proses tersebut. Mengembangkan *checks and balances* diperlukan untuk digunakan bersama sistem akuntabilitas pemerintah dan publik yang ada, seperti berbagi pemantauan di antara lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan industri¹⁴⁴.

144 Hasyim, Z., Laraswati, D., Purwanto, R.H., Pratama, A.A., Maryudi, A., 2020. Challenges facing independent monitoring networks in the Indonesian timber legality assurance system. *Forest Policy and Economics* 111, 102025. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102025>

4 Kriteria penilaian hasil

4.1 Efektivitas

Pencapaian tujuan

Efektivitas program REDD+ dapat diukur dengan memeriksa seberapa jauh sebuah proyek berhasil mencapai tujuannya.

Beberapa contoh tujuan antara lain menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, mengurangi kebakaran, dan meningkatkan perlindungan sosial. Agar proyek menjadi efektif, aktivitas terpilih seharusnya bisa mengatasi akar penyebab deforestasi, apakah berarti menargetkan aktor yang menjadi penyebab kunci deforestasi atau program pada kawasan yang menghadapi risiko tertinggi deforestasi dan degradasi.

Proyek REDD+ di Indonesia berlokasi di area dengan manfaat keanekaragaman hayati tinggi, tetapi selalu di area dengan risiko deforestasi terbesar [Studi Kasus]

Di Indonesia, generasi pertama proyek REDD+ berlokasi di tempat yang paling memberi manfaat keanekaragaman hayati walau area tersebut tidak lantas merupakan area yang menghadapi ancaman deforestasi tertinggi meskipun tujuan kunci REDD+ adalah menurunkan deforestasi. Sebuah studi menelaah tumpang tindih spasial antara stok karbon, keanekaragaman hayati, dan proyeksi ancaman deforestasi menemukan bahwa sebagian besar proyek REDD+ di Indonesia terletak di area dengan kekayaan spesies total tertinggi dan ancaman terhadap kekayaan spesies, tetapi dengan densitas karbon lebih rendah dibandingkan kawasan lindung dan hutan tak terlindung. Hampir seperempat area proyek REDD+ berlokasi di tempat ancaman deforestasi diprediksi relatif tinggi; diduga karena peran besar LSM konservasi dalam pengembangan proyek REDD+. Mayoritas area proyek REDD+ bukan di hutan paling terancam. Hal ini menunjukkan bahwa proyek REDD+ di Indonesia bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan program jika berada di lokasi lain.

Penempatan proyek REDD+ generasi pertama di area yang tidak menghadapi ancaman deforestasi tertinggi, membatasi peluang untuk mencapai manfaat terbesar reduksi emisi maupun konservasi keanekaragaman hayati secara efektif. Jika REDD+ dimaksudkan memberi manfaat tambahan bagi iklim dan keanekaragaman hayati, proyek harus fokus pada hutan dengan ancaman deforestasi tertinggi. Hal ini berimplikasi biaya bagi masa depan implementasi REDD+. Riset masa depan seharusnya secara eksplisit menelaah biaya terkait lokasi proyek REDD+ di hutan yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati dalam konteks REDD+ akan memerlukan investasi tambahan¹⁴⁵.

145 Murray, J.P., Grenyer, R., Wunder, S., Raes, N., Jones, J.P.G., 2015. Spatial patterns of carbon, biodiversity, deforestation threat, and REDD+ projects in Indonesia: The delivery of biodiversity benefits in REDD+. *Conservation Biology* 29, 1434–1445. <https://doi.org/10.1111/cobi.12500>

Menyampaikan manfaat

Efektivitas dalam memberikan manfaat terkait bagaimana dan sejauh apa dampak bagi penerima manfaat.

Manfaat bagi pelaku proyek di Peru tidak secara penuh menutupi biaya peluang [Studi Kasus]

Program Transfer Langsung Bersyarat Peru tidak menyediakan kompensasi uang langsung kepada anggota subkomite pemantauan atas upaya mereka; lebih tepatnya, dana yang dialokasikan kepada komunitas untuk konservasi digunakan oleh para anggota subkomite untuk berkaryawisata. Sebuah studi menemukan bahwa satu komunitas, anggota subkomite pemantauan menyatakan ketidakpuasan terhadap manfaat (uang, makanan, dan suplai) yang mereka andalkan dan gunakan untuk kunjungan lapangan karena tiga alasan: kurangnya kompensasi uang untuk waktu mereka; seringnya keterlambatan pencairan dana untuk kegiatan pemantauan; dan sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab pemantauan. Semua yang di wawancara juga menyatakan bahwa mereka harus menerima kompensasi uang untuk pekerjaan mereka karena keterlibatan mereka dalam pemantauan melibatkan waktu yang menyebabkan mereka jauh dari keluarga dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Lagipula, sering terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana untuk pemantauan hutan. Rendahnya tingkat manfaat dan tantangan pencairan dana, berdampak negatif pada kepuasan anggota subkomite lokal, persepsi manfaat, dan kemungkinan kepercayaan pada program REDD+. Agar program REDD+ efektif, manfaat harus cukup memuaskan pelaku proyek serta mengimbangi biaya peluang yang dihadapi dalam mendukung inisiatif REDD+¹⁴⁶.

Manfaat tambahan lain

Efektivitas dalam mencapai manfaat tambahan dipengaruhi oleh lokasi proyek atau fokus geografis.

Persepsi penduduk desa Tanzania tentang manfaat non-karbon sebagai insentif untuk bergabung dengan REDD+ [Studi Kasus]

Di daerah Kilosa, Tanzania, Inisiatif REDD+ memberikan cukup banyak manfaat non-karbon. Rencana Penggunaan Lahan Partisipatif Desa atau *Village Participatory Land Use Plans* (VPLUPs) membantu memfasilitasi implementasi program REDD+, menurut (95,4%) responden. Penduduk menekankan manfaat tambahan yang mereka terima dari program REDD+, seperti kegiatan alternatif yang menghasilkan pendapatan, Pendidikan lingkungan, dan kompor untuk memasak yang lebih baik. satu skema pinjaman disebutkan oleh penduduk desa sebagai salah satu manfaat tambahan utama karena memberi akses pinjaman dan kredit yang dapat digunakan untuk memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan mereka. Penduduk bisa mendapatkan modal keuangan yang dibutuhkan dan peralatan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, memenuhi kebutuhan dasar untuk keluarga, dan membayar kembali pinjaman ketika mereka menjual hasil pertanian selama masa panen.

Bersambung ke halaman berikutnya

146 Kowler, L., Kumar Pratihast, A., Pérez Ojeda del Arco, A., Larson, A.M., Braun, C., Herold, M., 2020. Aiming for Sustainability and Scalability: Community Engagement in Forest Payment Schemes. *Forests* 11, 444. <https://doi.org/10.3390/f11040444>

Meskipun keseluruhan dukungan untuk proyek REDD+ dan manfaat non-karbon yang dihasilkan, ketersediaan manfaat tambahan di masa depan menjadi perhatian. Penduduk menyatakan kekhawatiran ketidakterediaan manfaat non-karbon. Hal ini menjadi masukan untuk meningkatkan ketersediaan pendanaan REDD+ pada masa depan untuk mempertahankan ketersediaan manfaat tambahan. Contohnya, dalam meningkatkan kompor masak, kesediaan penduduk untuk menerima teknologi perlu didukung dengan kebijakan proyek yang dapat ditegakkan dan mempromosikan kompor yang lebih baik. Kecuali tersedianya tahap pendanaan karbon lainnya untuk mempertahankan program REDD+, orang-orang mungkin menjadi kecewa.

Secara keseluruhan, studi menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan manfaat tambahan pada perencanaan, desain, dan implementasi dari REDD+. Inklusivitas NCBs dalam REDD+ akan memastikan penerimaan oleh masyarakat yang menjadi tuan rumah. Memahami sinergi di antara VPLUPs dan REDD+ yang terkait dengan manfaat non-karbon dapat mengarah pada perencanaan, desain, dan implementasi inisiatif yang lebih baik.

Mengukur efektivitas kebijakan

REDD+ secara umum merupakan salah satu instrumen kebijakan dengan perpaduan yang kompleks antara kebijakan hutan dan lahan yang bekerja bersama untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di suatu negara.

Mengukur efektivitas kebijakan melibatkan identifikasi cara untuk mencapai skema REDD+ nasional yang lebih efisien, efektif, dan adil. Kondisi kontekstual khusus negara dan interaksi antara kebijakan yang ada menambah kompleksitas progres pengukuran kebijakan dalam mencapai tujuan REDD+.

Bagaimana pembuat kebijakan membandingkan dan menilai pilihan yang berbeda untuk instrumen REDD+ seperti pembagian manfaat? Penilaian kinerja kebijakan dan pilihan kebijakan merupakan bidang penting yang sedang berkembang. Penilaian kinerja kebijakan menuntut kajian multidisiplin pada tingkat pemerintahan berbeda dan kerangka penilaian yang fleksibel yang dapat menghasilkan pemahaman yang sama mengenai hal yang perlu dinilai.

Keberhasilan bauran kebijakan di Amazon, Brasil [Studi Kasus]

Satu studi mengevaluasi keefektifan kebijakan bauran pada Proyek Pemukiman Berkelanjutan di Amazon (Projeto Sustainable Settlements in the Amazon atau PAS) yang merupakan proyek REDD+ awal yang diluncurkan sepanjang jalan raya trans-Amazon di Amazon Brasil, menemukan bahwa campuran intervensi, termasuk insentif, disinsentif, dan kegiatan pendukung merupakan strategi yang menjanjikan untuk mengurangi tingkat deforestasi di antara pemilik lahan kecil di Amazon. Kajian yang melibatkan 350 peserta di negara bagian Para, dengan hasil utama – penurunan 50% tingkat deforestasi – menunjukkan bahwa kebijakan yang bekerja bersamaan dapat menjadi strategi yang efektif. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa kehadiran pelaku proyek di lapangan selama jangka waktu panjang dan penerapan langkah komando dan kendali secara bertahap di daerah-daerah terpencil mungkin mendukung keberhasilan. Meskipun intervensi kebijakan bauran spesifik ini mungkin tidak sesuai untuk negara lain, pendekatan ini mungkin dapat diterapkan di daerah lain di Amazon Brasil yang berharap dapat mengadopsi proyek REDD+¹⁴⁷.

147 Simonet, G., Subervie, J., Ezzine-de-Blas, D., Cromberg, M., Duchelle, A.E., 2019. Effectiveness of a REDD+ Project in Reducing Deforestation in the Brazilian Amazon. *American Journal of Agricultural Economics* 101, 211–229. <https://doi.org/10.1093/ajae/aay028>

4.2 Efisiensi (Efektivitas Biaya)

Efisiensi mengacu pada biaya relatif setiap opsi untuk mencapai hasil.

Mengingat keterbatasan sumber daya proyek dan anggaran, agar efisien, kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan REDD+ harus dilaksanakan secara tepat waktu dan hemat biaya. Kegiatan harus dapat mengurangi biaya transaksi dan operasional baik tingkat kebijakan maupun proyek, seperti penentuan manfaat sesuai tujuan mekanisme pembagian manfaat atau dengan menggunakan sistem geografis spasial untuk menempatkan proyek-proyek REDD+ di wilayah geografis dengan potensi dampak positif tertinggi.

Pendekatan penargetan spasial untuk mengoptimalkan efisiensi REDD+ di Tanzania [Studi Kasus]

Di Tanzania, Proyek REDD+ tidak harus terletak di daerah dengan kecocokan yang tinggi. Hal ini mempengaruhi efisiensi atau efektivitas biaya untuk memenuhi tujuan proyek REDD+. Sebuah studi yang menggunakan GIS mengidentifikasi daerah potensial untuk REDD+ di daerah dengan biodiversitas tinggi dan angka kemiskinan tinggi melalui kriteria "penargetan yang efisien" seperti kandungan karbon hutan yang tinggi, risiko deforestasi yang tinggi dan kemungkinan biaya rendah. Dengan proyek REDD+, jasa lingkungan utama yang perlu dipertimbangkan adalah stok karbon hutan atau emisi karbon yang dihindari dengan tidak melakukan deforestasi. Semakin tinggi densitas karbon hutan, semakin tinggi pula area tersebut diprioritaskan untuk REDD+. Jadi tujuannya adalah meminimalkan biaya peluang per unit emisi karbon hutan yang tidak terjadi, di mana emisi karbon yang dihindari merupakan fungsi dari densitas karbon dan ancaman deforestasi. Dalam mengidentifikasi daerah berisiko tinggi deforestasi yang melindungi karbon hutan dengan biaya terendah, para peneliti menemukan bahwa lokasi proyek tidak cocok dengan lanskap paling cocok untuk penargetan yang efisien.

Salah satu alasan banyaknya proyek berada di luar kawasan yang paling cocok adalah karena proyek tersebut berfokus pada degradasi hutan atau peningkatan stok karbon hutan dan bukan deforestasi. Mungkin juga pelaku proyek memiliki informasi yang lebih baik tentang ancaman deforestasi dan kemungkinan mitigasi ancaman tersebut di tempat tertentu.

Mengidentifikasi dan memetakan lanskap yang optimal untuk penempatan proyek REDD+ menggunakan GIS dapat membantu pembuat kebijakan, penyandang dana, dan pelaku proyek untuk mempertimbangkan berbagai kriteria yang mencerminkan ekspektasi yang beragam dari REDD+. Penggunaan metode ini dapat meningkatkan peluang pengurangan emisi karbon hutan secara efektif dari segi biaya¹⁴⁸.

Penerapan pendekatan penargetan spasial dalam mengembangkan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas biaya REDD+ di Indonesia [Studi Kasus]

Di seluruh Indonesia, pencegahan perluasan deforestasi di lahan gambut dan menekan degradasi hutan yang disebabkan penebangan kayu merupakan peluang pengurangan emisi yang sangat hemat biaya. Sebuah studi menemukan bahwa untuk mencapai target pengurangan rendah emisi sebesar 25%, pendanaan harus menargetkan deforestasi di kawasan yang dilindungi dan

Bersambung ke halaman berikutnya

148 Lin, L., Sills, E., Cheshire, H., 2014. Targeting areas for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) projects in Tanzania. *Global Environmental Change* 24, 277–286. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.003>

di konsesi kelapa sawit dan kayu agar pengurangan emisi maksimal dengan biaya kumulatif terendah. Namun, untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 75%, para peneliti mengalokasikan dana pada semua strategi, karena tidak ada satu pun strategi yang dapat mengurangi emisi dengan biaya yang efektif di seluruh Indonesia.

Para peneliti menggunakan analisis spasial untuk menilai variasi dalam biaya dan manfaat karbon dari berbagai strategi REDD+ di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong efektivitas biaya strategi REDD+ untuk mengurangi satu metrik ton karbon dan untuk mencapai target emisi menggunakan peta stok karbon, tutupan hutan, lahan gambut dan kesesuaian tanaman pada kelapa sawit, kayu dan izin penebangan, kawasan dilindungi, dan lahan terdegradasi.

Penentuan target spasial untuk mengidentifikasi lokasi dengan prioritas tertinggi untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, memungkinkan alokasi sumber daya REDD+ yang efektif di seluruh Indonesia. Demikian pula kawasan prioritas untuk investasi dapat ditentukan lebih mudah. Jenis analisis spasial ini dapat menginformasikan perencanaan tata guna lahan secara multidisiplin dan memandu implementasi pelaksanaan nasional dan regional menuju kawasan prioritas untuk mencegah kehilangan karbon hutan secara efisien melalui REDD+¹⁴⁹.

Biaya produksi dan biaya peluang

Proyek-proyek REDD+ biasanya dibangun di daerah dengan nilai ekonomi atau produksi tinggi. Untuk meyakinkan pemangku kepentingan dan memperoleh persetujuan, pelaku proyek harus mempertimbangkan manfaat dan biaya bagi peserta agar proyek lebih diterima.

Tingginya biaya peluang bagi penduduk di wilayah Lindi, Tanzania [Studi Kasus]

Dua proyek REDD+ di wilayah Lindi di Tanzania, yaitu TFCG/Mjumita “membuat REDD+ bekerja untuk komunitas dan konservasi hutan di Tanzania” dan proyek REDD+ cagar Hutan Lahan Desa Angai (the Angai Village Land Forest Reserve atau AVLFR), menyoroti sulitnya mengatasi biaya peluang dan menciptakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan alternatif yang sukses dan berkelanjutan.

Proyek tersebut memberikan pembayaran karbon kepada para peserta, yang meskipun banyak diminati ternyata terlalu rendah untuk secara signifikan berdampak pada kemiskinan atau kerentanan. Selain itu, biaya peluang untuk melindungi hutan cukup mahal (berkisar dari 10 dolar AS hingga 20 dolar AS per metrik ton karbon) sehingga hanya masalah waktu sampai penduduk kembali mengubah hutan menjadi pertanian. Tekanan terhadap perlindungan hutan meningkat karena meningkatnya permintaan lahan pertanian dan kenaikan harga tanaman komersial, seperti wijen dan kacang mete.

Selain pembayaran karbon, pelaku proyek menjanjikan mata pencarian alternatif sebagai kompensasi untuk perlindungan hutan, tetapi strategi mata pencarian alternatif ternyata tidak mudah. Usaha memperkenalkan peternakan lebah, pertanian konservasi, peternakan kupu-kupu,

Bersambung ke halaman berikutnya

149 Graham, V., Laurance, S.G., Grech, A. and Venter, O. 2017. Spatially explicit estimates of forest carbon emissions, mitigation costs and REDD+ opportunities in Indonesia. *Environmental Research Letters* 12.

pertanian sayuran, dan pengembangan lahan kayu secara umum kurang memuaskan. Masyarakat peserta proyek REDD+ TFCG/Mjumita, mengangkat sejumlah kekhawatiran mengenai relevansi dan kualitas dukungan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti dukungan teknis dan jasa konsultasi dalam peternakan lebah dan peternakan unggas, yang memiliki keberhasilan yang sangat terbatas. Pemeliharaan unggas dihentikan oleh proyek karena kinerjanya yang buruk dan hubungan yang terbatas dengan tujuan deforestasi yang luas. Akhirnya, di kedua desa, proyek REDD+ gagal menjual kredit karbon melalui pasar.

Mengingat tingginya biaya peluang perlindungan hutan, kegagalan untuk menghasilkan kepastian jangka panjang pembayaran berbasis kinerja serta kegagalan proyek-proyek penciptaan pendapatan alternatif, kemungkinan besar penduduk akan kembali ke praktik penggunaan lahan sebelumnya¹⁵⁰.

Biaya transaksi

Ada perbedaan jenis biaya terkait pelaksanaan REDD+ di suatu negara, yang bisa disebabkan oleh birokrasi (mandat kementerian yang tumpang tindih, peraturan yang bertentangan) atau perbedaan prioritas tujuan REDD+.

Biaya transaksi REDD+ yang tinggi di Indonesia akibat birokrasi dan peraturan yang tumpang tindih [Studi Kasus]

Ada banyak peraturan yang mengatur pelaksanaan REDD+, akan tetapi, peraturan yang dikeluarkan oleh satu kementerian cenderung hanya mengikat kementerian tersebut dan diabaikan oleh kementerian lain. Karena banyak kementerian yang terlibat, koordinasi cenderung menjadi rumit dengan biaya transaksi yang tinggi. Pada tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempromosikan pembangunan hijau dan bertanggung jawab atas Kontribusi Nasional untuk Emisi Perubahan Iklim. Meskipun keduanya berusaha terus menerus untuk bersinergi, penekanan yang berbeda antara tugas masing-masing membatasi pelaksanaan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, masih ada kebutuhan untuk secara efektif mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan melalui klarifikasi peran dan kolaborasi lembaga pemerintah dan kepentingan swasta dalam pelaksanaan proses pasar¹⁵¹.

Prioritas REDD+ dan konteks berbeda dapat menghasilkan jenis biaya transaksi berbeda: RDS Rio Negro, Brasil vs Kilosa, Tanzania [Studi Kasus]

Satu studi yang membandingkan biaya transaksi untuk percontohan REDD+ di RDS Rio Negro di negara bagian Amazonas di Brasil, dan Kilosa di Tanzania, menemukan bahwa struktur pemerintahan yang berbeda dapat menghasilkan biaya transaksi yang berbeda. Biaya unit yang lebih tinggi –biaya per ton untuk pengurangan CO₂– untuk membangun struktur pemerintahan

Bersambung ke halaman berikutnya

150 CIFOR and ICRAF. 2014. *Efficiency (cost-effectiveness)*. CIFOR's Global Comparative Study on REDD+. Accessed January 8, 2023. <https://www.cifor-icraf.org/gcs/knowledge-tree/criteria-for-assessing-outcomes/efficiency-cost-effectiveness/>

151 Boer, H.J., 2018. The role of government in operationalising markets for REDD+ in Indonesia. For. Policy Econ., 86, 4-12. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.004>

lebih tinggi di Kilosa (1,7 dolar AS hingga 1,9 dolar AS per ton dibandingkan dengan 0,5 dolar AS hingga 0,6 dolar AS di RDS Rio Negro). Biaya unit menggunakan struktur tersebut lebih tinggi di RDS Rio Negro (antara 0,9 dolar AS dan 6,4 dolar AS dibandingkan dengan 0,3 dolar AS dan 2,0 dolar AS per ton dari perkiraan CO₂ yang diserap di Kilosa).

Variasi biaya dari kedua percontohan berasal dari perbedaan jenis transaksi yang dilakukan. Contohnya, pemerataan distributif adalah tujuan kebijakan utama untuk proyek REDD+ di Brasil. Pemerintah negara bagian Amazonas bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan sosial masyarakat di Amazon sehingga program di Rio Negro didirikan sebagai program pengembangan sosial dan konservasi tanpa tujuan memperdagangkan karbon.

Program dengan focus pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang luas di pendidikan, kesehatan, manajemen hutan dan perkembangan anak, berdampak pada biaya transaksi. Masyarakat juga harus dilatih dalam berbagai investasi sosial. Akibatnya, biaya per unit penggunaan struktur pemerintahan di RDS Rio Negro membengkak.

Sebaliknya, Kilosa memiliki fokus yang lebih sempit pada karbon, dan dengan demikian, implementasi REDD+ membutuhkan lebih sedikit staf dengan pengetahuan spesifik mengenai pengukuran karbon, manajemen yang kooperatif dan membangun penghasilan alternatif. Perbedaan ini menurunkan unit menggunakan biaya di Kilosa. Karena REDD+ di Kilosa utamanya mengarahkan pada pengaturan transaksi ekonomi dan menempatkan proyek percontohan sebagai peserta di pasar karbon global, yang dibutuhkan lebih berupa proses politik dan masyarakat sipil untuk menentukan siapa yang memiliki karbon, bagaimana kinerja harus dipantau dan diverifikasi dan bagaimana pembayaran harus dilakukan. Hal ini membutuhkan penetapan hak milik, persiapan data dasar, dan pembangunan koperasi karbon yang mengarahkan biaya unit yang lebih tinggi.

4.3 Kesetaraan

Kesetaraan merujuk pada aspek distribusi biaya dan manfaat serta aspek prosedur dalam pengambilan keputusan menurut konteks akses, kekuasaan, dan kemampuan¹⁵².

Kesetaraan dapat berupa:

- Kontekstual/akses
- Prosedural/pengambilan keputusan
- Distribusi

Kontekstual/akses

Kesetaraan kontekstual merujuk pada konteks sosial dan kemampuan.

Memperoleh akses terhadap manfaat REDD+ membutuhkan proses yang sering kali di luar kemampuan masyarakat lokal. Pemerataan kontekstual melibatkan keadaan sebelumnya yang memungkinkan atau menghambat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, akses akan sumber daya, dan manfaat yang dihasilkan. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan konteks sosial dan politik sebagai akar dari ketidakmerataan dalam merancang intervensi REDD+ di tingkat lokal.

152 Angelsen, A. ed., 2009. *Realising REDD+: National strategy and policy options*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Temuan mengejutkan dari Kamerun mengenai kesetaraan kontekstual [studi kasus]

Sebuah studi yang menilai dampak dua proyek dengan pembayaran jasa lingkungan kepada masyarakat (PES/REDD+) mencoba memahami sejauh mana proyek dapat menangani masalah kesetaraan. Ada beberapa temuan yang mengejutkan. Studi yang mengkaji PES (Pembayaran Jasa Ekosistem) Nomedjoh–Nkolenyeng dan proyek REDD+ Ngoyla–Mintom, menemukan bahwa tidak selalu masyarakat pribumi dirugikan oleh proyek dibandingkan kelompok etnis lokal yang dominan ditinjau dari i pemerataan prosedural dan distributif. Masyarakat pribumi Baka mungkin lebih dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari proyek Nomedjoh–Nkolenyeng daripada kelompok etnis dominan lokal (Bantu), sedangkan untuk proyek Ngoyla–Mintom sebaliknya. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor konstektual seperti pendidikan yang rendah dan kurangnya pengalaman sebelumnya oleh masyarakat Baka di Nomedjoh–Nkolenyeng yang mendorong pertemuan yang lebih sensitif, dengan tambahan waktu dan usaha lebih untuk memastikan penduduk desa memahami proyek dan menjelaskan manfaat proyek serta melestarikan hutan.

Selain itu, pada Nomedjoh–Nkolenyeng, proyek sangat didukung oleh LSM pribumi dan “tokoh lokal”, yang meyakini nilai proyek dan karena itu memobilisasi waktu dan pengetahuan untuk memajukan proyek di Desa Baka. Desa Baka di Ngoyla–Mintom tidak memiliki “tokoh lokal”. Studi menggarisbawahi peran faktor konstektual yang berhubungan dengan kemampuan teknis kekuasaan, gender, tingkat pendidikan, dan kekayaan menentukan kemungkinan individu untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proyek¹⁵³.

Kesetaraan kontekstual: potensi hasil distribusi pembagian manfaat berdasar lima alasan berbeda di sebuah desa di DRC [Studi Kasus]

Sebuah studi yang meneliti desa Buya I di DRC mengidentifikasi risiko penting untuk sector-sektor penduduk yang tidak memiliki fitur kontekstual yang diperlukan untuk mendapat manfaat dari implementasi REDD+. Para peneliti mengkaji potensi hasil distribusi pembagian manfaat berdasarkan lima alasan berbeda untuk: 1) aktor dengan hak hukum; 2) aktor yang mencapai pengurangan atau penghilangan emisi; 3) pengelola hutan dengan emisi rendah; 4) aktor yang menanggung biaya; dan 5) masyarakat miskin dan rentan (pendekatan pro-miskin).

Meneliti potensi hasil distribusi dari lima alasan berbeda untuk pembagian manfaat:

Aktor dengan hak legal: Dengan asumsi bahwa hukum adat diakui, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi 2006, hanya pemegang hak yang diuntungkan, mewakili sekitar sepertiga rumah tangga dalam studi kasus.

Aktor yang mencapai pengurangan atau penghilangan emisi: Pemegang hak adalah mereka yang membuka wilayah luas dan yang dapat berpartisipasi dalam peningkatan stok karbon karena mereka memegang hak atas tanah tersebut. Dalam konteks ini skema insentif akan mendorong perubahan perilaku bagi mereka yang berdampak pada keputusan penggunaan lahan.

Pengelola hutan dengan emisi rendah: Manfaat pelestarian hutan rawa di sekitar masyarakat bisa terdistribusi merata di antara warga desa. Namun, karena hutan rawa sudah dikonservasi di bawah BAU, tidak akan ada manfaat tambahan. Potensi penanaman padi di hutan rawa masih merupakan ancaman deforestasi yang perlu dievaluasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

153 Tegegne, Y.T., Palmer, C., Wunder, S., Moustapha, N.M., Fobissie, K., Moro, E., 2021. REDD+ and equity outcomes: Two cases from Cameroon. *Environmental Science & Policy* 124, 324–335. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003>

Aktor yang menanggung biaya: Sebuah analisis yang cermat dari jenis biaya akan diperlukan, dengan biaya langsung lebih mungkin untuk dikompensasi. Biaya tidak langsung seperti berkurangnya lahan yang tersedia untuk disewa oleh pemegang non-hak tidak mungkin dikompensasi.

Masyarakat miskin dan rentan (pendekatan pro-miskin): Hal ini merupakan satu-satunya skema yang berpotensi mengatasi masalah kesetaraan dengan menciptakan kompensasi bagi pemegang non-hak serta masyarakat adat, perempuan, dan migran.

Pada akhirnya, para peneliti menemukan bahwa, setidaknya di DRC, sektor penduduk yang paling diuntungkan dari REDD+ adalah pemegang hak pribumi –yang merupakan minoritas dari keseluruhan populasi– karena perbedaan sosial antara gender dan kelompok etnis. Para peneliti menyarankan manajemen adaptif yang fleksibel dan pendekatan yang sadar akan kesetaraan untuk mendorong perilaku pemegang hak terhadap peningkatan stok karbon dan memberikan manfaat pembangunan bagi mayoritas, termasuk kelompok yang terpinggirkan, untuk mengarah pada distribusi manfaat yang lebih luas.

Diambil dari: Pelletier et al. (2018¹⁵⁴).

Prosedural/pengambilan keputusan

Kesetaraan prosedural merujuk pada partisipasi pengambilan keputusan dan negosiasi kepentingan yang bersaing. Hal ini melibatkan penanganan persepsi keadilan dan legitimasi proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan. Dalam konteks REDD+, kesetaraan prosedural melibatkan penetapan standar yang menghormati prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dan partisipasi masyarakat pribumi dan lokal dalam desain dan implementasi intervensi REDD+.

Proses FPIC yang kompleks di Kamerun justru meningkatkan ketidaksetaraan prosedural [Studi Kasus]

Sebuah studi yang berfokus pada peran kesetaraan membandingkan dua proyek – Nomedjoh–Nkolenyeng PES (Jasa Pembayaran ekosistem) dan proyek REDD+ Ngoyla–Mintom, dalam enam desa di Lembah Kongo Kamerun– menemukan proses FPIC yang lebih kompleks dan memakan waktu, yang dimaksudkan untuk menangani dan mengurangi ketidaksetaraan, sebenarnya dapat memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan. Proyek Ngoyla–Mintom lebih banyak memiliki paparan terhadap proses FPIC daripada proyek Nomedjoh–Nkolenyeng dalam bentuk informasi lebih lanjut, diskusi dan pelatihan tentang proses FPIC. Namun, proyek Ngoyla–Mintom, yang mengadopsi proses FPIC bertingkat yang jauh lebih rumit dan memakan waktu, tidak menunjukkan peningkatan yang nyata dalam jumlah perempuan, pemuda, dan petani migran yang mengaku telah cukup terlibat dalam proses keputusan pemberian persetujuan. Para peneliti menyimpulkan bahwa proses FPIC yang lebih lama dan lebih kompleks memberikan waktu kepada kelompok-kelompok berkuasa untuk memberikan tekanan internal sehingga mereka menang dalam perebutan kepentingan terkait proyek.

Secara keseluruhan, FPIC bukanlah peluru perak. Proyek yang berinvestasi dalam proses FPIC yang jauh lebih kompleks dan memakan waktu daripada yang lain, tidak memiliki hasil yang lebih setara. Bahkan proses FPIC yang sederhana dan baru dapat berdampak positif di lapangan dan

Bersambung ke halaman berikutnya

154 Pelletier, J., Horning, N., Laporte, N., Samndong, R.A., Goetz, S., 2018. Anticipating social equity impacts in REDD+ policy design: An example from the Democratic Republic of Congo. *Land Use Policy* 75, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.011>

mungkin kurang rentan terhadap pengaruh kelompok lokal dibandingkan dengan kelompok yang lebih canggih dan lebih lama. Ke depannya, pedoman FPIC harus dilihat sebagai seperangkat alat kebijakan yang dirancang secara eksternal dengan niat baik untuk upaya pelestarian hutan sembari meningkatkan mata pencarian dengan menggunakan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Berdasarkan penelitian berbasis pengetahuan lokal, pedoman ini harus disesuaikan dengan hati-hati kepada konteks lokal dan proses FPIC harus dirancang agar tidak terlalu rentan terhadap tuntutan kelompok dominan dengan upaya tambahan dilakukan untuk menargetkan mereka yang kurang dominan. Penelitian yang ditargetkan sebelum intervensi kebijakan dapat membantu pelaksanaan untuk lebih memahami ekonomi politik lokal dan, karenanya, mengidentifikasi ketidaksetaraan yang berpotensi untuk diatasi melalui intervensi yang disesuaikan dengan konteks lokal¹⁵⁵.

Distribusi

Kesetaraan distribusi merujuk pada alokasi manfaat dan biaya di antara para pemangku kepentingan melalui penciptaan mekanisme pembagian manfaat. Fokus ada pada keadilan hasil REDD+.

Intervensi REDD+ harus didesain untuk mendorong perubahan perilaku yang dapat mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Ada berbagai tujuan dan alasan tentang siapa yang harus mendapatkan manfaat dari REDD+ dan mengapa mereka harus mendapat insentif. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan diartikan secara berbeda di antara para aktor.

Sulitnya mencapai kesetaraan distribusi untuk masyarakat minoritas Hmong di Laos [Studi Kasus]

Proyek percontohan REDD+ yang disebut CliPAD yang di laksanakan di dua desa di Provinsi Huaphan di utara Laos, yaitu Ban Lao-Khmu dan Ban Hmong, menyoroiti bagaimana kurangnya perhatian terhadap kesetaraan sosial dapat berdampak negatif pada keadilan dan menyebabkan kurangnya dukungan untuk program REDD+ kelompok etnis minoritas. Meskipun pertemuan perencanaan REDD+ dilakukan secara terbuka untuk semua, tanpa memandang ras dan etnis, berbagai kendala sosial menyebabkan penerimaan berbeda antara kelompok etnis berbeda. Banyak orang Hmong terlihat menolak intervensi proyek dengan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan, dan secara keseluruhan, dukungan Hmong untuk proyek REDD+ rendah.

Hubungan etnis, gender, dan sejarah dengan negara merupakan faktor kritis yang membentuk kondisi keadilan prosedural, distribusi, dan pengakuan, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat partisipasi, kepercayaan pada aktor eksternal dan inisiasi dari dua desa studi yang dihuni oleh kelompok etnis dengan identitas kultur sosial yang berbeda dengan negara. Kenyataan bahwa orang Hmong memiliki sejarah, budaya, dan keterlibatan politik yang berbeda diabaikan dalam desain dan implementasi proyek percontohan REDD+, dan lalu menjadi penghalang bagi keterlibatan Hmong dan bertentangan dengan prinsip-prinsip FPIC untuk penentuan budaya sendiri.

Sebagai contoh, penduduk Hmong di Ban Hmong memilih untuk tidak mengikuti pertemuan perencanaan REDD+ karena merasa suara mereka tidak akan didengar dalam keputusan akhir, dan kehadiran mereka dianggap sebagai persetujuan terhadap keputusan yang dibuat

Bersambung ke halaman berikutnya

155 Tegegne, Y.T., Palmer, C., Wunder, S., Moustapha, N.M., Fobissie, K., Moro, E., 2021. REDD+ and equity outcomes: Two cases from Cameroon. *Environmental Science & Policy* 124, 324–335. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003>

sebelumnya. Taktik penduduk untuk menahan diri adalah strategi penolakan terhadap tidak diakuinya hak politik dan penentuan nasib sendiri. Selain itu, penggunaan Bahasa Lao juga merupakan kendala menghadiri dan berpartisipasi secara efektif. Penduduk Hmong berpendapat bahwa mereka diundang untuk mendengarkan pertemuan yang dilakukan dalam bahasa yang sebagian besar tidak mereka pahami. Akhirnya, kurangnya kepercayaan pada pihak luar dan prosedur kelembagaan, baik pemerintah Laos maupun pihak asing, juga mendorong keputusan penduduk untuk memilih tidak berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan proyek. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat takut hutan mereka diambil alih oleh proyek dan pemerintah.

Proses perencanaan penggunaan lahan dan hutan desa menyebabkan penerapan kebijakan dan aturan formal negara yang sebelumnya kurang dikenal di atas aturan dan praktik tradisional yang informal yang telah ada. Secara keseluruhan, etnis Lao paling setuju dan menerima proyek tersebut dan diikuti oleh Khmu di Ban Lao-Khmu, sedangkan di kalangan etnis Hmong Ban Hmong, proyek hamper tidak mendapat dukungan. Kasus ini menyoroti bagaimana kurangnya hak penentuan budaya dan identitas sendiri, kekuasaan asimetris antara aktor negara dan non-negara, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal, dan kegagalan mengenali struktur dan aturan tradisional menghambat pencapaian kesetaraan distributif¹⁵⁶.

4.4 Legitimasi

Legitimasi suatu proses

Konsensus dan konsultasi mungkin lebih dibutuhkan daripada uang tunai agar REDD+ berhasil.

Penelitian menunjukkan bahwa perwakilan organisasi dan/atau komite partisipan lokal dapat membantu membangun legitimasi, baik dalam prosedur maupun hasil. Komitmen dari perwakilan untuk penciptaan satuan yang benar-benar representatif untuk dialog, berbagi informasi dan berpikir kreatif tentang bagaimana memilih perwakilan secara demokratis juga mendorong proses legitimasi ini. Hal ini melibatkan upaya untuk mempromosikan proses seleksi yang adil dan sah secara lokal untuk perwakilan dan memberikan panduan untuk masyarakat tentang cara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Alur komunikasi yang jelas memfasilitasi pembagian informasi [Studi Kasus]

Di kalangan masyarakat Puerti Ocopa di Peru terdapat pola komunikasi yang jelas seputar kegiatan pemantauan di berbagai tingkatan. Subkomite pemantauan diharapkan untuk sering berkomunikasi dengan komite pemantau, ketua komunitas, dan satuan pemantau lokal, dengan informasi yang juga dibagikan kepada masyarakat luas dalam majelis umum. Contohnya, dalam kasus ancaman lingkungan, subkomite pemantauan melaporkan ancaman kepada kepala komunitas dan jika dibutuhkan kepada organisasi pribumi atau lembaga kehutanan pemerintah terkait. Saluran informasi yang matang ini memungkinkan komunikasi yang lancar antar-aktor dan memfasilitasi berbagi informasi, bahkan dalam menghadapi tantangan pemimpin lokal atau perubahan kepemimpinan¹⁵⁷.

156 Ramcilovic-Suominen, S., Carodenuto, S., McDermott, C., Hiedanpää, J., 2021. Environmental justice and REDD+ safeguards in Laos: Lessons from an authoritarian political regime. *Ambio* 50, 2256–2271. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01618-7>

157 Kowler, L., Kumar Pratihast, A., Pérez Ojeda del Arco, A., Larson, A.M., Braun, C., Herold, M., 2020. Aiming for Sustainability and Scalability: Community Engagement in Forest Payment Schemes. *Forests* 11, 444. <https://doi.org/10.3390/f11040444>

Perempuan terwakili dengan baik dalam proses kebijakan REDD+ di Brasil [Studi Kasus]

Di Brasil, komitmen politik terhadap keterwakilan perempuan di REDD+ sangat kuat, dengan banyaknya perwakilan perempuan di komite REDD+ nasional. Kementerian Lingkungan Hidup Brasil juga telah membentuk komite gender untuk mendiskusikan kesetaraan gender di proyek REDD+. Komite nasional REDD+ Brasil juga memastikan keseimbangan gender di antara perwakilan di semua Dewan Penasihat Tematik REDD+¹⁵⁸. Akan tetapi, Perwakilan politik saja tidak cukup untuk menjamin kesetaraan gender yang sebenarnya. Pembentukan berbagai komite yang didedikasikan untuk kesetaraan dan keseimbangan gender dapat membantu mempromosikan lingkungan di mana perempuan memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka.

Perwakilan politik perempuan saja tidak cukup—diperlukan panduan yang jelas [Studi Kasus]

Tinjauan Bee dan Sijapati Basnett's¹⁵⁹ terhadap desain program REDD+ dalam berbagai negara menunjukkan bahwa gender dipahami sebagai 'kesetaraan partisipasi' perempuan dan laki-laki dalam desain REDD+ sebagai bagian dari bagian dari persyaratan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi. Namun, pemahaman yang jelas tentang apa artinya atau bagaimana mencapai partisipasi yang berarti bagi sejumlah perempuan masih sangat kurang. Ada juga asumsi bahwa partisipasi perempuan secara otomatis mengarah kepada pengaturan pembagian manfaat yang dapat mempromosikan kesetaraan gender. Sebagai bagian dari proses pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD+, setiap negara yang terlibat diharuskan untuk mengumpulkan dan memberikan informasi tentang bagaimana kerangka pengaman, termasuk gender, ditangani dan dihormati. Namun, kurangnya panduan yang jelas tentang bagaimana cara melakukan hal ini berarti bahwa gender ditangani dengan cara reduksionis, dengan gender yang berisiko diberikan item teknis atau politik untuk dicentang dalam kotak centang¹⁶⁰.

Konsultasi

Pengaturan pembagian manfaat berfungsi lebih baik bila dikembangkan melalui proses yang dipandang sah oleh masyarakat. Ketergantungan yang berlebihan pada satu atau dua perwakilan dari masyarakat, dapat dengan cepat menjadi masalah dan mengikis legitimasi proyek.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent* atau FPIC) adalah sebuah prinsip yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan masyarakat hutan. Sebelum pembangunan industri besar (misalnya, kepala sawit, tanaman kayu, atau pertambangan di tanah adat), investor, perusahaan, atau pemerintah harus menyetujui

158 Pham TT, Tran NLD, Nong NKN and Nguyen DT. 2021. Mainstreaming gender in REDD+ policies and projects in 17 countries. *Journal of Environmental Policy & Planning* 23(6): 701-715. DOI: [10.1080/1523908X.2021.1903408](https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1903408)

159 Bee, B.A. and Basnett, S.B., 2017. Engendering social and environmental safeguards in REDD+: lessons from feminist and development research. *Third World Quarterly* 38, 787-804. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1191342>

160 Bee, B.A. and Basnett, S.B., 2017. Engendering social and environmental safeguards in REDD+: lessons from feminist and development research. *Third World Quarterly* 38, 787-804. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1191342>

negosiasi tanpa paksaan yang informatif dengan masyarakat lokal. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mengetahui perubahan penggunaan lahan yang diusulkan, dan dapat menyetujui, memodifikasi, dan menolak kegiatan, perubahan, atau pengaturan pembagian keuntungan. Tetapi, bahkan ketika konsultasi masyarakat dimandatkan, hal ini jarang diterjemahkan menjadi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Konsultasi tidak terjadi, atau jika terjadi, konsultasi hanya melibatkan elit lokal.

Masyarakat pribumi di Acre terwakili dalam proses perencanaan REDD+ [Studi Kasus]

Sistem insentif untuk Jasa Lingkungan Acre (The Acre State System of Incentives for Environmental Services atau SISA), yang disahkan menjadi undang-undang di negara bagian Acre pada tahun 2010, mengakui hak-hak masyarakat pribumi, menetapkan perlindungan sosial dan lingkungan dan berkomitmen untuk pembagian manfaat yang adil. Sebelum ditandatangani menjadi undang-undang, SISA Acre menjalani proses penelitian dan konsultasi ekstensif yang melibatkan masyarakat adat dan penerima manfaat potensial lainnya, serta otoritas negara bagian dan federal juga masyarakat sipil. Pada tahun 2015, setelah lima tahun proses perencanaan, konsultasi, dan verifikasi, Acre menjadi yurisdiksi pertama secara global yang mengembangkan dan menerapkan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (*REDD+ Social and Environmental Standards*) sebagai bagian dari program SISA. SISA juga membentuk mekanisme penting untuk tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan, termasuk Komisi untuk Validasi dan Pemantauan Negara (the State Commission for Validation and Monitoring atau CEVA), sebuah komisi *multistakeholder* yang terdiri atas otoritas publik dan masyarakat sipil, serta Kelompok Kerja Masyarakat pribumi (Indigenous Peoples Working Group atau GTI), yang terdiri dari perwakilan SISA, Yayasan Nasional Indian, Sekretaris Lingkungan Hidup Negara, Institut Perubahan Iklim Acre, Sekretaris Urusan Adat Acre, dan 19 asosiasi masyarakat adat lainnya¹⁶¹.

Pembagian Informasi

Mengingat sifat REDD+ yang kompleks dan abstrak, banyak pelaku proyek menahan informasi untuk menghindari timbulnya harapan yang salah dan kebingungan.

Pelaku proyek REDD+ mungkin tidak menyampaikan semua informasi kepada penduduk lokal untuk menghindari timbulnya harapan yang salah atau kebingungan tentang REDD+. Meskipun pelaku proyek bermaksud untuk tidak memberikan harapan yang salah mengenai REDD+, hal ini tetap membuat masyarakat frustrasi karena informasi yang diberikan sedikit demi sedikit.

Menyelenggarakan lokakarya rutin yang lebih mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu spesifik yang berkaitan dengan desain proyek dapat membantu memastikan bahwa informasi mencapai penduduk lokal yang lebih luas. Pendekatan ini juga mencegah ketergantungan pada perwakilan utama masyarakat lokal yang mungkin gagal mentransfer pengetahuan ke masyarakat mereka.

161 DiGiano, M., Mendoza, E., Ochoa, M., Ardila, J., Oliveira de Lima, F., Nepstad, D., 2018. The Twenty-Year-Old Partnership Between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil.

Usaha lebih untuk menyampaikan informasi agar mendapatkan dukungan bagi proyek REDD+ [Studi Kasus]

Pada proyek REDD+ Alto Mayo Peru, sebuah LSM bermitra dengan pemerintah untuk membuat kesepakatan konservasi dengan pemukim lokal yang menempati kawasan lindung. Jika tidak sepakat, akan diancam dengan pengusiran. Masyarakat lokal awalnya menolak kesepakatan tersebut karena percaya tanah mereka telah dibeli oleh LSM dan mitra perusahaannya. Sebagai tanggapan, LSM melakukan proses berbagi informasi partisipatif yang jauh lebih luas daripada yang direncanakan semula untuk memastikan bahwa masyarakat setempat memahami proyek tersebut. Upaya yang dilakukan oleh LSM meyakinkan banyak orang lokal yang tinggal di daerah tersebut, yang mulai melihat proses tersebut sah dan proyek sebagai pilihan terbaik mereka. Beberapa orang tidak ingin berpartisipasi dalam program karena masih percaya bahwa hak tanah mereka harus diakui, rumah tangga yang telah sepakat bahwa kontrak proyek konservasi diperbarui setiap tahun dan dukungan teknis diberikan untuk meningkatkan produksi kopi dengan imbalan yaitu nol deforestasi¹⁶². Usaha lebih untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memahami proyek dan membuat masyarakat lokal merasa berpartisipasi dapat berkontribusi pada kesuksesan proyek.

Keterbatasan pembagian informasi dapat merusak kepercayaan anggota masyarakat pada program REDD+ di Peru [Studi Kasus]

Sebuah studi yang meneliti masyarakat pribumi di Loma Linda Laguna dan San Pedro de Pichanaz yang terlibat dalam Program Transfer Langsung Bersyarat Peru menemukan bahwa kurangnya penyebaran informasi antara subkomite pemantauan dan mereka yang tidak terlibat langsung pada kegiatan pemantauan. Anggota subkomite mengungkapkan bahwa mereka menahan informasi dari masyarakat luas untuk menghindari kebingungan. Selain itu, Program Konservasi Hutan Nasional hanya menyediakan kesempatan belajar dan pelatihan kepada anggota subkomite pemantauan. Akibatnya, pada majelis umum, mereka yang bukan merupakan anggota subkomite pemantauan tidak terbiasa dengan istilah dan konsep lingkungan yang digunakan oleh anggota subkomite pemantauan. Membatasi pembagian informasi dengan masyarakat luas dan pengembangan kapasitas yang tertutup dapat merusak keterlibatan dan kepercayaan antara masyarakat adat dan program transfer¹⁶³.

Kurangnya saling percaya di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan di Indonesia menghambat inisiatif pendekatan yurisdiksi [studi kasus]

Di Indonesia, elemen paling umum dari inisiatif pendekatan yurisdiksi adalah pembentukan badan multipihak yang mendukung. Ketika forum-forum ini menjadi lebih umum, kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan menghambat berfungsinya kelompok tersebut. Sering kali hal ini dikarenakan konflik sejarah masa lalu atas sumber daya alam.

Sebagai contoh, di Provinsi Riau, banyak organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan pejabat pemerintahan yang memusuhi perusahaan-perusahaan besar di sektor pulp dan kertas yang bertanggung jawab atas perusakan hutan dan lahan gambut skala besar dan konflik sosial

Bersambung ke halaman berikutnya

162 Myers, R., Larson, A.M., Ravikumar, A., Kowler, L.F., Yang, A., Trench, T., 2018. Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects. *Global Environmental Change* 50, 314–324. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015>

163 F. Kowler L, Kumar Pratihast A, Pérez Ojeda del Arco A, Larson AM, Braun C and Herold M. 2020. Aiming for Sustainability and Scalability: Community Engagement in Forest Payment Schemes. *Forests* 11(4):444. <https://doi.org/10.3390/f11040444>

yang terkait hingga saat ini. Terlepas dari keinginan mereka untuk berkontribusi pada inisiatif pendekatan yurisdiksi di provinsi tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut pada awalnya tidak diterima dalam proses *multistakeholder* yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian pula yang terjadi di Provinsi Papua Barat dan Papua, kerjasama antara kelompok masyarakat sipil terhambat oleh perbedaan pendekatan strategis. Meskipun Deklarasi Manokwari berkomitmen untuk melindungi hutan dan hak-hak adat, kelompok konservasi cenderung memprioritaskan pencari perlindungan resmi untuk kawasan hutan yang tersisa untuk melindungi mereka dari konversi menjadi perkebunan skala komersial.

Kelompok-kelompok yang berorientasi pada hak curiga terhadap upaya-upaya tersebut, dan beranggapan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah-wilayah tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu. Kurangnya kepercayaan di antara berbagai elemen masyarakat sipil mungkin telah berkontribusi pada terbatasnya integrasi agenda hak-hak masyarakat adat ke dalam praktik pendekatan yurisdiksi di Indonesia¹⁶⁴. Membangun kelompok dan forum bagi para pemangku kepentingan untuk berinteraksi hanyalah sebuah Langkah awal. Membangun dan memupuk kepercayaan di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan sangat penting untuk melihat kemajuan nyata.

Kolaborasi *multistakeholder*

Kolaborasi antara pemangku kepentingan di pemerintah dan non-pemerintah dipandang sebagai elemen desain yang krusial dari mekanisme pembagian manfaat dalam REDD+.

Ketika sebuah proses melibatkan banyak pemangku kepentingan, proses tersebut memperdalam kolaborasi dan masukan teknis, menguatkan mekanisme komunikasi, mendukung pengembangan kapasitas dan memastikan pemahaman berbagai perspektif, dengan demikian menambah kelalaian.

Proses *multistakeholder* juga dilihat sebagai peningkatan kesetaraan dalam hal partisipasi, serta memastikan distribusi biaya dan manfaat yang adil dan penegakan hak-hak pemangku kepentingan. Memberikan para pemangku kepentingan kemampuan dan kekuatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam program REDD+ dan membentuk rancangan dan hasil membawa peningkatan legitimasi, dan yang penting dalam meningkatkan penerimaan terhadap suatu proses.

Peran pemerintah daerah

Perwakilan warga terdekat adalah pemerintah daerah mereka, yang mungkin ada di berbagai tingkatan, seperti desa, kecamatan, atau kabupaten, bergantung pada negaranya.

Dalam berbagai konteks, pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik yang memiliki kekuatan hukum atau tanggung jawab atas hutan atau lahan. Dalam negara demokrasi, otoritas ini memiliki mandat untuk mewakili dan merespons kebutuhan konstituen. Oleh karena itu, mereka tidak boleh diabaikan oleh inisiatif REDD+.

164 Seymour, F.J., Aurora, L., Arif, J., 2020. The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Front. For. Glob. Change* 3, 503326. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>

Hukum di Tanzania memungkinkan partisipasi lokal yang lebih besar [Studi Kasus]

Partisipasi warga pada pengambilan keputusan pemerintah daerah di Tanzania telah ditingkatkan oleh amendemen Undang-Undang Pemerintah Daerah (Otoritas Distrik) tahun 1982. Undang-undang mengarahkan dewan untuk mengatur dengar pendapat publik bagi orang-orang untuk menandai para pemimpin politik. Undang-undang juga memberikan wewenang bagi dewan untuk membentuk jenis layanan khusus yang terbuka untuk semua warga negara di wilayah tersebut, memberikan kesempatan untuk mempengaruhi penyediaan layanan. Pembuatan anggaran partisipatif telah diizinkan oleh penganggaran dari bawah ke atas melalui komite pembangunan lingkungan, dan telah menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi warga, dengan lebih banyak pemerintahan desa yang lebih besar melalui peningkatan partisipasi lokal, akuntabilitas, dan transparansi¹⁶⁵. Meskipun ketentuan seperti ini tidak jarang terjadi di negara-negara REDD+, inisiatif REDD+ sangat bervariasi dalam keterlibatannya dengan pemerintah daerah.

“Organisasi Perwakilan” di Ucayali Peru, tidak diberi kekuasaan yang cukup [Studi Kasus]

Pada kasus REDD+ di Ucayali, Peru, pelopor proyek menciptakan “Organisasi Perwakilan” yang terdiri atas otoritas masyarakat adat untuk menghindari urusan langsung dengan masyarakat yang lebih luar. Masyarakat setuju karena organisasi perwakilan ini dapat memberikan mereka suara yang akan didengar oleh para pelopor proyek. Solusi ini efisien untuk para pelopor proyek, tetapi hampir tidak efektif bagi masyarakat karena mereka melihat masukan dan perspektif mereka disaring melalui kelompok kecil yang memiliki sedikit kekuatan pengambilan keputusan dan berjuang untuk mengomunikasikan proyek teknis kepada petani lokal yang mereka wakili¹⁶⁶. Organisasi perwakilan perlu diberikan kekuatan pengambilan keputusan dan pelatihan kapasitas sehingga mereka mampu dan memiliki sarana untuk memengaruhi perubahan dalam kelompok, apalagi jika organisasi perwakilan tersebut merupakan bagian dari kelompok yang terpinggirkan.

Meja Bundar untuk Kabupaten Berkelanjutan: Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) di Indonesia

Di Indonesia, sebuah platform baru untuk Kabupaten Hijau muncul pada tahun 2017 ketika delapan kabupaten di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi bersatu untuk membentuk Meja Bundar untuk Kabupaten Berkelanjutan atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Tujuan LTKL adalah menyediakan sebuah platform untuk mendukung pembelajaran silang antarkabupaten yang memiliki visi keberlanjutan dan untuk membangun sistem pendukung untuk mengimplementasikan visi tersebut. Pada acara pertemuan umum, kabupaten anggota menyatakan komitmen mereka dan berbagi wawasan dan pelajaran mengenai bagaimana memajukan tujuan kelestarian lingkungan¹⁶⁷. Karena pertukaran informasi terjadi di antara kabupaten –tingkat pemerintahan dengan akses paling dekat dengan masyarakat lokal– platform ini memunculkan prioritas pemerintah daerah dan konstituen mereka untuk diingat¹⁶⁸, dengan kebutuhan konstituen yang ditangani secara lebih langsung daripada di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya, negara bagian, provinsi, nasional).

165 Kesale, A.M., 2017. Selected experiences of the use of the village assembly in the governance at the grassroots levels in Ludewa district council in Tanzania. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(2), pp.1-11.

166 Myers R, Larson AM, Ravikumar A, Kowler LF, Yang A, Trench T. 2018 Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects. *Global Environmental Change* 50:314-324. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015>

167 Boyd WI, Stickler CL, Duchelle AE, Seymour FR, Nepstad DA, Bahar NH, Rodriguez-Ward DA. 2018 Jurisdictional approaches to REDD+ and low emissions development: Progress and prospects. Washington, DC: World Resources Institute.

168 Seymour, F., Aurora, L., 2019. Moving Forward with the Jurisdictional Approach in Indonesia: Update for JA Proponents.

Komunitas yang terlibat dalam desain dan implementasi

Konsensus dan konsultasi mungkin lebih dibutuhkan daripada uang tunai untuk membuat REDD+ berhasil.

Salah satu tantangan terbesar untuk negara yang ingin mengimplementasikan kegiatan REDD+ adalah mengembangkan struktur kelembagaan yang tepat untuk mendistribusikan manfaat moneter dan non-moneter secara efektif, efisien, dan adil. Agar REDD+ dan PES menjadi efektif, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana manfaat dapat didistribusikan secara adil. Pembagian manfaat harus dianggap adil oleh para pemangku kepentingan – jumlah orang yang mendapatkan kompensasi atas upaya mereka dan bagaimana manfaat didistribusikan – atau hal tersebut akan mengancam legitimasi dan dukungan untuk suatu program. Bahkan ketika pembayarannya rendah, orang masih merasa puas jika legitimasi tercapai.

Memperluas keterlibatan partisipan lokal dalam desain dan pengawasan inisiatif REDD+ dapat meningkatkan dukungan lokal.

Partisipasi perempuan dalam konsultasi pemangku kepentingan harus dipromosikan secara serius dan tidak hanya untuk pemenuhan kuota [Studi Kasus]

Di Vietnam, meskipun banyak proyek dan program REDD+ yang bertujuan untuk menerapkan pendekatan peka gender dalam mengalokasikan manfaat REDD+, sedikit upaya yang telah dilakukan untuk memastikan perempuan memiliki suara dalam mengidentifikasi manfaat yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin menerima. Sejumlah perempuan telah berpartisipasi pada proses REDD+ di Vietnam, tetapi partisipasi mereka dibatasi pada konsultasi, dan gagal memengaruhi kebijakan yang akan keluar. Keterlibatan perempuan harus dipromosikan secara serius, bukan hanya untuk memenuhi kuota. Karena Vietnam telah memiliki banyak perempuan kritis yang bekerja pada isu-isu hutan di tingkat nasional, perlu adanya kebutuhan untuk mendukung pemberdayaan mereka dan membangun kapasitas mereka, sehingga mereka dapat menjadi pejabat dan pembangkit perubahan¹⁶⁹. Partisipasi harus dilihat sebagai proses sosial yang berkelanjutan dan terbuka, bukan sebagai hasil yang dapat diselesaikan.

Persepsi yang beragam tentang program FLA Vietnam karena kurangnya partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan [Studi Kasus]

Program Alokasi Lahan Hutan (*Forest Land Allocation* atau FLA) Vietnam memberikan kepastian kepemilikan bagi pengguna lahan dan bertujuan untuk menyerahkan hak hutan pada masyarakat lokal dan individu untuk mendorong perlindungan dan pembangunan hutan lokal di daerah perdesaan berhutan¹⁷⁰. Bagaimana program ini dipersepsikan bergantung pada siapa Anda berbicara. Ketika pemerintah daerah di Vietnam memiliki persepsi bahwa FLA akan berhasil dalam membatasi praktik perladangan berpindah, masyarakat lokal menganggap program tersebut menjadi beban berat bagi pencarian mereka, sedangkan kompensasi yang diberikan tidak mencukupi¹⁷¹. Kurangnya partisipasi lokal dalam pengambilan

Bersambung ke halaman berikutnya

169 Pham, T.T., Mai, Y.H., Moeliono, M., Brockhaus, M., 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *Int. Forest. Rev.* 18, 334–344. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>

170 Trung LQ, Phuong VT, Yang AL and Hai VD. 2015. The distribution of powers and responsibilities affecting forests, land use, and REDD+ across levels and sectors in Vietnam: A legal study. Occasional Paper 137. Bogor, Indonesia: CIFOR. DOI: [10.17528/cifor/005743](https://doi.org/10.17528/cifor/005743)

171 Pham, T.T., 2013. Payments for forest environmental services in Vietnam from policy to practice. CIFOR, Bogor

keputusan dan konsensus menghambat program dan pembagian keuntungannya mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Sebuah studi menemukan meski pendekatan kesetaraan pembayaran memenuhi interpretasi masyarakat lokal tentang “kesetaraan”, hal itu mengabaikan aspek penting lainnya dari apa yang mungkin dianggap adil. Proyek di masa depan harus mempromosikan keterlibatan masyarakat lokal yang lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk memasukkan interpretasi lainnya mengenai kesetaraan dalam masyarakat karena hal ini dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar. Konsensus dan konsultasi mungkin dapat mengarahkan pada peningkatan proyek dalam bentuk penyesuaian pembayaran yang didasari oleh upaya, dengan mereka yang terlibat dalam kekuatan perlindungan hutan menerima pembayaran yang lebih tinggi sebagai kompensasi; memperhitungkan pencapaian masa lalu yang dicapai oleh masing-masing pengelola lahan dan hutan dalam menyediakan jasa ekosistem; dan menghormati preferensi penduduk lokal dalam pembayaran untuk menghindari kemungkinan penangkapan elit¹⁷².

Kebijakan non-diskriminasi tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi dari kelompok terpinggirkan dalam proses REDD+ [Studi Kasus]

Di Vietnam, saat FPIC diaplikasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan REDD+, hanya sedikit pertimbangan yang diberikan pada heterogenitas masyarakat. Hal ini menjadi jelas selama konsultasi di mana diskusi didominasi oleh pria yang lebih tua dan blak-blakan, peserta dibujuk untuk menyetujui tanpa sepenuhnya memahami REDD+ dan lokasi dan waktu pertemuan tidak cocok untuk banyak wanita. Meskipun sistem pembagian manfaat Vietnam memandatkan non-diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, termasuk masyarakat adat, sistem tersebut gagal untuk memastikan massa perempuan yang kritis untuk secara akurat mewakili pandangan dan kepentingan mereka¹⁷³. Pertimbangan yang cermat harus diambil untuk mempertimbangkan heterogenitas di antara dan di dalam masyarakat karena undang-undang saja terbukti tidak cukup.

Persepsi lokal mengenai manfaat non-karbon membentuk kemauan anggota masyarakat Meksiko untuk melaksanakan kegiatan REDD+ [Studi Kasus]

Di Meksiko, sebuah program dikenalkan pada tahun 2018 yang disebut sebagai Sembrando Vida (Menanam Kehidupan) yang disambut dengan baik oleh dua komunitas yang diteliti. Program Sembrando Vida mendukung pembentukan sistem agroforestri yang dikombinasikan dengan budi daya milpa yang berlangsung selama lima tahun dan mencakup dukungan keuangan individu yang dicairkan setiap bulan (dianggap cukup untuk menutup biaya transaksi dan memberikan manfaat bersih). Selain itu, program ini memungkinkan partisipasi langsung dari non-pemegang hak dengan kontrak hasil atau secara tidak langsung, sebagai buruh harian. Namun, program ini beroperasi secara independen dari kebijakan REDD+ nasional karena dijalankan oleh Kementerian Kesejahteraan dan ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, tidak harus bertujuan mengenai karbon. Namun, penerimaan positif mengenai program ini menunjukkan bahwa penerimaan di masyarakat merupakan faktor penting dalam dukungan dan partisipasi program. Sebagai perbandingan, program REDD+ yang telah berlangsung pada

Bersambung ke halaman berikutnya

172 Wong, G.Y., Loft, L., Brockhaus, M., Yang, A.L., Pham, T.T., Assembe-Mvondo, S., Luttrell, C., 2017. An Assessment Framework for Benefit Sharing Mechanisms to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation within a Forest Policy Mix: Assessment Framework for REDD+ BSM. *Env. Pol. Gov.* 27, 436–452. <https://doi.org/10.1002/eet.1771>

173 Pham, T.T., Mai, Y.H., Moeliono, M., Brockhaus, M., 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *Int. Forest. Rev.* 18, 334–344. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>

dua komunitas masyarakat tidak didukung secara luas oleh anggota dikarenakan ketidaksesuaian dalam waktu manfaat dan penekanan yang berlebihan pada manfaat karbon sehingga merugikan peluang non karbon (misalnya, menghasilkan pendapatan¹⁷⁴).

174 Špirić, J., Merlo Reyes, A.E., Ávalos Rodríguez, Ma.L., Ramírez, M.I., 2021. Impacts of REDD+ in Mexico: Experiences of Two Local Communities in Campeche. *SyA* 1–33. <https://doi.org/10.31840/sya.vi24.2387>

Referensi

- Amazon Fund. n.d. Accessed 11 July 2020. <http://www.amazonfund.gov.br/en/home/>
- Angelsen, A. ed., 2009. *Realising REDD+: National strategy and policy options*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Angelsen A. 2017. REDD+ as result-based aid: General lessons and bilateral agreements of Norway. *Review of Development Economics* 21(2):237–64. <https://doi.org/10.1111/rode.12271>
- Aqil AMI. 2020. *Concerns of transparency, inclusivity raised as One Map nears completion*. Jakarta, Indonesia: The Jakarta Post. Accessed 11 July 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/concerns-of-transparency-inclusivity-raised-as-one-map-nears-completion.html>
- Araújo R, Guimarães Vieira IC. 2019. Deforestation and the ideologies of the frontier expansion: the case of criticism of the Brazilian Amazon monitoring program. *Sustainability in Debate/Sustentabilidade em Debate* 10(3): 354–378. <https://doi.org/10.18472/SustDeb.v10n3.2019.27258>
- Arumingtyas L. 2019. *Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan*. Menlo Park, USA: Monga Bay. Accessed 11 February 2022. <https://www.mongabay.co.id/2019/10/13/pemerintah-bentuk-badan-pengelola-dana-lingkungan/>
- Assembe-Mvondo S, Brockhaus M and Lescuyer G. 2013. Assessment of the effectiveness, efficiency and equity of benefit-sharing schemes under large-scale agriculture: Lessons from land fees in Cameroon. *The European Journal of Development Research* 25(4):641–56. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.27>
- Assembe-Mvondo S, Wong G, Loft L and Tjajadi JS. 2015. *Comparative assessment of forest revenue redistribution mechanisms in Cameroon: Lessons for REDD+ benefit sharing*. Working Paper 190. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005738>
- Barcellos LMB de and Gebara MF. 2020. Climate mitigation or knowledge deprivation? Learning from indigenous socio-environmental funds. *Revista Produção E Desenvolvimento* 6. <https://doi.org/10.32358/rpd.2020.v6.435>
- Barletti JP, Begert B and Loza MA. 2021. Is the Formalization of Collective Tenure Rights Supporting Sustainable Indigenous Livelihoods? Insights from Comunidades Nativas in the Peruvian Amazon. *International Journal of the Commons* 15(1): 381–394. DOI: <http://doi.org/10.5334/ijc.1126>
- Beaudoin G, Rafanoharana S, Boissière M, Wijaya A and Wardhana W .2016. Completing the Picture: Importance of Considering Participatory Mapping for REDD+ Measurement, Reporting and Verification (MRV). *PLOS ONE* 11(12): e0166592. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166592>
- Bee BA, Sijapati Basnett B. 2017. Engendering social and environmental safeguards in REDD+: lessons from feminist and development research. *Third world quarterly* 38(4):787–804. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1191342>
- Benn V, Pham TT, Moeliono M, Maharani C, Thomas R, Chesney P, Dwisatrio B, Ha CN. 2020. *The context of REDD+ in Guyana: Drivers, agents and institutions*. Occasional Paper 201. Bogor, Indonesia: CIFOR. DOI: [10.17528/cifor/007627](https://doi.org/10.17528/cifor/007627)
- Bhomia RK, Nofyanza S, Thürer T, O’Connell E and Murdiyarso D. 2021. *Global Comparative Study on REDD+ story of change: CIFOR’s science on wetlands for Indonesian measurement, reporting and verification and forest reference emission level development*. Info Brief 328. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/008048>

- Boer HJ. 2018. The role of government in operationalising markets for REDD+ in Indonesia. *Forest policy and economics* 86:4–12. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.004>
- Boissière M, Herold M, Atmadja S and Sheil D. 2017. The feasibility of local participation in Measuring, Reporting and Verification (PMRV) for REDD+. *PLOS ONE* 12(5): e0176897. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176897>
- Börner J, Marinho E and Wunder S. 2015. Mixing Carrots and Sticks to Conserve Forests in the Brazilian Amazon: A Spatial Probabilistic Modeling Approach. *PLOS ONE* 10(2): e0116846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116846>
- Boyd WI, Stickler CL, Duchelle AE, Seymour FR, Nepstad DA, Bahar NH, Rodriguez-Ward DA. 2018 *Jurisdictional approaches to REDD+ and low emissions development: Progress and prospects*. Washington, DC: World Resources Institute.
- Brockhaus M, Di Gregorio M and Mardiah S. 2014 Governing the design of national REDD+: An analysis of the power of agency. *Forest Policy and Economics*. 49:23–33. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.003>
- Brofeldt S, Argyriou D, Turreira-García N, Meilby H, Danielsen F, Theilade I. 2018. Community-based monitoring of tropical forest crimes and forest resources using information and communication technology—experiences from Prey Lang, Cambodia. *Citizen Science: Theory and Practice* 3(2):4. DOI: <http://doi.org/10.5334/cstp.129>
- Busch J and Mukherjee A. 2018. Encouraging State Governments to protect and restore forests using ecological fiscal transfers: India’s tax revenue distribution reform. *Conservation Letters* 11(2):e12416. <https://doi.org/10.1111/conl.12416>
- Busch J, Ring I, Akullo M, Amarjargal O, Borie M, Cassola RS, Cruz-Trinidad A, Droste N, Haryanto JT, Kasymov U and Kotenko NV. 2021. A global review of ecological fiscal transfers. *Nature Sustainability* 4(9):756–65. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0>
- Carodenuto S and Buluran M. 2021. The effect of supply chain position on zero-deforestation commitments: evidence from the cocoa industry. *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, 716–731. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1910020>
- Carter S, Herold M, Jonckheere IGC, Espejo AB, Green C and Wilson S. 2021. Capacity Development for Use of Remote Sensing for REDD+ MRV Using Online and Offline Activities: Impacts and Lessons Learned. *Remote Sensing* 13(11):2172. <https://doi.org/10.3390/rs13112172>
- CIFOR and ICRAF. 2014. *Efficiency (cost-effectiveness)*. CIFOR’s Global Comparative Study on REDD+. Accessed January 8, 2023. <https://www.cifor-icraf.org/gcs/knowledge-tree/criteria-for-assessing-outcomes/efficiency-cost-effectiveness/>
- Corruption Eradication Commission (KPK). 2015. *Preventing state losses in Indonesia’s forestry sector*. Indonesia: KPK. Accessed 11 July 2022 <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Preventing-State-Losses-in-Indonesia-Forestry-Sector-KPK.pdf>
- Dengel C and Horton J. 2011. *Lessons Learned from Implementing the Sustainable Development Program in the State of Acre in Brazil*. Washington DC: Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/en/publication/11614/lessons-learned-implementing-sustainable-development-program-state-acre-brazil>
- DiGiano M, Mendoza E, Ochoa M, Ardila J, Oliveira de Lima F and Nepstad D. 2018. *The Twenty-Year-Old Partnership Between Indigenous Peoples and the Government of Acre, Brazil: Lessons for realizing climate change mitigation and social justice in tropical forest regions through partnerships between subnational governments and indigenous peoples*. San Francisco, USA: Earth Innovation Institute (EII). DOI:10.13140/RG.2.2.34535.29609
- Droste N, Lima GR, May PH and Ring I. 2017. Municipal Responses to Ecological Fiscal Transfers in Brazil: A microeconomic panel data approach. *Environmental Policy and Governance* 27(4):378–93. <https://doi.org/10.1002/eet.1760>
- Duchelle AE, Seymour F, Brockhaus M, Angelsen A, Larson A, Moira M, Wong GY, Pham TT and Martius C. 2019. *Forest-based climate mitigation: Lessons from REDD+ implementation*. Issue

- Brief. Washington DC, USA: WRI. <https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation>
- Dupuits E and Cronkleton P. 2020. Indigenous tenure security and local participation in climate mitigation programs: Exploring the institutional gaps of REDD+ implementation in the Peruvian Amazon. *Environmental Policy and Governance* 30(4):209–20. <https://doi.org/10.1002/eet.1888>
- Escobar H. 2020. Deforestation in the Brazilian Amazon is still rising sharply. *SCIENCE* 369(6504): 613. DOI: [10.1126/science.369.6504.613](https://doi.org/10.1126/science.369.6504.613)
- Favretto N, Afionis S, Stringer LC, Dougill AJ, Quinn CH and Ranarijaona HL. 2020. Delivering climate–development co–benefits through multi–stakeholder forestry projects in Madagascar: Opportunities and challenges. *Land* 9(5):157. <https://doi.org/10.3390/land9050157>
- Fujisaki T, Hyakumura K, Scheyvens H and Cadman T. 2016. Does REDD+ Ensure Sectoral Coordination and Stakeholder Participation? A Comparative Analysis of REDD+ National Governance Structures in Countries of Asia–Pacific Region. *Forests* 7(9):195. <https://doi.org/10.3390/f7090195>
- Garcia B, Rimmer L, Vieira LC and Mackey B. 2021. REDD+ and forest protection on indigenous lands in the Amazon. *RECIEL* 30: 207– 219. <https://doi.org/10.1111/reel.12389>
- Government of Brazil. 2016. *The National REDD+ Strategy*. Accessed 22 February 2022 <http://redd.mma.gov.br/en/the-national-redd-strategy>
- Graham V, Laurance SG, Grech A, Venter O. 2017. Spatially explicit estimates of forest carbon emissions, mitigation costs and REDD+ opportunities in Indonesia. *Environmental Research Letters*. 12(4):044017. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa6656>
- Hasyim Z, Laraswati D, Purwanto RH, Pratama AA, Maryudi A. 2020. Challenges facing independent monitoring networks in the Indonesian timber legality assurance system. *Forest Policy and Economics* 111:102025. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102025>
- Hawthorne S, Boissière M, Felker ME and Atmadja S. 2016. Assessing the claims of participatory measurement, reporting and verification (PMRV) in achieving REDD+ outcomes: a systematic review. *PLOS ONE* 11(11): e0157826. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157826>
- Heine D, Hayde E, and Faure MG. 2021. Letting commodity tax rates vary with the sustainability of production. En: World Bank Group (Ed.). *Designing fiscal instruments for sustainable forests*. 145–171.
- Hoare A, Young D, Uehara T, Seidu MK, Birikorang G, Soh LW and Kamga JK. 2020. *Forest sector accountability in Cameroon and Ghana*. Research Paper. London, UK: Chatham House. Accessed 11 July 2022. <https://www.chathamhouse.org/2020/10/forest-sector-accountability-cameroon-and-ghana/about-authors#block-mainnavigation>
- Hund K, Schure JM and van der Goes A. 2017. Extractive industries in forest landscapes: Options for synergy with REDD+ and development of standards in the Democratic Republic of Congo. *Resources Policy* 54:97–108. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.09.011>
- Jagger P and Rana P. 2017. Using publicly available social and spatial data to evaluate progress on REDD+ social safeguards in Indonesia. *Environmental Science & Policy* 76:59–69. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.06.006>
- Kengoum F, Pham TT, Moeliono M, Dwisatrio B and Sonwa DJ. 2020. *The context of REDD+ in the Democratic Republic of Congo: Drivers, agents and institutions*. 2nd edition. Occasional Paper 207. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/007793>
- Kesale, A.M., 2017. Selected experiences of the use of the village assembly in the governance at the grassroots levels in Ludewa district council in Tanzania. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(2), pp.1–11

- KfW Development Bank. 2017. *REDD+ in the State of Acre, Brazil: Rewarding a pioneer in forest protection and sustainable livelihood development*. Fact Sheet. Frankfurt: Germany: KfW. Accessed 11 July 2022. <https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/REDD-Early-Movers-Acre-Fact-Sheet.pdf>
- Kowler LF, Kumar Pratihast A, Pérez Ojeda del Arco A, Larson AM, Braun C and Herold M. 2020. Aiming for Sustainability and Scalability: Community Engagement in Forest Payment Schemes. *Forests* 11(4):444. <https://doi.org/10.3390/f11040444>
- Larson AM, Dokken T, Duchelle AE, Atmadja S, Resosudarmo IA, Cronkleton P, Cromberg M, Sunderlin W, Awono A and Selaya G. 2015. The role of women in early REDD+ implementation: lessons for future engagement. *International Forestry Review* 17(1):43–65. <https://doi.org/10.1505/146554815814725031>
- Larson AM, Sarmiento Barletti JP, Ravikumar A and Korhonen-Kurki K. 2018. Multi-level governance: Some coordination problems cannot be solved through coordination. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 81–91
- Le ND, Loft L, Tjajadi JS, Pham TT and Wong GY. 2016. *Being equitable is not always fair: An assessment of PFES implementation in Dien Bien, Vietnam*. Working Paper 205. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006167>
- Lin L, Sills E and Cheshire H. 2014. Targeting areas for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) projects in Tanzania. *Global Environmental Change* 24:277–286. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.003>
- Liu G, Liu Q, Song M, Chen J, Zhang C, Meng X, Zhao J and Lu H. 2020. Costs and Carbon Sequestration Assessment for REDD+ in Indonesia. *Forests* 11(7):770. <https://doi.org/10.3390/f11070770>
- Loft L, Gebara MF and Wong GY. 2016. *The experience of ecological fiscal transfers: Lessons for REDD+ benefit sharing*. Occasional Paper 154. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006168>
- Loft L, Gehrig S, Le DN and Rommel J. 2019. Effectiveness and equity of Payments for Ecosystem Services: Real-effort experiments with Vietnamese land users. *Land Use Policy* 86:218–28. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.010>
- Loft L, Le DN, Pham TT, Yang AL, Tjajadi JS, Wong GY. 2017. Whose equity matters? National to local equity perceptions in Vietnam's payments for forest ecosystem services scheme. *Ecological Economics* 135:164–75. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.016>
- Loft L, Pham TT, Wong GY, Brockhaus M, Le DN, Tjajadi JS, Luttrell C. 2017. Risks to REDD+: potential pitfalls for policy design and implementation. *Environmental Conservation*. 44(1):44–55. [doi:10.1017/S0376892916000412](https://doi.org/10.1017/S0376892916000412)
- Loft L, Thuy PT and Luttrell C. 2014. *Lessons from payments for ecosystem services for REDD+ benefit-sharing mechanisms*. Info Brief No 68. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/004488>
- Luttrell C and Betteridge B. 2017. *Lessons for multi-level REDD+ benefit-sharing from revenue distribution in extractive resource sectors (oil, gas and mining)*. Occasional Paper 166. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006385>
- Luttrell C, Loft L, Gebara MF, Kweka D, Brockhaus M, Angelsen A and Sunderlin WD. 2013. Who should benefit from REDD+? Rationales and realities. *Ecology and Society* 18(4): 52. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-05834-180452>
- [MARD] Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam and [FCPF] The Forest Carbon Partnership Facility. 2019. *Benefit sharing plan of the program on emissions reductions in north central region of Viet Nam for the period 2019–2024*. Washington DC, USA: The World Bank. Accessed 11 July 2022. <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/676631550223032222/Advanced-Draft-Benefit-Sharing-Plan-for-Vietnams-North-Central-Region.docx>

- May PH, Gebara MF, Barcellos LM, Rizek M and Millikan B. 2016. *The context of REDD+ in Brazil: Drivers, actors and institutions – 3rd Edition*. Occasional Paper 160. Bogor, Indonesia: CIFOR. DOI: [10.17528/cifor/006338](https://doi.org/10.17528/cifor/006338)
- Moeliono M, Pham TT, Bong IW, Wong GY and Brockhaus M. 2017. Social Forestry – why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society* 1(2):78–97. doi: [10.24259/fs.v1i2.2484](https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484)
- Morgan PJ and Trinh LQ. 2016. *Fiscal Decentralization and Local Budget Deficits in Viet Nam: An Empirical Analysis*. ADBI Working Paper 613. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Accessed 11 July 2022. <https://www.adb.org/publications/fiscal-decentralization-local-budgetdeficits-viet-nam>
- Mumbunan S and Wahyudi R. 2016. Revenue loss from legal timber in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 71:115–23. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.025>
- Murray JP, Grenyer R, Wunder S, Raes N, Jones JP. 2015. Spatial patterns of carbon, biodiversity, deforestation threat, and REDD+ projects in Indonesia. *Conservation Biology*. 29(5):1434–1445. <https://doi.org/10.1111/cobi.12500>
- Myers R and Muhajir M. 2015. Searching for Justice: Rights vs “Benefits” in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia. *Conservation & Society* 13(4):370–381
- Myers R, Larson AM, Ravikumar A, Kowler LF, Yang A, Trench T. 2018 Messiness of forest governance: How technical approaches suppress politics in REDD+ and conservation projects. *Global Environmental Change* 50:314–324. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015>
- Nantongo M, Vatn A. Estimating transaction costs of REDD+. *Ecological economics* 156:01–11. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.08.014>
- Ngoma H, Angelsen A, Carter S and Roman-Cuesta RM. 2018. Climatesmart agriculture: Will higher yields lead to lower deforestation? In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 175–187
- NYDF Assessment Partners. 2021. *Taking stock of national climate action for forests*. Amsterdam: Climate Focus. Accessed 11 Jun 2023. <https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/>
- Ochieng RM, Arts B, Brockhaus M and Visseren-Hamakers IJ. 2018. Institutionalization of REDD+ MRV in Indonesia, Peru, and Tanzania. *Ecology and Society* 23(2):8. <https://doi.org/10.5751/ES-09967-230208>
- Ochieng RM, Visseren-Hamakers IJ, Arts B, Brockhaus M and Herold M. Institutional effectiveness of REDD+ MRV: Countries progress in implementing technical guidelines and good governance requirements. *Environmental Science & Policy* 61:42–52. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.018>
- Oldekop JA, Sims KR, Karna BK, Whittingham MJ and Agrawal A. 2019. Reductions in deforestation and poverty from decentralized forest management in Nepal. *Nature Sustainability* 2(5):421–428. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3>
- Oo TN, Hlaing EES, Aye YY, Chan N, Maung NL, Phyo SS, Thu P, Thuy PT, Maharani C, Moeliono M, Gangga A, Dwisatrio B, Kyi MKM and San SM. 2020. *The context of REDD+ in Myanmar: Drivers, agents and institutions*. Occasional Paper 202. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/007556>
- Pacheco P, Bakhtary H, Camargo M, Donofrio S, Drigo I and Mithöfer D. 2018. The private sector: Can zero deforestation commitments save tropical forests? In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 161–173
- Pelletier J, Horning N, Laporte N, Samndong RA, Goetz S. 2018. Anticipating social equity impacts in REDD+ policy design: An example from the Democratic Republic of Congo. *Land Use Policy* 75:102–15. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.011>

- Pham TT and Brockhaus M. 2015. *Gender mainstreaming in REDD+ and PES: Lessons learned from Vietnam*. Gender Brief 5. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/5900/>
- Pham TT, Bennet K, Vu TP, Brunner J, Le ND and Nguyen DT. 2013. *Payments for forest environmental services in Vietnam: From policy to practice*. Occasional Paper 93. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Pham TT, Di Gregorio M, Carmenta R, Brockhaus M, Le DN. 2014. The REDD+ policy arena in Vietnam: participation of policy actors. *Ecology and Society* 19(2): 22. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-06389-190222>
- Pham TT, Hoang TL, Nguyen DT, Dao TLC, Ngo HC and Pham VH. 2019. *The context of REDD+ in Vietnam: Drivers, agents and institutions 2nd edition*. Occasional Paper 196. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/007402>
- Pham TT, Kengoum F, Moeliono M and Dwisatrio B. 2021. Forest governance in DRC: an analysis from actors' participation in REDD+ policy development. *International Forestry Review* 23(1):79–89. <https://doi.org/10.1505/146554821832140394>
- Pham TT, Le TTT, Tuyet HNK, Pham VT, Tran PHNK, Tran TD, Tran NMH, Nguyen TTA and Nguyen TVA. 2021. Impacts of Payment for Forest Ecosystem Services in Protecting Forests in Dak Lak Province, Vietnam. *Forests* 12(10):1383. <https://doi.org/10.3390/f12101383>
- Pham TT, Mai YH, Moeliono M and Brockhaus M. 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *International Forestry Review* 18(3):334–44. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>
- Pham TT, Mai YH, Moeliono M, Brockhaus M. 2016. Women's participation in REDD+ national decision-making in Vietnam. *International Forestry Review*. 18(3):334–344. <https://doi.org/10.1505/146554816819501691>
- Pham TT, Moeliono M, Angelsen A, Brockhaus M, Gallo P, Hoang TL, Dao TLC, Ochoa C and Bocanegra K. 2018. Strategic alignment: Integrating REDD+ in NDCs and national climate policies. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 69–80
- Pham TT, Moeliono M, Brockhaus M, Le DN, Wong G and Le TM. 2014. Local preferences and strategies for effective, efficient, and equitable distribution of PES revenues in Vietnam: Lessons for REDD+. *Human Ecology* 42(6): 885–899.
- Pham TT, Moeliono M, Nguyen TH, Nguyen HT and Vu TH. 2012. *The context of REDD+ in Vietnam: Drivers, agents and institutions*. Occasional Paper 75. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/003737>
- Pham TT, Moeliono M, Yuwono J, Dwisatrio B and Gallo P. 2021. REDD+ finance in Brazil, Indonesia and Vietnam: Stakeholder perspectives between 2009–2019. *Global Environmental Change* 70:102330. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102330>
- Pham TT, Ngo HC, Dao TL, Hoang TL and Moeliono M. 2021. Participation and influence of REDD+ actors in Vietnam, 2011–2019. *Global Environmental Change* 68:102249. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249>
- Pham TT, Ngo HC, Dao TL, Hoang TL and Moeliono M. Participation and influence of REDD+ actors in Vietnam, 2011–2019. *Global Environmental Change* 68:102249. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249>
- Pham TT, Ngo HC, Dao TLC, Hoang TL and Fisher MR. 2020. The politics of numbers and additionality governing the national Payment for Forest Environmental Services scheme in Vietnam: A case study from Son La province. *Forest and Society* 4(2):379–404. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891>
- Pham TT, Ngoc TB, Thürer T, O'Connell E. 2021. *Payments for Forest Environmental Services in Vietnam: Strengthening effectiveness through monitoring and evaluation*. Info Brief No 327. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/008028>

- Pham TT, Nguyen TD, Dao CTL, Hoang LT, Pham LH, Nguyen LT and Tran BK. 2021. Impacts of Payment for Forest Environmental Services in Cat Tien National Park. *Forests* 12(7):921. <https://doi.org/10.3390/f12070921>
- Pham TT, Tran NLD, Nong NKN and Nguyen DT. 2021. Mainstreaming gender in REDD+ policies and projects in 17 countries. *Journal of Environmental Policy & Planning* 23(6): 701–715. DOI: [10.1080/1523908X.2021.1903408](https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1903408)
- production. In World Bank Group, eds. *Designing fiscal instruments for sustainable forests*. Washinton DC, USA: The World Bank. 145–171
- Rakatama A, Iftekhar MS and Pandit R. 2020. Perceived benefits and costs of REDD+ projects under different forest management regimes in Indonesia. *Climate and Development* 12(5):481–493. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1642178>
- Ramcilovic-Suominen S, Carodenuto S, McDermott C, Hiedanpää J. 2021 Environmental justice and REDD+ safeguards in Laos: Lessons from an authoritarian political regime. *Ambio* 50(12):2256–2271. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01618-7>
- Robinson EJZ, Albers HJ, Lokina R and Meshack C. 2016. Allocating Group-Level Payments for Ecosystem Services: Experiences from a REDD+ Pilot in Tanzania. *Resources* 5(4):43. <https://doi.org/10.3390/resources5040043>
- Roitman I, Vieira LC, Jacobson TK, da Cunha Bustamante MM, Marcondes NJ, Cury K, Estevam LS, da Costa Ribeiro RJ, Ribeiro V, Stabile MC and de Miranda Filho RJ. 2018. Rural Environmental Registry: An innovative model for land-use and environmental policies. *Land use policy* 76:95–102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.037>
- Salvini G, Herold M, De Sy V, Kissinger G, Brockhaus M and Skutsch M. 2014. How countries link REDD+ interventions to drivers in their readiness plans: implications for monitoring systems. *Environmental Research Letters* 9(7):074004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/7/074004>
- Samndong RA, Bush G, Vatn A and Chapman M. 2018. Institutional analysis of causes of deforestation in REDD+ pilot sites in the Equateur province: Implication for REDD+ in the Democratic Republic of Congo. *Land Use Policy* 76:664–674. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.048>
- Santiago I. 2020. REDD+ RORAIMA | Denarium lança política que possibilita a captação de recursos financeiros pela valorização de ativos ambientais. Roraima, Brazil: Roraima government. Accessed 1 November 2020. <http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/2550-redd-roraima-d>
- Schmitt CB and Mukungu J. 2019. How to Achieve Effective Participation of Communities in the Monitoring of REDD+ Projects: A Case Study in the Democratic Republic of Congo (DRC). *Forests* 10(9):794. <https://doi.org/10.3390/f10090794>
- Seymour FJ, Aurora L and Arif J. 2020. The jurisdictional approach in Indonesia: Incentives, actions, and facilitating connections. *Frontiers in Forests and Global Change* 3:124. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>
- Seymour FJ, Aurora L and Arif J. 2020. The jurisdictional approach in Indonesia: Incentives, actions, and facilitating connections. *Frontiers in Forests and Global Change* 3:124. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>
- Silva Junior CH, Carvalho NS, Pessôa A, Reis JB, Pontes-Lopes A, Doblaz J, Heinrich V, Campanharo W, Alencar A, Silva C and Lapola DM. 2021. Amazonian forest degradation must be incorporated into the COP26 agenda. *Nature Geoscience* 14(9):634–5. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00823-z>
- Simonet G, Subervie J, Ezzine-de-Blas D, Cromberg M, Duchelle AE. 2019. Effectiveness of a REDD+ project in reducing deforestation in the Brazilian Amazon. *American Journal of Agricultural Economics* 101(1):211–29. <https://doi.org/10.1093/ajae/aay028>
- Špirić J, Reyes AE, Rodríguez ML and Ramírez MI. 2021. Impacts of REDD+ in Mexico: Experiences of Two Local Communities in Campeche. *Sociedad y Ambiente* (24):1–33. <https://doi.org/10.31840/sya.vi24.2387>

- Stickler C, David O, Chan C, Ardila JP and Bezerra T. 2020. The Rio Branco Declaration: Assessing progress toward a near-term voluntary deforestation reduction target in subnational jurisdictions across the tropics. *Frontiers in Forests and Global Change* 3:50. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050>
- Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle AE, Resosudarmo IA, Huynh TB, Awono A and Dokken T. 2014. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development* 55:37–52. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01>.
- Tegegne YT, Palmer C, Wunder S, Moustapha NM, Fobissie K and Moro E. 2021. REDD+ and equity outcomes: Two cases from Cameroon. *Environmental Science & Policy* 124:324–35. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003>
- Thaler GM and Anandi CA. 2017. Shifting cultivation, contentious land change and forest governance: the politics of swidden in East Kalimantan. *The Journal of Peasant Studies* 44(5):1066–1087. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1243531>
- The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 2018. *Advanced Draft Benefit Sharing Plan for the Mai-Ndombe Emission Reductions Program in the Democratic Republic of Congo* [Draft]. Accessed 11 July 2022. https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%202018_CLEAN.pdf
- The Ministry of Environmental and Forestry and The Provincial Government of East Kalimantan. 2020. *Benefit Sharing Plan East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction, INDONESIA* [Draft 1.6]. Bogor, Indonesia: P3SEKPI. http://simlit.puspajak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_GoI_29042020.pdf
- Tjajadi JS, Yang AL, Naito D and Arwida SD. 2015. *Lessons from environmental and social sustainability certification standards for equitable REDD+ benefit-sharing mechanisms*. Infor Brief No 119. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005587>
- Toni F. 2011. Decentralization and REDD+ in Brazil. *Forests* 2(1):66–85. <https://doi.org/10.3390/f2010066>
- Trung LQ, Phuong VT, Yang AL and Hai VD. 2015. *The distribution of powers and responsibilities affecting forests, land use, and REDD+ across levels and sectors in Vietnam: A legal study*. Occasional Paper 137. Bogor, Indonesia: CIFOR. DOI: [10.17528/cifor/005743](https://doi.org/10.17528/cifor/005743)
- Umali T. 2020. *Completion of One Map Policy targeted for end of 2020*. Singapore: OpenGov Asia. Accessed 11 July 2022. <https://opengovasia.com/completion-of-one-map-policy-targeted-for-end-of-2020/>
- Urzedo D and Chatterjee P. 2021. The Colonial Reproduction of Deforestation in the Brazilian Amazon: Violence Against Indigenous Peoples for Land Development. *Journal of Genocide Research* 23(2): 302–324, DOI:[10.1080/14623528.2021.1905758](https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1905758)
- van der Hoff R, Rajão R and Leroy P. 2018. Clashing interpretations of REDD+ “results” in the Amazon Fund. *Climatic Change* 150: 433–445. <https://doi.org/10.1007/s10584-018-2288-x>
- Verchot L, De Sy V, Romijn E, Herold M and Coppus R. Forest restoration: Getting serious about the ‘plus’ in REDD+. 2018. Introduction: REDD+ enters its second decade. In Angelsen A, Martius C, De Sy V, Duchelle AE, Larson AM and Pham TT, eds. *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 189–202.
- Verhoeven M, Magrath W, Robbins A and Kallaur E. 2019. *Mobilizing and Managing Public Forestry Revenue*. Governance Discussion Paper No 1. Washington DC, USA: The World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/33086>
- Walle Y and Nayak D. 2020. How can participatory forest management cooperatives be successful in forest resources conservation? An evidence from Ethiopia. *Journal of Sustainable Forestry* 39(7):655–73. <https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1684950>
- Williams DA and Dupuy KE. 2019. Will REDD+ safeguards mitigate corruption? Qualitative evidence from Southeast Asia. *The Journal of Development Studies* 55(10):2129–2144. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1510118>

- Wong GY, Loft L, Brockhaus M, Yang AL, Pham TT, Assembe–Mvondo S and Luttrell C. 2017. An assessment framework for benefit sharing mechanisms to reduce emissions from deforestation and forest degradation within a forest policy mix. *Environmental Policy and Governance* 27(5):436–52. <https://doi.org/10.1002/eet.1771>
- Wong GY, Luttrell C, Loft L, Yang A, Pham TT, Naito D, Assembe–Mvondo S and Brockhaus M. Narratives in REDD+ benefit sharing: Examining evidence within and beyond the forest sector. *Climate Policy* 19(8):1038–1051. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1618786>
- Yang A, Tien ND, Phuong VT, Trung LQ, Thuy TP, Larson AM and Ravikumar A. 2016. *Analyzing multilevel governance in Vietnam: Lessons for REDD+ from the study of land-use change and benefit sharing in Nghe An and Dien Bien provinces*. Working Paper 218. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/006392>
- Yang AL, Wong G and Loft L. 2015. *What can REDD+ benefit sharing mechanisms learn from the European Rural Development Policy?*. Info Brief 126. Bogor, Indonesia: CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/005745>
- Yanuardi Y, Vijge MJ, Biermann F. 2021. Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *The Extractive Industries and Society* 8(3):100905. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905>
- Zwick S. 2019. *The Story of the Surui Forest Carbon Project*. Washington DC, USA: Forest Trends. Accessed 11 February 2022. <https://www.forest-trends.org/blog/the-story-of-the-surui-forest-carbon-project/>



Norad



CIFOR-ICRAF

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Pusat Penelitian Agroforestri Dunia (ICRAF) mendambakan dunia yang lebih lestari dengan berbagai jenis pohon tumbuh di hampir semua jenis bentang alam, mulai dari lahan kering hingga daerah tropis yang lembab untuk menopang lingkungan hidup dan kesejahteraan bagi semua. CIFOR-ICRAF merupakan salah satu Pusat Penelitian di bawah organisasi CGIAR.

